

m^{edia}umat

mediaumat.news

Memperjuangkan Kehidupan Islam

Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 11.000,-

Edisi 235
12 - 25 Jumadil Awal 1440 H
18 - 31 Januari 2019

KEDUSTAAN DAN KEJAHATAN *di Balik* DIVESTASI FREEPORT

■ **HADITS**
Pemimpin
Penipu Rakyat
Diharamkan
Masuk Surga

■ **MEDIA NASIONAL**
Muslim Uighur
Terima Kasih
ke Muslim di Indonesia

■ **WAWANCARA**
Marwan Batubara,
Direktur Eksekutif IRESS
KPK Harus Selidiki Kasus
Divestasi Saham Freeport



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Alhamdulillah, kami bisa hadir kembali di ruang baca Anda. Semoga Anda senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Pembaca yang dirahmati Allah, situasi politik di Tanah Air kian memanas. Pemilihan presiden dan anggota legislatif tinggal beberapa saat lagi. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden terus menjajakan dirinya, meraih simpati masyarakat Indonesia. Demikian pula para calon wakil rakyat mulai memajang foto-foto mereka di pinggir-pinggir jalan dan tempat strategis. Mereka yang sebelumnya mungkin tak dikenal oleh masyarakat tiba-tiba muncul dan seolah peduli dengan nasib masyarakat.

Ya, begitulah ajang demokrasi. Setiap lima tahunan rakyat diajak menikmati pesta: memilih wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi mereka. Rakyat semuanya diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Bahkan tahun ini ada yang lebih istimewa yakni orang gila pun diberikan hak pilih. Bagaimana mungkin orang yang tidak waras ikut menentukan pilihan? Jangan-jangan bila sistem ini terus berlangsung, orang gila pun bisa jadi wakil rakyat.

Maka, suara orang waras pun sama dengan orang gila. Nilai orang waras, betul-betul telah direndahkan dan disejajarkan dengan mereka. Padahal, malaikat saja mengangkat penanya untuk mencatat perbuatan orang yang tidak waras.

Pembaca yang dirahmati Allah, bagi kita umat Islam, ada satu kekhawatiran terhadap kontestansi yang sedang berlangsung ini. Konflik horizontal sesama Muslim. Bagaimana pun ini sangat berbahaya bagi persatuan dan ukhuwah islamiyah. Tanda-tanda ke arah itu sudah terlihat. Padahal, tidak ada jaminan,

siapa pun yang jadi, akan menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman untuk mengatur negeri ini.

Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Umat ini tidak boleh saling merendahkan, apalagi menyakiti. Sebab itu adalah larangan syariah Islam. Satu Muslim dengan Muslim yang lainnya adalah saudara. Mereka terikat oleh akidah yang sama. Punya aturan yang sama.

Pembaca yang dirahmati Allah, kalau sesama Muslim harus bersatu, beda bila berhadapan dengan penjajah. Tidak boleh kita berbaik sangka kepada mereka. Penjajah selamanya adalah mengeksploitasi milik kita. Tak ada negosiasi, yang ada adalah mengusirnya. Inilah seharusnya harga mati yang harus disuarakan oleh penduduk negeri ini.

Nah, dalam kaitan itu, tentu menjadi aneh ketika rezim negeri ini justru memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia, 20 tahun ke depan. Sudahlah kontraknya diperpanjang, Indonesia menyuntikkan dana demi menjaga kelangsungan perusahaan yang sudah puluhan tahun membawa pergi emas kita. Mengapa itu bisa terjadi? Riilah apa yang dilakukan pemerintah Jokowi? Kali ini Media Utama mengupas hal itu.

Pembaca yang dirahmati Allah, edisi ini kami juga menyoroti pembangunan infrastruktur rezim Jokowi. Lembaga sebesar Bank Dunia pun mengkritisi pembangunannya. Ada apa? Benarkah pembangunan proyek tersebut tidak menyentuh kebutuhan langsung rakyat dan menjerat rakyat dengan utang?

Akhirnya, kami berharap kupasan kami dapat membuka cakrawala berpikir Anda. Terus gaungkan amar makruf nahi munkar.

Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

MEDIA PEMBACA

Prostitusi di Alam Demokrasi

Sederetan kasus prostitusi nampak di depan mata, tapi hanya sekadar jadi perbincangan tanpa solusi pasti. Inilah negeri demokrasi yang syarat dengan kebebasan tanpa mengindahkan aturan ilahi. Sehingga prostitusi kian menyatu dengan alam demokrasi. Ketika zina bukan dianggap tindakan kriminal yang harus diberi sanksi, ketika pezina masih dianggap manusia suci. Ketika itulah kasus prostitusi tidak akan pernah berhenti. **Ummu Nawwaf. Pasuruan. +6285646712xxx**

BBM Naik Tak Bisa Turun

Dulu katanya harga minyak di negara kita mengikuti harga minyak dunia? Tetapi beberapa kali minyak dunia turun, harga minyak di negara kita *tetep* naik *tuh*. Tetapi hari ini harga minyak dunia naik, tapi kok harga minyak kita turun?

Apakah ini menunjukkan kalau negara kita tidak konsisten dengan peraturan yang dibuat? Ataukah ada kepentingan mengingat semakin dekatnya pesta demokrasi?

Apapun jawabannya rakyat yang dirugikan. Padahal negara kita memiliki cadangan minyak yang banyak, tetapi kenapa tidak bisa dinikmati oleh semua rakyat?

Itulah akibat kita tidak menggunakan Islam di seluruh aspek kehidupan. Padahal Islam mengatur bagaimana mengurus SDA dan perekonomian untuk rakyat. Maka terapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, dengan menegakkan khilafah di muka bumi. **Ummu Halim. Gondang. +6285850206xxx**

Rezim Gagal

Kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ketiganya merupakan kebutuhan pokok rakyat yang sifatnya komunal. Negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk urusan ini. Bila tidak, kondisinya seperti yang kita alami saat ini.

Berusaha mengurai masalah, temukan dulu problem azasinya, baru tepat mengatasinya. Bila tidak, tambah sulam akan menjadi sifat dari solusi itu. Problem pun tak bakal tuntas diselesaikan. **Ummu Farhana. Tulungagung. +6285790510xxx**

Maafkan Kami Muslim Uighur

Beragam seruan, kutukan, kecaman dan semacamnya tak akan mampu mengubah kecongkakan Cina.

Nation states, suaranya pun telah terkebiri oleh dinding nasionalisme. Pemimpin Muslim diam seribu bahasa.

Diperlukan kedaulatan Islam untuk memimpin dunia. Tegaknya kedaulatan Islam hanya bila ditegakkan sistemnya. Itulah sistem Khilafah Islamiyah. Umat butuh khilafah. **Ilma Susi. Tulungagung. +6289608072xxx**

Pemimpin Kerdilkan Agama

Visi misi, boleh dibuatkan, boleh didiktekan, boleh comot sana sini, tapi giliran diuji pemaparannya oleh rakyat, tentu *nggak* boleh diwakilkan, karena yang paling bertanggung jawab itu pimpinan tertinggi tak hanya di dunia juga di akhirat.

Jangan pilih pemimpin yang mengerdilkan peran agama (Islam) dalam menyelesaikan masalah. Meskipun mereka mengaku kiai dan pernah menjadi imam shalat saja. **Ummu Hanif. Jawa Timur. +6285335022xxx**

Prostitusi yang Difasilitasi

Ramai pemberitaan di media baik cetak maupun elektronik dan medsos tentang artis yang terjerat prostitusi *online*, bukan hanya satu tapi banyak artis yang sudah terjerat praktek ini,

Tidak main main tarif yang mereka pasang dari jutaan hingga puluhan juta bahkan ratusan juta, dan mereka seolah sudah tidak merasa bersalah dengan apa



Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur, Sayid Tumturk, mengungkapkan salah satu kejahatan komunis Cina untuk memusnahkan Islam dari jati diri etnis Uighur adalah menikahkan Muslimah Uighur dengan kafir komunis Cina, Sabtu (12/1/2019) dalam acara *Silaturahmi Tokoh dan Lembaga Peduli Muslim Uighur* di AQL Center, Jakarta.



MediaUmat tabloid
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam

SMS/WA Berlangganan: 0857 1713 5759

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan, Ahmad Khozinudin. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wajidi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Redaktur Pelaksana:** Humaidi. **Redaksi:** Joko Prasetyo, Fatih Sholahuddin, Ghifari Ramadhan, Zulia Ilmawati, Kholda Naajiyah. **Desain dan Pracetak:** Senyum Adv. **Keuangan:** Ibnu Soetrisno. **Marketing:** Muhammad Ihsan. **Sirkulasi:** Yudi. **Iklan:** Haris. **Alamat Redaksi dan Iklan:** Gedung Menara 165 Lantai 4, JTB Simatupang Kav 1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan. **Telp:** 021-50812002 ext 767 **Fax:** 021-50812003. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com. **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085711044000, SMS: 089650202478. **Hunting Iklan:** 085717135759. **Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.



SMS/WA Media Pembaca/Komentar untuk MU: 089634912651. Sertakan Nama dan Asal daerah.

yang mereka kerjakan karena memang semuanya difasilitasi. Andaikan mereka tertangkap mereka bisa dengan mudah menyangkal dan ditetapkan hanya sebagai saksi.

Begitu miris kehidupan hedonis para artis yang rela menjual harga dirinya demi memenuhi kebahagiaan dunia yang membutakan. Bukan hanya itu, peran dari penikmat seks itu sendiri mereka berani menggelontorkan uang yang fantastis demi memenuhi hasratnya.

Padahal di dalam Islam sudah jelas yang namanya memenuhi *gharizah na'u* (naluri melestarikan kehidupan) diatur dalam sebuah pernikahan. Dan juga Allah mengharamkan zina karena zina merupakan dosa besar dan pelakunya harus dihukum dengan hukum rajam bagi pelaku zina *ghair muhsan* dan dikubur hidup seleher dilempari batu bagi pelaku zina *muhsan*.

Dengan kejadian di atas, menunjukkan kegagalan pemerintah mengatur hubungan sosial antara pria dan wanita yang mengadopsi kebebasan berperilaku. Untuk itu mari kita berjuang agar hukum Islam bisa ditegakkan dalam sebuah institusi *khilafah 'alaa minhajjin nubuwwah*.

Nur'aliyah.Jelekong . +6287839312xxx

2019 Saatnya Ganti Sistem

Bertubi-tubi bencana menimpa negeri ini, dari mulai gempa di Lombok, Palu hingga terakhir tsunami di Banten. Tidak hanya bencana yang menimpa negeri ini. Masyarakat pun semakin terhimpit hidup dengan kebutuhan pokok yang kian tak terbendung harganya.

Lagi-lagi semua ini hasil dari kegagalan sistem yang bobrok. Sistem kapitalis makin hari semakin menunjukkan ketidakberhasilannya dalam memimpin negara. Lalai dan tak acuh terhadap kepentingan umat. Dan ketika masalah begitu banyak yang hadir pun bukan solusi. Tapi malah menambah masalah baru. Rakyat dipalak dengan pajak dan dibebani utang negara.

Jelas tahun 2018 adalah tahun kesedihan bagi umat Islam. Kezaliman demi kezaliman, kedurhakaan demi kedurhakaan terjadi hingga mengundang berbagai peringatan dari Allah SWT.

Di tahun 2019 selayaknya umat fokus dan lebih giat berjuang mewujudkan perubahan hakiki. Yaitu mengajak umat mengganti sistem kapitalis dan menerapkan hukum Allah dalam naungan khilafah yang dijamin akan mengundang kebaikan dan keberkahan. **Ummu Hilmi. +6289503257xxx**

Karena Muslim

Mengapa pemerintahan Cina melakukan penindasan terhadap Muslim Uighur? Penyebabnya hanya satu karena mereka Muslim, karena mereka memeluk Islam artinya yang dimusuhi oleh pemerintah Cina adalah segala hal yang berkaitan dengan Islam. Itu pula yang hendak mereka musnahkan dari bangsa Uighur.

Di situlah mereka berupaya mencuci otak kaum Uighur dan menanamkan doktrin komunisme. Bagi kita semua tindakan mereka sesuatu yang mengherankan. Sebab begitulah sikap kaum kafir terhadap kaum Muslim pada umumnya, kebencian mereka terhadap kaum Muslimin dengan jelas diberitakan dalam firmannya: *"Sungguh kaum akan mendapati manusia yang paling keras permusuhan mereka. Terhadap orang yang beriman ialah kaum yahudi dan orang-orang musyrik"* (TQS Al-maidah (5): 82)

Karena di sini jelas kita tidak bisa berharap banyak kepada para pemimpin Muslim saat ini. Khilafahlah satu-satunya harapan, karena khilafahlah pelindung sejati umat sekaligus penjaga agama kehormatan darah dan harta mereka. Khilafah juga yang akan menjaga kesatuan dan persatuan dan keutuhan setiap jengkal wilayah mereka.

Tak bisa lagi kaum Muslimin menunggu terlalu lama. Semoga penderitaan kaum Muslimin di seluruh dunia khususnya di Uighur menyadarkan kita semua bahwa saatnya khilafah yang kedua ditegakkan di muka bumi ini.

The Leni. Munjul. 6282219381xxx



"Bahwa Nabi SAW berkata kepada Ka'ab bin 'Ujrah ra, 'Semoga Allah melindungi dirimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh.' Ka'ab bin Ujrah berkata, 'Apa itu kepemimpinan orang-orang bodoh?' Nabi menjawab, 'Para pemimpin yang datang setelah aku yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku dan tidak berpedoman dengan sunnahku. Maka barangsiapa membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka mereka bukan bagian dariku dan aku pun bukan bagian dari mereka dan mereka tidak akan mendatangi aku di telagaku. Barangsiapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka mereka bagian dariku dan aku pun bagian dari mereka dan mereka akan mendatangi aku di telagaku.' (HR Ahmad no 13919).

Subhanallah, jauh sebelumnya, junjungan kita Rasulullah SAW, sudah mengingatkan kita tentang pemimpin yang bodoh kalau berkuasa di tengah-tengah umat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan: "Semoga Allah melindungi dirimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh", ini menunjukkan betapa bahayanya pemimpin bodoh itu. Pasti saja, karena persoalan kepemimpinan di tengah umat ini, akan berdampak besar terhadap umat. Kebijakan pemimpin negara yang keliru, bukan hanya berpengaruh pada individu, atau keluarga, atau seluruh masyarakat, seluruh negara. Sebaliknya kebijakan penguasa yang benar akan memberikan kebaikan pada seluruh rakyat.

Rasulullah SAW menjelaskan dengan terang benderang kepada kita, siapa pemimpin bodoh itu: Pemimpin yang tidak berpetunjuk dan berpedoman kepada Rasulullah SAW. Pemimpin yang tidak menerapkan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Inilah pemimpin yang bodoh.

Sederhana, bagaimana tidak disebut bodoh, pemimpin yang mengabaikan, mencampakkan, apalagi memusuhi syaria Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, yang memberikan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Bagaimana tidak disebut bodoh, kalau mengabaikan hukum-hukum Allah yang dijamin kebaikan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa selama berpegang teguh pada Alquran dan as Sunnah, maka umat Islam tidak akan pernah tersesat selamanya.

Bagaimana tidak bodoh, ada yang dijamin benar, berasal dari Alquran dan As Sunnah, tapi justru yang diambil oleh aturan yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Yang dipastikan memberikan keburukan di dunia dan di akhirat. Yang dipastikan akan menyebabkan 'kesempitan hidup'. Sebagaimana firman Allah SWT : *"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta."* (TQS Thaha: 124)

Dan secara fakta kita juga melihat bagaimana pemimpin yang tidak berpedoman pada Islam akan mengambil kebijakan-kebijakan yang dungu. Rezim sekarang misalkan, memilih berseberangan dengan umat Islam, bahkan menunjukkan sikap anti Islam dengan mengkriminalkan ulama dan membubarkan ormas Islam. Rezim seperti alergi saat umat Islam bersatu membela kemuliaan Alquran, mengecam penista Alquran. Rezim dan pendukungnya pun membangun narasi yang dilakukan umat Islam sebagai anti kebhinnekaan dan diskriminatif.

Saat umat Islam menunjukkan solidaritasnya terhadap penderitaan Muslim Rohingnya, rezim menuding ditunggangi kelompok radikal. Rezim pun nyaris tidak memberikan respon yang berarti, saat umat Islam bersuara terhadap penindasan Muslim Uighur oleh rezim komunis Cina. Di negeri yang mayoritas Islam ini tentu sebuah kedunguan berseberangan dengan umat Islam sendiri. Sama dungunya dengan melakukan kriminalisasi dan monsterisasi terhadap ajaran Islam yang merupakan ajaran agama yang merupakan mayoritas di negeri ini.

Kedunguan itu pun tampak saat mengatur kekayaan alam negeri ini. Dalam kasus Freeport, rezim sekarang berbangga telah melakukan divestasi sebesar 51 persen. Pemerintah melalui perusahaan pelat merah, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, kini memegang 51,23 persen saham Freeport. Saham itu ditebus dengan harga US\$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 55,8 triliun. Karena belum punya dana, PT Inalum pun harus berutang. Artinya, dengan kesepakatan ini, Freeport mendapatkan dana segar dan sekaligus jaminan terhadap izin pertambangan khusus sampai tahun 2041. Padahal, kalau dibiarkan, kontrak karya Freeport akan berakhir tahun 2021, dan Indonesia bisa memilikinya secara penuh, tanpa membeli saham.

Bukankah ini kedunguan? Kalau mau memakai syaria Islam, persoalannya ini sangat jelas. Persoalannya bukan pada berapa persen nilai saham yang dimiliki Indonesia. Berdasarkan Islam, barang tambang yang jumlahnya melimpah seperti emas yang dikuasi Freeport sekarang ini, merupakan milik rakyat (*milkiyah 'amah*). Artinya tidak boleh diserahkan kepada individu apalagi swasta asing, tapi harus dikelola negara dengan baik, untuk kepentingan rakyat. Berdasarkan syaria Islam, tanpa menunggu tahun 2021 pun tambang emas Freeport ini harus diambil alih oleh rakyat untuk kepentingan rakyat.

Penguasa dungu ini tentu semakin dungu, kalau tidak memiliki kemampuan (kapabilitas) individu untuk memimpin. Tidak memiliki visi dan misi yang jelas mengelola negara. Keterbatasan pengetahuan, literasi, termasuk kemampuan bahasa. Tentu kedunguan ini akan semakin parah. Yang jelas penguasa dungu seperti ini akan dimanfaatkan oleh elite-elite rakus di sekitarnya yang mengambil untung. Inilah yang membuat kenapa pemimpin yang jelas-jelas dungu kerap dibela dan dipertahankan.

Semoga umat ini kedepan tidak lagi dipimpin oleh pemimpin dungu! Kita berlindung kepada Allah SWT dari pemimpin dungu! Allahu Akbar![] **farid wadji**

Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke pembaca.tabloidmu@gmail.com



ADA DUSTA DI BALIK DIVESTASI

Pemerintah mengklaim sudah memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia melalui divestasi saham. Anehnya, posisi kunci tetap dikuasai oleh Freeport McMoran. Ini artinya, yang memegang kekuasaan tertinggi Freeport tetap orang-orang Amerika.

Belum lagi, yang dibeli oleh pemerintah itu hanyalah *participating interest* Rio Tinto, bukan saham Freeport. Dan, PI Rio Tinto itu sendiri masa berlakunya hanya sampai tahun 2021. Lalu bagaimana itu bisa dikonversi ke saham Freeport yang berlaku hingga 2041.

Yang pasti, dengan klaim pemerintah ini, Freeport mengantongi izin lagi untuk menambang emas di Timika hingga tahun 2041. Perusahaan Amerika Serikat itu bisa kembali merampas kekayaan alam Indonesia dengan bebas berdasarkan legitimasi pemerintah Indonesia di bawah rezim Jokowi.

Maka menarik apa yang diungkapkan cendekiawan Rocky Gerung. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah terhadap Freeport itu adalah sesuatu yang dibuat-dibuat sedemikian rupa.

"Suksesnya tiba-tiba Freeport berhasil dimiliki. Beritanya itu dibuat tiba-tiba, akhir tahun. Kata-katanya itu dibuat memiliki 51 persen. Kata memiliki ini negarakah? Ataukah ini tukar tambah dengan global," kata Rocky di Jakarta, Sabtu (22/12).

Apalagi dengan jelas, uang yang dipakai oleh rezim Jokowi adalah global fund alias utang dari sindikasi 11 bank asing. "Itu Inalum dari mana uangnya, porsi APBN mana?" sambungnya.

Ia menekankan, pengambilan saham perusahaan tambang emas tersebut bukan bentuk nasionalisme pemerintah. Menurutnya, itu bisnis yang wajar yang dilakukan setiap orang.

Maka dikatakan, pemerintah sedang bekerja demi perusahaan asing. *Pertama*, Freeport mendapatkan dana segar tanpa harus bersusah payah dan tanpa harus menanggung risiko utang. Selain itu, Freeport tetap mendapatkan posisi puncak sebagai pengendali utama atas jasa baik rezim Jokowi.

Kedua, bank-bank asing mendapat keuntungan karena bunga harus dibayar oleh pemerintah Indonesia sebesar sekitar 6 persen per tahun. Bank asing pasti senang karena utang yang diberikan dijamin oleh negara sehingga pasti dibayar.

Ketiga, pemerintah menutup kejahatan yang dilakukan oleh Freeport selama ini khususnya kejahatan lingkungan yang luar biasa parah. Dengan masuknya pemerintah di dalamnya, kasus-kasus pelanggaran lingkungan dan hukum akan tertutup. Lagi-lagi perusahaan asing yang untung.

Maka, banyak kalangan menilai, apa yang terjadi dengan divestasi saham Freeport ini adalah sebuah akal-akalan. Sebuah kedustaan yang dikemas sedemikian rupa untuk menutup kejahatan dan pelanggaran hukum dan lingkungan demi memperpanjang Kontrak Karya 20 tahun lagi.

Bau ketidakberesan memang tercium. Namun, memang sulit dibuktikan. Sementara, yang sudah terbukti saja seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak pernah diselesaikan oleh pemerintah.

Lalu muncul pertanyaan, mengapa pemerintah begitu getol meraih 51 Freeport kalaulah pada 2021 akan mendapatkan 100 persen sahamnya tanpa mengeluarkan modal yang terlalu besar? Inilah masalahnya.

Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Ada kepentingan asing. Ada para pemburu rente. Ada penjual kebijakan, dll.

Akhirnya, kekayaan milik rakyat itu kembali lepas dari Bumi Pertiwi atas legitimasi rezim Jokowi. Akankah kita diam menanti? []
emje



DIVESTASI JANGGAL REZIM SONTOLOYO

Rezim Jokowi mengklaim telah menguasai saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengklaim telah mendapatkan 51,2 persen saham perusahaan emas terbesar di Indonesia itu dengan membayar lunas divestasi saham sebesar 3,85 miliar dolar AS atau setara Rp 55,8 triliun ke Freeport McMoran (FCX).

Ini berarti, mayoritas saham dikuasai PT Inalum. Anehnya, posisi presiden komisaris dan direktur utama perusahaan tersebut tetap orang Freeport. Presiden komisaris diduduki oleh Richard Adkerson—tak berubah. Sedangkan Dirutnya adalah Clayton Allen Wenas (Tony Wenas). Sementara wakil pemerintah Indonesia hanya di posisi wakil saja. Muncul pertanyaan, mengapa bukan perwakilan pemerintah Indonesia [PT Inalum] yang memegang posisi kunci/puncak? Ini tidak lazim dalam sebuah perusahaan.

Sudahlah begitu, belum genap sebulan, Freeport mengumumkan tidak akan membagikan deviden selama dua tahun atau hingga tahun 2020. Yang juga aneh, pengumuman itu disam-

paikan oleh Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin. Alasannya, pendapatan Freeport dalam 2 tahun ini akan merosot drastis akibat akan berhentinya produksi dari tambang terbuka Grasberg tahun ini.

"Jadi kita *enggak* bakal bagi dividen selama dua tahun, nol sampai 2020," ujar Budi di Jakarta, Rabu (9/1).

Artinya, selama dua tahun itu pemerintah Indonesia tidak akan mendapatkan apa-apa alias gigit jari, setelah menggelontorkan uang sebesar Rp 55,8 triliun. Bahkan, pemerintah akan menanggung beban bunga sebesar sekitar 6 persen per tahun dari uang yang ditanamkan tersebut. Pasalnya, uang sebesar itu adalah uang hasil utang dari sindikasi 11 bank asing. Berarti, justru pemerintah harus membayar bunga sekitar Rp 3,35 triliun.

"Saya tidak menyebut pengambilalihan, tapi menurut saya ini betul-betul satu kebijakan sontoloyo," tandas Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Mestinya, katanya, pemerintah tinggal menunggu saja 2 tahun lagi selesai. "Kita gratis kok. Freeport akan kembali kepada kita dengan gratis. Untuk apa *nge-*

*luar*in sampai puluhan triliun. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo," tandasnya.

Penuh Kejanggalkan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai mencium adanya kejanggalkan dalam divestasi saham PT Freeport ini. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menegaskan, transaksi senilai Rp 55,8 triliun tersebut sesungguhnya melanggar kesepakatan dalam kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT Inalum, dan Dirut PTFI.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa transaksi divestasi dilakukan setelah masalah kerugian lingkungan senilai Rp185 triliun (menurut BPK) diselesaikan. "Apa betul kemudian lingkungan yang terkorbankan ekosistem yang senilai Rp 185 triliun itu sudah diselesaikan? Saya tidak yakin bahwa itu selesai," kata Gus kepada wartawan akhir Desember lalu.

Sebelum proses divestasi berlangsung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan isu sektor lingkungan dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia

Begitu saham telah dikuasai secara mayoritas oleh pemerintah Indonesia, posisi kunci tetap dipegang Freeport. Ini menyalahi kaidah bisnis.



(PTFI) sudah rampung. Ternyata yang dimaksud Menteri LHK bukannya Freeport membayar ganti rugi sebesar Rp 185 triliun kepada pemerintah Indonesia, tapi menyusun rencana pengelolaan limbah dan lingkungan sampai 2024.

Kejanggalan lainnya diungkapkan Direktur IRESS Marwan Batubara. Nilai yang dibayar oleh Indonesia untuk membeli saham sebesar 41,64 persen (untuk menjadi 51,23 persen, dari yang saat ini 9,36 persen) sangat mahal, yakni US\$3,85 miliar. Nilai ini jauh di atas harga wajar, karena pemerintah menyetujui permintaan Freeport bahwa nilai saham dihitung atas asumsi KK berlaku hingga 2041. Padahal dalam Pasal 31 KK Freeport tercantum ketentuan bahwa KK akan berakhir pada 2021. Seharusnya harganya paling mahal US\$1,7 miliar.

"Memang Freeport berhak mengajukan perpanjangan KK hingga 2041. Namun pemerintah Indonesia berhak pula tidak menyetujui permintaan perpanjangan tersebut jika memiliki alasan yang wajar," kata Marwan.

Ia pun heran mengapa pemerintah mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk menguasai 51 persen saham. Padahal, Freeport-McMoran Inc sebagai induk

usaha Freeport Indonesia di ambang kebangkrutan. Jika merujuk harga saham FCX mencapai titik terendah yakni sebesar US\$ 4,31 per lembar. Padahal, pada kurun waktu 2010-2011 saham FCX pernah mencapai US\$ 60 per lembar. "Jadi, perpanjangan operasi Freeport berarti pemerintah menolong dan memperpanjang nafas Freeport-McMoran," ujarnya.

Menurut pengamat hukum sumber daya dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, uang sebesar itu tak sepadan dengan tanggung jawab PT Inalum sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengambil alih saham Freeport Indonesia.

"Freeport ini *kan* masih banyak tanggung jawab hukumnya, pembangunan smelter, pajak, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara. Kalau nanti Inalum jadi pemegang saham mayoritas berarti ini jadi tanggung jawab Inalum juga," papar Ahmad kepada *CNNIndonesia.com*, Jumat (21/12).

Yang sangat janggal lainnya, kata Marwan, begitu saham telah dikuasai secara mayoritas oleh pemerintah Indonesia, posisi kunci tetap dipegang Freeport. Ini menyalahi kaidah bisnis. Seharusnya, yang menduduki posisi kunci

perusahaan adalah pemegang saham mayoritas. "Kita jadi pelengkap saja, meskipun saham kita mayoritas. *Kan* jadi lucu," jelasnya.

Jauh sebelum divestasi saham ini berlangsung, mantan Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio sudah angkat bicara. Ia mempertanyakan bagaimana Rio Tinto bisa memiliki saham Freeport Indonesia. "Apakah sepengetahuan pemerintah, apakah artinya Freeport tidak investasi untuk *infrastructure*, tapi dilakukan Rio Tinto? Bukankah ini artinya pelanggaran dari janji Freeport. Bukannya ditanyakan *kok* malah di *bail out*?" ungkapnya.

Tito juga mempertanyakan mengapa strukturnya pemerintah membeli *participating interest* Rio Tinto. "Apakah artinya ini dana investasi pemerintah tidak masuk ke perseroan? *Enak* amat Rio Tinto dan FMC (Freeport McMoran)," katanya.

Pertanyaan lain muncul terkait dengan janji investasi Freeport Indonesia kepada pemerintah. "Kalau Freeport Indonesia janji investasi, tapi pemerintah sudah di dalam 51 persen, artinya pemerintah berjanji ke dirinya sendiri?" tanyanya.

Dan nantinya, pemerintah

Arbitrase, Mitos Menakuti Indonesia

PT Freeport Indonesia ingin lebih lama bercokol di Indonesia. Mereka tak mau kehilangan jahan emas di Papua. Bahkan, mereka pun rela melakukan divestasi—itu kalau benar—demi memperpanjang hidupnya di Indonesia.

Makanya, bagaimana pun mereka punya cara untuk itu. Salah satunya adalah membangun mitos: jika Indonesia memutuskan kontrak dengan Freeport, maka perusahaan itu akan menggugat di Arbitrase internasional. Bersama dengan itu, antek-antek Freeport pun mengatakan, Indonesia bisa kalah di sana.

Mitos itu pun dimakan mentah-mentah oleh para pejabat tinggi Indonesia. Mereka lebih memilih memberikan perpanjangan kontrak.

Padahal, menurut pengamat hukum sumber daya dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, posisi Indonesia cukup kuat. Di dalam Kontrak Karya disebutkan, Freeport diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut. Disebutkan pula tidak akan ada penahanan atau penundaan persetujuan secara tidak wajar.

"Perpanjangan itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Artinya, pemerintah dapat menolak ataupun menerima permohonan tersebut. Apabila Freeport menggugat pemerintah ke arbitrase, maka tidak berdasar hukum. Pasal 31 Kontrak Karya harus dibaca secara utuh," tandasnya seperti dikutip *CNNIndonesia.com*.

Marwan Batubara pun mengungkapkan, ini soal kedaulatan negara. Negara harusnya berani berhadapan dengan Freeport di mana pun. Bukan malah takut.

Ia menjelaskan pengalaman negara di Amerika Selatan yang berani berhadapan dengan perusahaan multinasional di lembaga arbitrase. Faktanya mereka menang. "Jadi jangan belum-belum sudah ketakutan," jelasnya. [] emje

sangat mungkin harus mengeluarkan dana lebih besar lagi dengan alasan untuk membiayai produksi Freeport.

Kemudian, dengan ada perpanjangan kontrak hingga 2041, Tito percaya harga saham FCX di bursa New York akan naik. Dengan peningkatan harga saham, maka kapitalisasi pasar naik dan FCX pun meraup untung. "Apakah ini diperhitungkan dalam mengecilkan harga?" jelasnya.

Terakhir, Tito mempertanyakan mengapa Indonesia melalui Inalum justru membeli saham yang dipegang oleh Rio Tinto, yang artinya dana tidak masuk ke Freeport Indonesia. "Kenapa mahal amat, *mendingan* bangun *infrastructure*, dan kenapa *cash* keras?"

Batalkan

Kejanggalan demi kejanggalan mendorong berbagai kalangan mendesak pihak berwenang untuk turun tangan. Marwan misalnya, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau turun tangan untuk menyelidiki kasus divestasi tersebut.

Selain itu Marwan mendesak pemerintah membatalkan divestasi tersebut. "Kita mempunyai cukup banyak alasan yang relevan dan kuat guna membatalkan kesepakatan pemerintahan Jokowi dengan Freeport yang dicapai pada 21 Desember 2018 yang lalu," paparnya.

Ia menjelaskan, kebijakan dan kesepakatan yang sudah dicapai dengan Freeport hingga saat ini bukanlah kebenaran mutlak yang harus diterima dan didu-

kung begitu saja oleh rakyat. Menurut Marwan, banyak hal yang menunjukkan bahwa hasil negosiasi dengan Freeport sarat dengan pelanggaran hukum/UU dan potensi kerugian negara. UU yang dilanggar termasuk UU Minerba, No.4/2009, UU Kehutanan No.41/1999 Jo UU No.19/2004, UU Lingkungan Hidup No.32/2009, UU BPK No.15/2006, dll.

Desakan pembatalan juga muncul dari Network for South East Asian Studies (NSESAS). Bahkan NSESAS dengan tegas menyatakan kontrak karya Freeport harus dihentikan. Dalam rilisnya, lembaga tersebut mengungkap tiga alasan. *Pertama*, sesuai *Working Agreement* atau Kontrak Karya 1967, Indonesia hanya mendapat royalti sekitar 1 persen. *Kedua*, Kontrak Karya (KK) itu berakhir pada 2021, otomatis tambang Freeport balik menjadi 100 persen dikuasai Pemerintah Indonesia, meski ada pasal menyebutkan dapat diperpanjang hingga 2041. *Ketiga*, PT Freeport-McMoran telah melakukan beberapa macam kejahatan korporasi.

Pihak DPR sendiri sudah mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap kasus ini. Namun, wacana itu akan sulit terwujud dalam situasi menjelang pelaksanaan Pilres dan Pileg.

Tinggal *civil society* yang bisa bergerak. Beberapa kalangan sudah menyusun rencana untuk melakukan *class action* terhadap divestasi saham ini. Akankah berhasil? [] emje



Melalui korupsi yang menyandera negara, ribuan triliun dikeruk Freeport McMoran dengan kejahatan multidimensional dibiarkan.

Freeport tetaplah Freeport. Perusahaan multinasional itu dalam website resminya pernah menyatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan mayoritas kepemilikan atas PT Freeport Indonesia (PTFI).

NSEAS mengungkap berbagai kejahatan yang dilakukan perusahaan Amerika Serikat ini. *Pertama*, kejahatan lingkungan. Sejak 50 tahun lalu, rata-rata limbah atau tailing dibuang ke berbagai sungai (Aghawagun, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimue) dan tanah subur di sekitar sungai mencapai jumlah 700.000 ton per hari. Diperkirakan beberapa tahun lagi jumlah limbah bakal mencapai angka 6-7 miliar ton.

BPK menghitung kerugian yang diderita Indonesia, gara-gara kerusakan lingkungan oleh Freeport mencapai US\$12,95

miliar. Nilai ini sangat besar, mencapai lebih dari Rp187 triliun.

Kedua, kejahatan pengemplangan pajak oleh Freeport. Freeport memasukkan alat-alat berat pertambangan sampai kebutuhan Freeport berupa AC, *washing machine* dll secara bebas pajak.

Menurut NSEAS, Freeport pasti mengemplang pajak karena pajak diterima Indonesia dari Freeport jauh lebih kecil dibandingkan yang dibayar oleh perusahaan rokok Djarum dan Gudang Garam. Maka tahun berikutnya Freeport menjadi pembayar pajak terbesar setelah boroknya diungkap ke publik.

Ketiga, kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat Papua sering berdemo minta supaya Freeport ditutup. Juga cukup banyak korban tembak mati terhadap orang-orang berusaha mengais satu atau dua gram emas di limbah buangan limbah Free-

port. Beberapa Gereja di Papua Barat, tulis NSEAS, memiliki data mengenai pelanggaran HAM dilakukan oleh otoritas Freeport, dan tidak jarang menggunakan sebagian tentara dan polisi yang "didekati" dan dikooptasi oleh Freeport.

Keempat, Freeport menjadikan Indonesia sebagai *corporate state*. Sehingga setiap korupsi berskala mega di Indonesia hakikatnya telah menjadi *state capture corruption* atau korupsi sandera negara. Negara membiarkan aparat keamanan, pertahanan, hukum dan birokrasi tunduk sepenuhnya di bawah keputusan korporasi internasional yang berada di luar jangkauan negara. Negara tidak mampu mengatur dan meletakkan kepentingan korporasi di bawah kepentingan nasional Indonesia.

Melalui korupsi yang menyandera negara, ribuan triliun dikeruk Freeport McMoran de-

ngan kejahatan multidimensional dibiarkan. MSEAS menilai, Freeport McMoran telah melakukan kejahatan multidimensional. Kejahatan lingkungan, kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi, kejahatan hukum dan kejahatan politik dilakukan serentak oleh perusahaan pertambangan termasuk dalam kategori industri hitamini.

Kelima, Freeport McMoran acapkali mengancam akan gugat Pemerintah RI ke Arbitrase Internasional. Inilah ancaman yang selalu disampaikan perusahaan itu untuk menakut-nakuti pemerintah Indonesia.

Menurut Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, pemerintah harusnya berani. Hadapi saja. Meski Indonesia harus bayar nilai buku Freeport sebesar USD 6 miliar. Sebagai ganti, Indonesia dapat memiliki Freeport seutuhnya, bukan hanya 51 persen tetapi 100 persen. Lagi pula, pengadilan arbitrase memerlukan proses panjang dan akan membuat Freeport merugi. Selain saham Freeport akan hancur, juga akan mengalami berbagai kesulitan.

"Kalau kita kalah di Arbitrase Internasional, kita bayar USD6 miliar aset dia. Namun, di Arbitrase Internasional juga kita bisa angkat isu kejahatan pajak dan kejahatan lingkungan dilakukan Freeport," jelasnya.

Pemburu Rente

Meski kejahatan Freeport begitu kentara, perusahaan itu bisa melenggang dengan bebas. Bahkan, mereka pun berani tak membayar deviden. Data menunjukkan perusahaan itu tak membayar deviden sejak tahun 2011. Dan baru mau bayar lagi pada 2017 sebesar Rp1,7 triliun.

Berkuasanya Freeport bisa jadi karena banyak faktor. Yang pasti, Freeport menggunakan negaranya sebagai pelindung usahanya. Beberapa kali bahkan pejabat tinggi Paman Sam datang ke Indonesia demi kepentingan Freeport.

Termasuk menyuap pejabat Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengungkapkan

kan bahwa pada tahun 1991 CEO Freeport James Moffett mengaku telah menyogok seorang menteri di Indonesia guna memperoleh perpanjangan kontrak dan beberapa ketentuan lain dalam KK. Bahkan, menurut Rizal Ramli, James Moffett telah mengaku bersalah dan bersedia membayar uang ganti rugi dari pada masuk penjara. "James Moffett sudah *ngaku* salah, makanya bersedia bayar US\$5 miliar daripada masuk penjara karena menyogok pejabat RI," kata Rizal (22/12/2018).

Selain itu, ada orang-orang Indonesia yang memanfaatkan keberadaan Freeport untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Masih ingat kasus 'Papa Minta Saham' yang melibatkan petinggi DPR Setyo Novanto saat itu. Konon, kasus ini melibatkan banyak petinggi negara.

Jauh sebelum ini, menurut pengamat ekonomi Salamuddin Daeng, bercokolnya Freeport tak bisa dilepaskan dari sosok Ginandjar Kartasasmita yang menjadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) di tahun 1991. "Dari jabatan Mentamben tersebutlah Ginandjar mulai memainkan perannya selaku 'good boy'-nya Amerika," kecam Daeng, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, Freeport telah lama mengincar 'membeli' Ginandjar semenjak menjabat Kepala BKPM (1985-1988). Tangan raksasa itulah yang menempatkan Ginandjar untuk jabatan lebih tinggi, Mentamben.

Setahun setelah Ginandjar Kartasasmita diangkat menjadi Mentamben oleh Presiden Soeharto, Freeport Indonesia langsung mengajukan perpanjangan kontrak mereka di tahun 1989 dan meminta untuk memasukkan situs Grasberg sebagai lokasi pertambangan mereka.

Nah, beberapa kalangan pun mencium kemungkinan ada skandal dalam divestasi saham Freeport akhir tahun lalu. Memang tak mudah membuktikan. Mereka mendesak KPK turun tangan, apalagi ada temuan lembaga resmi negara BPK. Tapi KPK belum berminat. Ada apa? **emje**

Pelanggaran Nyata yang Dibiarkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengungkap hasil penelitiannya tentang Freeport. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK nomor 6/LHP/XVII/2017 tanggal 21 April 2017, BPK menyimpulkan:

1. Terdapatnya potensi peningkatan penerimaan negara dari iuran tetap dan iuran produksi/royalti PTFI selama Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 Sebesar USD445.967.326,90;
2. Kelebihan pembebanan biaya *concentrate handling* pada PTFI Tahun 2013 s.d 2015 Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Royalti Sebesar USD 181.459.93;
3. Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan yang dilakukan PT Kuala Pelabuhan Indonesia pada PTFI tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
4. Pengawasan dan Pengendalian Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pemasaran produk hasil tambang PTFI masih lemah;
5. Terdapat potensi peningkatan nilai tambah mineral minimal sebesar USD135,904,449.35 yang tertunda akibat belum terlaksananya pembangunan fasilitas pemurnian PTFI;
6. Penciptaan Luas dan Status Blok B pada Wilayah Kontrak Karya PTFI Belum Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku;

7. PTFI menggunakan kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasionalnya seluas minimal 4.535,93 Ha tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dan hal ini bertentangan dengan UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 Jo UU No. 19 Tahun 2004;
8. PTFI melaksanakan kegiatan operasional pertambangan DMLZ (*Deep Mill Level Zone*) serta memperpanjang tanggul barat dan timur tanpa izin lingkungan;
9. PTFI telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan (*tailing*) di sungai, hutan, estuary, dan telah mencapai kawasan laut;
10. Terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi PTFI sebesar USD1,434,994.33 yang seharusnya masih ditempatkan pada Pemerintah Indonesia;
11. Pengawasan Kementerian ESDM dan Kementerian LHK atas pengelolaan lingkungan PTFI belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku;
12. PTFI belum menyerahkan kewajiban penempatan jaminan pascatambang kepada Pemerintah Indonesia Untuk Periode 2016 Sebesar USD 22,286,839.11 dari total kewajiban periode 2016-2019 Sebesar USD353,759,351.00;
13. Perizinan serta implementasi pengelolaan limbah tailing PTFI tidak memadai.

Sayang, temuan itu tak pernah ditindaklanjuti.[]

emje



Freeport, Bukti Cengkeraman Imperialisme

"Inilah yang membuat kita tersandera oleh kejahatan masa lalu. Dokumen itu menyebutkan perpanjangan setiap 10 tahun, dan tidak bisa ditolak selama Freeport mau."

Kontrak Karya Freeport akan habis tahun 2021. Logikanya, begitu masa kontrak itu habis, negara Indonesia bisa mengambil secara otomatis. Namun apa yang terjadi? Justru Freeport mendapat perpanjangan kontrak lagi hingga tahun 2041.

Kalau dulu di akhir rezim Soeharto, Freeport mendapat perpanjangan hingga 2021, kini di rezim Jokowi, perusahaan Amerika Serikat ini kembali merasakan hal yang serupa. Bahkan, demi menjalankan usahanya 20 tahun ke depan, pemerintah Indonesia dengan rela hati menyuntik modal lebih dari Rp 55 triliun.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD dalam *Indonesia Lawyers Club* (ILC), saat ramai perbincangan tentang rencana divestasi Freeport pertengahan tahun lalu mengungkapkan, Indonesia tersandera oleh Freeport. Sebab, Freeport memiliki dokumen hukum yang diberikan secara resmi oleh negara untuk mengelola tambang di wilayah tersebut.

"Inilah yang membuat kita tersandera oleh kejahatan masa lalu. Dokumen itu menyebutkan perpanjangan setiap 10 tahun, dan tidak bisa ditolak selama Freeport mau," ungkap Mahfud.

Lagi-lagi nama Menteri Pertambangan dan Energi saat itu Ginandjar Kartasasmita disebut. "Dokumen UU yang ditandatangani dan disetujui oleh DPR bersama Pak Ginandjar. Dokumen UU itu tidak bisa dicabut karena sudah terikat sebelumnya. Di kontrak MOU itu disebutkan,

meskipun UU dica-but, tapi tidak berlaku bagi Freeport. Itu Pak Ginandjar yang buat. Misalnya, Anda sudah beli terus hak pembelian berlaku ke yang lain. Karena, itu berdasar UU yang sah," jelas Mahfud saat itu.

Freeport sebenarnya telah lama mengincar Ginandjar semenjak dia menjabat Kepala BKPM (1985-1988). Melalui tangan raksasa itulah yang menempatkan Ginandjar untuk meraih jabatan yang lebih tinggi, yaitu menjadi Mentamben.

Ya, setahun setelah Ginandjar Kartasasmita diangkat menjadi Mentamben oleh Presiden Soeharto, Freeport Indonesia langsung mengajukan perpanjangan kontrak mereka pada tahun 1989. Freeport Indonesia lalu meminta dalam perpanjangan kontrak tersebut untuk memasukkan situs Grasberg sebagai lokasi pertambangan mereka.

Namun Mahfud tidak mengatakan bahwa kejahatan jabatan di masa lalu yang menyandera Indonesia merupakan kejahatan pidana. Sebab masalahnya terletak pada landasan hukum yang menyandera. Itu bentuk proses pembuatan hukum yang koruptif dan koluptif.

Ia menyinggung soal pembuatan UU, tidak ada makan siang gratis. Menurutnya, elite Indonesia yang tak punya karakter, gampang dibeli dengan murah. Sehingga mereka dengan gampang mengobrol kekayaan negara untuk dikuasai asing, tentunya dengan imbalan yang sangat murah.

Banyak UU yang kemudian diatur lebih lanjut dengan per-

aturan-peraturan di bawahnya dan mengacu pada pasal-pasal selanjutnya. Jual beli pasal terjadi bisa disebabkan si pembuat undang-undang minim pengalaman, kurang profesional, dan moralnya bobrok.

"Dalam pembuatan UU di zaman Orde Baru, jual beli pasal kerap terjadi. Satu perusahaan beli satu dim (satu orang) harganya Rp50 juta. Sementara jumlah anggota Pansus 50 orang. Padahal UU bisa sampai 200 dim," tegasnya.

Begitu pula pasca reformasi, sejak UUD 1945 diamandemen

pada tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002—sama sekali tanpa referendum. UUD baru ini kemudian menjadi jalan atas lahirnya sekitar 15 undang-undang baru yang justru pro asing bahkan antinasionalisme. Inilah imperialisme gaya baru.

Hasil penelitian dari *Global Future Institute*, ternyata bukan dalam soal amandemen keempat UUD 1945 saja, sektor politik-hukum Indonesia juga kebobolan. Pada tiga sektor strategis nasional yaitu Migas, Kelistrikan, dan Sumberdaya Air, Indonesia juga kebobolan. UU No 22 Tahun 2001 ten-

tang Migas misalnya. Penyusunannya dibantu oleh *United States Agency for International Development* (USAID) dan Bank Dunia, dengan bantuan anggaran sebesar US\$ 40 Juta.

Dalam kasus Freeport Indonesia, Indonesia sudah disandera oleh landasan hukum yang dibuat para pendahulu dan tidak bisa diganggu gugat. Penyebabnya, elite Indonesia yang mau menjadi antek asing.

Melepaskan Diri

Dibutuhkan sebuah kekuatan besar dan keberanian sebuah negara untuk bisa mengembalikan miliknya sendiri yang telah lama dicaplok asing. Apa yang terjadi di Amerika Selatan yakni Venezeula dan Bolivia menjadi catatan kecil hal tersebut. Korporasi multinasional terpaksa harus melakukan negosiasi ulang dengan negara tersebut untuk bisa beroperasi di negara itu.

Memang itu tidak mudah. Sebab, di balik perusahaan itu ada negara-negara besar imperialis. Namun dengan dukungan seluruh rakyat, hal itu bukan suatu yang mustahil. Apatah lagi, jelas-jelas yang ingin dikembalikan oleh rakyat itu adalah miliknya sendiri.

Persoalannya, bagaimana agar menjadi negara besar dan disegani. Mau tidak mau harus melepaskan diri dari kungkungan sistem yang berasal dari para imperialis itu sendiri. Tanpa berani melepaskan itu, negeri ini akan tetap menjadi bebek karena sistemnya telah disusupi kepentingan asing.

Makanya, perubahan menyeluruh menjadi hal yang penting. Tentu bukan sembarang perubahan. Tapi perubahan yang dilandasi oleh ideologi yang benar yakni ideologi Islam. Hanya dengan Islam, negeri ini akan kembali besar dan mulia serta mendapatkan berkah dari Allah SWT. **emje**

Mengembalikan Milik Umat

Bahan tambang dalam jumlah melimpah, dalam pandangan Islam, adalah milik rakyat dan tidak boleh, alias haram, diserahkan kepada asing atau pun swasta. Maka apa yang dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia selama puluhan tahun adalah tindakan yang menyalahi aturan Islam.

Keberadaan negara dalam pandangan Islam hanyalah mewakili rakyat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasinya, tetapi semua hasilnya tetaplah milik umum seluruh rakyat.

Berdasarkan hal itu, pemberian hak konsesi oleh negara kepada PTFI itu tidak sah secara hukum *syara'*. Itu artinya penguasaan PTFI atas tambang itu juga tidak sah dan hukumnya haram.

Maka dalam pandangan Islam, tambang yang dikelola PTFI harus dikembalikan menjadi milik umum seluruh rakyat, 100 persen. Pengelolaannya harus secara langsung dilakukan oleh negara. jadi, tambang Freeport harus ditarik kembali.

Dalam hal itu bisa diberlakukan sabda Rasul SAW, "Siapa saja yang menanam di tanah satu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak berhak sedikitpun atas tanaman itu dan untuknya (dikembalikan kepadanya) biayanya." (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, al-Baihaqi).

Berdasarkan hadits itu, ketika tambang itu ditarik dan dikembalikan sebagai milik umum, maka semua biaya yang dikeluarkan pihak yang mengelola tambang itu (dalam hal ini PTFI) termasuk aset-asetnya diestimasi nilainya dan dikembalikan kepada korporasi itu.

Bisa saja diperhitungkan apa yang selama ini telah diambil. Juga diperhitungkan nilai semua dampak yang masih akan terus terjadi setelahnya, misalnya dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap masyarakat dan ekosistem.

Selanjutnya, pengelolaan tambang itu dilakukan oleh negara mewakili rakyat. Semua hasilnya dikembalikan kepada rakyat. **ya**

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS

KPK Harus Selidiki Kasus Divestasi Saham Freeport

Bukannya memberi sanksi atas berbagai pelanggaran hukum serta perusakan lingkungan, pemerintah malah memperpanjang kontrak Freeport serta membeli sahamnya dengan harga yang terlalu mahal. Tak tampak sama sekali adanya upaya untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan negara. Di seputar itulah wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo berbincang dengan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Berikut petikannya.



Bagaimana tanggapan Anda dengan klaim pemerintah yang telah membeli 51 persen saham Freeport Indonesia?

Saya menganggap itu merupakan kebijakan yang merugikan negara dan juga merendahkan kedaulatan negara karena yang kita beli itu harganya terlalu mahal.

Sementara kalau kita konsisten bersikap mengikuti aturan yang ada dalam kontrak karya dan undang-undang maka sebetulnya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi, USD3,85 miliar untuk 42 persen saham itu terlalu mahal.

Terlalu mahal? Yang wajarnya berapa?

Harga itu semestinya memperhitungkan usia tambang sampai tahun 2021. Sementara pemerintah setuju dengan perhitungan yang menganggap kontrak itu sampai 2041. Itulah yang membuat harganya lebih mahal.

Kalau kita perhitungkan sampai 2021 dan kontraknya tidak diperpanjang, bukan berarti kita bisa mendapatkan barang itu cuma-cuma. Tidak seperti itu. Dan saya juga tidak mengatakan seperti itu.

Mengapa?

Karena menurut Pasal 22 Kontrak Karya, kalau kontrak berakhir, kita mempunyai kesempatan pertama untuk membeli. Kitalah yang mempunyai hak pertama untuk membeli aset Freeport. Membelinya seperti apa? Di Pasal 22 itu disebutkan harganya itu harga pasar atau sekitar nilai buku.

Tapi kata pemerintah kalau

tidak diperpanjang, kita bisa digugat ke arbitrase...

Sedangkan di Pasal 31 disebutkan tentang kemungkinan bagi Indonesia untuk tidak memperpanjang kontrak dengan alasan yang masuk akal dan bisa diterima. Sementara kita punya sekian banyak alasan yang wajar, untuk tidak memperpanjang. Misalnya, Freeport sudah tidak mengikuti aturan tentang divestasi, tidak membangun smelter, merusak lingkungan, kemudian kita juga bisa menggunakan aspirasi masyarakat yang menginginkan supaya tambang itu dikelola negara.

Jadi kalau kita bilang tidak mau memperpanjang dan ini tercantum di dalam kontrak karya, sebetulnya kita tidak perlu khawatir digugat di arbitrase.

Jadi divestasi ini harus dibatalkan ya?

Iya, itu yang pertama. Yang kedua, soal lingkungan. Freeport sudah merusak lingkungan dan sudah dihitung nilai rusaknya berapa sehingga keluarlah sanksi bahwa Freeport harus membayar Rp183 triliun oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Tetapi ini seolah-olah tidak diperhitungkan sama sekali oleh pemerintah.

Lalu negara apa ini? Kita kan negara berdaulat, punya Undang-Undang tentang Lingkungan, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Minerba. Nah, semua itu berdasarkan laporan BPK, ada dua hal penting. *Pertama*, pelanggaran undang-undang. *Kedua*, ada potensi kerugian negara akibat kerusakan lingkungan.

Lembaga yang menjadi objek audit BPK, wajib

menindaklanjuti temuan itu. Tetapi mengapa kewajiban itu tidak dilakukan oleh pemerintah? Itulah yang menjadi alasan kedua saya untuk mengatakan kita harus membatalkan divestasi ini.

Alasan ketiga?

Kita bisa mengatakan sebagai pemegang saham mayoritas. Tapi faktanya yang mengendalikan tetap saja Freeport. Untuk apa itu? Sementara secara umum menurut kaidah-kaidah bisnis ya, siapa yang memegang saham mayoritas maka dialah yang akan menjadi pengendali. Kenapa kita di sini masih tunduk membiarkan perusahaan itu dikendalikan oleh Freeport?

Indikasinya apa tetap dikendalikan Freeport?

Siapa yang jadi dirut? Siapa yang jadi komut? Itu kan dari mereka semua. Kita jadi pelengkap saja, meskipun saham kita mayoritas. Kan jadi lucu.

Apakah posisi lemah tersebut lantaran target oknum pemerintah memang sekadar memburu rente?

Bisa saja, hanya kita tidak punya alat bukti untuk menuduh begitu ya. Tapi menurut saya kalau pemerintah memang serius untuk membela kepentingan negara, menjaga kedaulatan negara, maka semestinya pemerintah melakukan negosiasi dan bertahan dengan yang telah diatur dalam kontrak. Misalnya tadi terkait harga dan tidak ada kewajiban untuk memperpanjang kontrak. Kalau mereka serius, mereka bisa dapat harga lebih murah.

Jangan juga takut dengan ancaman arbitrase, tapi ini malah mereka manfaatkan dengan

mengatakan, "harus diperpanjang, kalau enggak nanti kita digugat". Padahal kalau digugat juga kita yakin kita bisa menang, asalkan kita serius.

Kata pemerintah kalau digugat ke arbitrase prosesnya lama...

Sekarang Anda memilih apa? Berdaulat kan? Anda punya aset. Dianggap lebih penting mana? Menegakkan kedaulatan dan menjaga potensi kerugian negara atau ketakutan digugat di arbitrase yang sebetulnya masih di dalam kemungkinan bisa menang atau bisa kalah.

Bagi saya, kemungkinan bisa menang atau bisa kalah itu bukan jadi ukuran. Yang nomor satu jadi ukuran itu adalah kita ini negara berdaulat. Kita harus menegakkan martabat bangsa kita. Jadi seandainya pun kita kalah, sebagai negara yang berdaulat, rakyat juga bangga punya pemerintah yang berani berhadapan dengan perusahaan asing yang semena-mena menguasai aset kita.

Menurut pemerintah, kalau prosesnya lama itu mengakibatkan ketidakpastian operasi, membahayakan kelangsungan tambang...

Itu merupakan kemungkinan kondisi terburuk. Kalau nanti ekonomi Timika terganggu ya kita bantulah lewat APBN.

Kalau pemerintah kalah, ini kata pemerintah lagi, nanti pemerintah wajib mengganti rugi miliaran USD...

Tidak apa-apa, tetapi kita sudah tunjukkan. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk meminimalisir kemungkinan kalah.

Di Amerika Latin juga sudah

terjadi, dihadapi itu gugatan ke arbitrase. Dan mereka menang.

Contohnya?

Venezuela, Bolivia dan Argentina. Kasusnya itu ada kontrak dengan perusahaan asing, lalu ada perubahan konstitusi dan undang-undang, maka kontrak-kontrak tadi diminta menyesuaikan diri dengan undang-undang. Lalu si asingnya menggugat ke arbitrase. Dihadapilah oleh negara-negara itu, dan negara-negara itu menang.

Kata pemerintah lagi, kalau Indonesia menang, tidak dapat gratis, tetap saja harus bayar...

Oh iya... itu kan saya bilang tadi. Kita juga bukan maunya gratis.

Tetapi yang jelas tidak semahal sekarang ya?

Iya, tidak semahal itu.

Apakah bisa disimpulkan berarti "ada kedustaan dan kejahatan sistematis di balik divestasi saham Freeport Indonesia"?

Iya, saya kira begitu.

Bagaimana pemerintah seharusnya untuk menyanggah kesimpulan itu?

Saya mau pemerintah itu terbuka terkait hal-hal yang sudah disepakati dengan Freeport. Semuanya harus dibuka karena dengan sistem IUPK itu semuanya harus terbuka. Tidak boleh itu disembunyi-sembunyikan.

Untuk membuktikan tidak ada KKN, kalau perlu pemerintah juga minta diaudit dan diselidiki oleh KPK. Sebaliknya, KPK pun harus pro aktif.[]

Muhammad Ismail Yusanto,
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia

Milik Rakyat, Harus Dikelola Negara

Tambang milik sendiri tetapi beli ke yang ngontrak, kemahalan lagi. Katanya 51 persen saham dikuasai tetapi tidak berkuasa untuk mengatur/mengelola Freeport Indonesia (FI). Membelinya dengan utang berbunga lagi. Sampai 2020 katanya tidak akan dapat deviden. Waduh, bagaimana bayar utang dan bunganya? Mengapa negara bisa seperti ini? Apa solusi Islamnya? Di seputar itulah wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.



Pemerintah mengklaim telah menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia?

Andai klaim itu benar, aneh banget. Ini seperti orang berseru gembira bisa ambil alih hak sewa sebuah rumah, padahal rumah itu milik dia sendiri dan sebentar lagi bakal habis masa kontraknya. Kenapa tidak ditunggu saja sampai masa kontrak habis. Itu rumah otomatis akan balik ke sang pemilik to?

Keanehan makin besar bila klaim itu ternyata dusta. Klaim bahwa kita telah menguasai 51 persen harus dipertanyakan secara sangat serius.

Mengapa?

Karena sesungguhnya yang diambil alih oleh pemerintah adalah PI (*participating interest*) Rio Tinto. Terkait dengan hal ini, menarik penjelasan Achmad Takari Pribadi, mantan karyawan PT Freeport dengan jabatan terakhir *Capital & Joint Venture Accounting*. Pada intinya ia menjelaskan, bahwa *participating interest* (PI) Rio Tinto bukanlah saham (*share*). PI itu hanya terkait hak penerimaan dana. Bukan hak suara, misalnya dalam rapat pemegang saham, dalam menetapkan direksi atau kebijakan strategis perusahaan.

Harganya juga kemahalan ya?

Harga yang harus dibayar pemerintah senilai USD 3,8 Milyar untuk mengambil PI Rio Tinto yang dulu didapat dengan USD 400 juta, juga amat sangat kemahalan karena nilai jualnya 87,5 kali dari harga awal 20 tahun lalu. Itu ibarat pinjaman dengan suku bunga lebih dari 11,4552172275305 persen per tahun. Suku bunga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan

London interbank offered (Libor) yang diterapkan pada dana talangan PI-nya Freeport, yang bunganya selalu di bawah 8 persen per tahun.

Sudah begitu, menurut Zen M. Fauzie, salah satu karyawan PT Freeport, cadangan tambang di sana itu sesungguhnya sudah habis. Selama 20 tahun Freeport Indonesia (FI) mengandalkan tambang terbuka bernama Grasberg. Menurutnya, tambang Grasberg yang berbentuk sumur raksasa itu, saat ini dalam proses *closing* karena depositnya habis. Ini ibarat kita membeli sumur sendiri dengan kondisi airnya sudah kering.

Ada upaya lain yang dilakukan oleh Freeport, yakni dengan melebarkan sumur yang ada, tapi menurut info yang dia dapat, tidaklah seberapa produksinya dibanding sumur Grasberg ini.

Nah, dengan kondisi tambang yang bakal habis, mengapa rezim memaksa divestasi? Kenapa tidak ditunggu saja sampai habis masa kontrak? Kalaupun di-*clause* Kontrak Karya ada syarat yang harus dipenuhi seperti membayar nilai aset Freeport mulai dari pelabuhan (*Port-site*) sampai ke area penambangan (*Mine-site*) senilai sekitar Rp 60T, itu lebih baik ketimbang membayar sekarang Rp 50T untuk mendapat 51 persen, karena dengan Rp 60T itu, 100 persen Freeport utuh menjadi milik kita.

Uang pembelannya juga merupakan pinjaman asing yang berbunga...

Iya, bodoh banget. Rugi dunia akhirat. Bunga bank adalah riba. Riba itu punya 73 pintu dosa, yang paling ringan seperti

menzina ibunya sendiri.

Inalum juga mengatakan Freeport tidak akan membagi deviden ke Inalum sampai 2020. Artinya apa ini?

Ya, itu artinya sampai 2020 alih-alih kita dapat uang, yang terjadi kita justru harus keluar uang guna membayar bunga, membayar cicilan utang dan untuk menambah biaya investasi. Kalau sampai tahun itu kita tidak dapatkan uang, kenapa harus melakukan divestasi sekarang, kemahalan lagi, tambangnya sudah mau habis lagi? Kenapa tidak kita tunggu saja sekalian hingga 2021 saat kontrak itu habis dan sepenuhnya itu tambang balik ke tangan kita tanpa keluar uang sepeser pun?

Lantas, bagaimana bayar utang dan bunga pembelian saham itu?

Itu dia pertanyaannya. Pasti akan menggerus keuangan perusahaan yang notabene adalah uang negara. Kalau uang itu tidak ada, nanti pasti akan berdampak pada APBN yang biasanya diatasi dengan kenaikan pajak dan pengurangan subsidi atau penambahan utang baru. Walhasil, dengan divestasi itu rakyat bukannya untung tapi malah buntung.

Itu semua menunjukkan negara Indonesia dalam posisi rugi terus. Kok bisa? Apakah karena ada kedustaan dan kejahatan di balik divestasi Freeport?

Pasti.

Indikasinya?

Bagi Freeport, divestasi 51 persen saham itu jelas sangat

menguntungkan ketimbang mereka di tahun 2021 nanti kehilangan tambang itu sama sekali. Bagi rezim sekarang, keputusan itu bakal menjadi jalan untuk mendapat dukungan politik dari negeri Paman Sam, dan juga, banyak orang menduga, kemungkinan ada *kick-back* dari gelontoran dana divestasi yang sangat *over-price* itu guna kepentingan politik rezim jelang pemilu. Maka tepat sekali seruan untuk segera dibentuk Pansus untuk menyelidiki dan membongkar skandal ini. Tapi semua orang tahu, itu tidak mungkin dilakukan di periode parlemen sekarang.

Dalam pandangan Islam, tambang emas di Papua itu milik siapa? Dan siapa yang harus mengelolanya?

Menurut Islam, barang tambang yang jumlah kandungannya sangat melimpah seperti yang saat ini dikelola oleh Freeport adalah milik umum atau milik rakyat (*milkiyah ammah*). Negara harus mengelolanya agar hasilnya nanti digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal, diceritakan suatu saat Abyad meminta kepada Rasulullah SAW untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul mulia yang memang pemurah meluluskan permintaan itu. Tapi segera diingatkan oleh sahabat yang lain. "Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan (bagaikan) air mengalir (*ma'u al-'idda*)" Berkata (perawi), "Beliau menarik kembali tambang tersebut darinya".

Keputusan Rasul, yang di lain kesempatan mengingatkan kita untuk jangan menarik lagi pemberian kepada orang lain, tapi kali itu justru dengan tegas menarik kembali pemberian kepada Abyad, menunjukkan bahwa tidak semestinya barang tambang yang kandungannya sangat banyak itu dikelola oleh individu atau kumpulan individu (perusahaan) karena hasilnya pasti hanya akan dinikmati oleh segelintir orang seperti yang selama ini terjadi di Freeport dan di banyak tempat lain. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum.

Saat ini, *de facto*, asing yang menguasai dan mengelolanya. Sebagai pemilik, kita harus berbuat apa? Sementara pemerintah begitu kondisinya.

Itu semua merupakan dampak dari neoliberalisme dan neoimperialisme yang telah amat kokoh mencengkeram negeri ini yang tampak dari lahirnya peraturan perundang-undangan dan penguasa yang berpihak pada pemilik modal dari dalam maupun luar negeri. Di situlah pentingnya kita berjuang untuk tegaknya sistem Islam guna membebaskan negeri ini dari cengkeraman itu.

Bagaimana agar negara ini dapat melindungi tambang emas yang merupakan milik rakyat ini dan dapat mengelolanya seperti yang telah digariskan oleh syariat Islam?

Tentu saja sistemnya harus berdasar syariah dan penguasanya harus tunduk pada sistem itu.[]



Mereka Bicara

Kedustaan Divestasi Freeport



Muhammad Said Didu, Stafsus MenESDM 2014-2016, Perekayasa di BPPT, Sek KemBUMN 2005-2010, Ketum PII 2009-2012

Awas Penumpang Gelap

Pro-kontra yang sangat keras tentang besaran harga adalah kenapa mahal mencapai Rp56 triliun untuk harga sekitar 42 persen saham, kenapa milik sendiri kok dibeli?

Ini adalah mekanisme korporasi. Seluruh perhitungan harga dan mekanisme pembayaran adalah mekanisme korporasi. Yang salah jika dalam prosesnya ada penumpang gelap.

Saya berharap pimpinan Freeport berani membersihkan benalu di Freeport yang masih ada jika tidak mau berubah dan juga berani melawan model-model seperti papa minta saham dalam investasi Freeport ke depan, termasuk teman papa yang masih *cawe-cawe* dalam rencana pembangunan smelter dan lain-lain.[]



Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik

Siap-siap Gigit Jari

Sampai kapan cerita 51 persen ini akan bertahan? Tampaknya tidak akan berlangsung lama. Menurut berita yang dimuat *Reuters* (21/12/2018), Kepala Eksekutif Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan bahwa izin baru yang diberikan pemerintah Indonesia itu akan memberikan kejelasan perusahaan atas operasi di Indonesia hingga tahun 2041.

Dikatakan bahwa menurut ketentuan perjanjian baru yang disepakati dengan Indonesia, Freeport akan membangun smelter tembaga di Indonesia dalam waktu lima tahun, dan akan menginvestasikan sekitar USD14 miliar di tambang.

Coba analisis pernyataan itu pakai akal sehat. Tolong garis bawahi bahwa Freeport akan menginvestasikan USD14 miliar tersebut.

Pertama, berarti kepemilikan Indonesia tidak akan jatuh karena Indonesia hanya memiliki 3,8 miliar dolar. Jika 3,8 miliar dolar itu 51 persen, maka 100-nya adalah 7,6 miliar dolar. Jika Freeport menambah 14 miliar dolar 100 persen saham FI senilai 21,6 miliar dolar. Dengan demikian maka saham Inalum senilai 3,8 miliar dolar hanya sebesar 17,6 persen.

Kedua, untuk tetap bertahan pada angka 51 persen maka Inalum harus menambah investasi lagi senilai 7,2 miliar dolar lagi sehingga secara akumulatif nilai saham Inalum senilai 11,2 miliar dolar. Darimana uang Rp 104 triliun itu?

Kalau cerita itu terjadi, dan tampaknya akan terjadi, maka 51 persen hanya tinggal cerita dongeng, atau mimpi di siang bolong. Siap-siap Inalum gigit jari, cerita lama terulang kembali.[]



Enny Sri Hartati, Peneliti INDEF

Kok Bukan Pengendali?

Ini jelas ini bukan aksi korporasi biasa, karena ini adalah sektor yang sangat strategis dan ini melibatkan negara, jadi bagaimana mungkin ini disebut biasa.

Lalu, ketika pemerintah membuat satu kebijakan

apapun itu, pertimbangannya bukan finansial tapi ekonomi. Kalau finansial, hitungannya untung atau rugi tapi kalau pemerintah divestasi apapun secara ekonomi itu menguntungkan negara tidak? Dan ekonomi itu banyak, bukan hanya untung rugi, tapi penciptaan lapangan kerja, dan sebagainya untuk kesejahteraan.

Selanjutnya, yang selama ini tidak terekspos adalah hitung-hitungan yang terkait dengan ekonomi. Tapi sebelum melihat ke sana pun, kalau dihitung secara korporasi yang namanya orang membeli saham biar ada kepemilikan itu, fungsinya menjadi pemegang saham pengendali. Artinya kebijakan koperasi itu ada di tangan si pemegang saham pengendali, kalau tidak ya buat apa?

Persoalannya siapa pemegang pengelolaan Freeport ke depan? *Kan* tetap McMoran, bukan Inalum, karena Inalum itu hanya beli *participating*-nya Rio Tinto, yang bukan keseluruhan. Artinya kalau itu dikonversi menjadi milik pemerintah ya berarti konversinya sebesar haknya Rio Tinto di Freeport.

Intinya begini, yang namanya pemerintah atau korporasi saat ada investasi berpikirnya harus *oportunitis cost*. Sekarang bayangkan ketika Indonesia memegang 51 persen itu kalau untung kalau tidak untung? Ya tidak dapat.

Yang menjadi hak pemilik Freeport yang didivestasikan itu adalah yang sudah diperlihatkan eksplorasi, dan sebenarnya yang untung itu adalah tambang yang belum dieksplorasi. Nah yang belum ini, belum pernah dijual ke Rio Tinto.

Artinya keuntungan kita memiliki saham 51 persen itu sebanding tidak? Minimal dengan pembayaran nanti bunga, kita harus bayar 6 persen bunga, itu *nutup* tidak? Lalu ketika kita punya uang 3,8 triliun itu lebih menguntungkan dipakai untuk pembangunan Inalum, atau diinvestasikan Freeport lebih untung yang mana? Hitungan kami lebih untung di tambaga/ Inalum.

Jadi sekarang ini tidak masuk akal.[]



Faisal Basri, Pengamat Ekonomi

Yang Gerayangin Bisa Lebih Banyak

Pemerintah kerap mengaitkan kepemilikan mayoritas saham Freeport dengan kedaulatan Indonesia.

Sebab, pembelian saham Freeport sama saja membeli tambang milik sendiri. Saya sedihnya *gitu*, barang punya kita terus kita beli, terus kita belinya pakai *ngutang*, yang milik sendiri. *Eggak* mengerti saya.

Dan ini menyedihkan, sebab area tambang yang dikelola Freeport sejak awal adalah milik Indonesia dan tidak pernah menjadi kepunyaan asing. Tak ada yang lebih konyol ketimbang membeli milik sendiri. Sedangkan ini Freeport *kan* punya Indonesia, nih, dibeli. *Kan* goblok.

Bagi saya pembelian ini sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan itu atau kedaulatan. Katanya gara-gara 51 persen Indonesia berdaulat. Kedaulatan itu bukan ditentukan persentase. Indonesia tetap berdaulat terhadap Freeport. Karena apa? Aturan-aturan terkait kita buat, royalti berapa, pajak berapa, itu kedaulatan.

Apalagi, utang yang dipakai untuk membiayai transaksi tersebut banyak dari penerbitan obligasi global (*global bond*) dengan nilai yang sangat besar.

Sedangkan risiko utang dalam bentuk *global bond* lebih besar ketimbang pinjaman multilateral/bilateral.

Soalnya utang lewat multilateral/bilateral bunganya lebih kecil. Pembayaran pun bisa direstrukturisasi jika ada potensi gagal bayar.

Kalau pinjam di *global bond*, maka itu pinjam ke pasar. Pinjam ke pasar itu tidak ada negosiasi macam-macam. Kalau asing itu punya sentimen negatif terhadap Indonesia, dia jual besoknya. Harganya ancur. Mampus kita.

Freeport dikuasai BUMN Indonesia maka akan lebih banyak kepentingan yang menguasai tambang tersebut. Di tangan Freeport aja yang gerayangin sudah banyak apalagi di tangan BUMN. Wah ngeri.[]



Arim Nasim, Pengamat Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia

Pengkhianatan Rezim

Pembelian hak partisipasi itu *kan* dibiayai dari utang atau obligasi internasional. Jadi pemilik sebenarnya berarti mereka yang memberikan utang atau obligasi itu. Dan bisa jadi di belakangnya dimiliki oleh Freeport McMoran juga.

Yang lebih penting menurut saya, tambang Freeport bisa sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah kalau 100 persen dikelola oleh pemerintah sebagai wakil dari rakyat. Karena itu, kita tidak boleh disesatkan oleh divestasi saham ini. Pemerintah harus menguasai seluruh tambang 100 persen. Walaupun pemerintah memiliki 75 persen saham misalnya, tetap saja pemerintah tidak berkuasa penuh karena masih ada sumber daya alam yang dirampok hasilnya oleh asing.

Perlu dicermati kemungkinan adanya para pemburu rente. Baunya tercium. Ini bisa dilihat dari harga saham yang sangat mahal. Kemudian ada perpanjangan kontrak 20 tahun. Dan paling konyol, Freeport tak memberikan deviden dalam 2 tahun ke depan. Menurut saya ini bukan hanya perburuan rente tapi kebodohan dan pengkhianatan rezim ini terhadap rakyat.[]



Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR

Ini Namanya Goblok!

Saya beranggapan, pengambilalihan Freeport tersebut bakal membebani negara. Karena akuisisi divestasi saham sebesar 51 persen, pemerintah Indonesia justru melunasinya dengan cara berutang.

Padahal jika pemerintah mau menunggu tiga tahun, tidak perlu membayar apapun kepada perusahaan yang selama ini menunggangi Freeport, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) di bawah induk Freeport McMoran Inc (FCX).

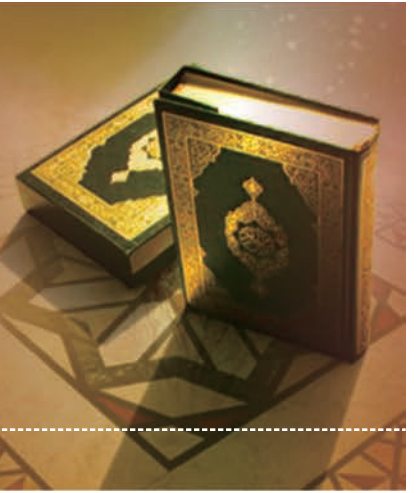
Sekali lagi 2021 Freeport selesai izinnya dan tidak perlu ada negosiasi. Kalau mau negosiasi ulang minta 50 persen gratis. Sekarang, setelah kita bayar pakai utang, Freeport berlanjut 20 tahun lagi. Betul kata ekonom itu, namanya goblok!

Pelajaran berharga dari dua kasus tambang Newmont dan Freeport adalah orang *gak* punya uang, *maksa* ingin tampak jadi jagoan ujungnya jadi *ngutang* dan ditipu masuk lubang. Harusnya masuk bui lalu cari cantolan ke sana ke mari.[] **fatih-ghifari**



Hujjah Adanya Hari Kebangkitan

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI



Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan) sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (TQS al-Ahqaf [46]: 33).

Pada awal surat diterangkan berbagai bukti yang menunjukkan eksistensi Allah SWT, mementahkan pernyataan penyembah berhala, pembuktian kenabian, membantah orang-orang musyrik terkait dengan berbagai aqidah batil mereka, menyanggah keraguan mereka, dan mengecam sikap mere-

buh itu bisa dihidupkan kembali di Hari Kemudian."

Huruf hamzah di awal ayat ini berguna merupakan *isythâm* (kalimat tanya). Menurut al-Syaukani, itu berguna *li al-inkâr* (untuk menyatakan pengingkaran). Sedangkan kata *al-ru'yah* (penglihatan) di sini menunjuk kepada penglihatan hati. Artinya, *al-'ilm* (pengetahuan). Sehingga, seba-

mashtar dari kata *ya'yâ* bermakna 'ajaza (lemah, tidak mampu). Makna ini pula yang dipahami dari ayat ini. Menjelaskan ayat ini, al-Syaukani berkata, "Tidak terhalang dan tidak lemah dalam hal itu." Al-Jazairi juga memaknainya, "Allah SWT tidak merasa lelah dan letih dalam menciptakan langit dan bumi."

Dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir bahwa Dia tidak susah payah dalam menciptakan semua itu. Bahkan tinggal berfirman kepada perkara atau benda yang diinginkan: "Jadilah kamu!" Maka, jadilah yang difirmankan-Nya itu. Tanpa dapat dicegah atau ditolak, dan patuh memenuhi perintah-Nya dengan rasa takut. Menurut Ibnu Katsir, ini semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh

mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Yakni satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan dan satu kejahatan dibalas dengan semisalnya."

Kemudian Allah SWT berfirman: *Balâ* (ya). Ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang disebutkan sebelumnya. Kata *balâ* merupakan jawaban bagi kalimat negatif untuk membatalkannya dan meneguhkan kebalikannya. Ini berbeda dengan kata *na'am* (ya) yang meneguhkan apa yang disebutkan sebelumnya.

Dalam ayat ini disampaikan pertanyaan yang mengandung makna negatif yang ditandai dengan kata *lam* (tidak). Ketika dijawab dengan kata *balâ*, membatalkan tentang tiadanya pengetahuan mereka tentang kekuasaan dalam menghidupkan orang-orang yang mati.

Kemudian dilanjutkan: *Inna-hu 'alâ kulli syay' Qadîr* ([bahkan] sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu). Bahwa Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk kembalinya ruh dan jasad sebagaimana sedia kala. Maka, batallah klaim orang-orang yang mengingkari Hari Kebangkitan.

Menjelaskan ayat ini, Abdurrahman al-Sa'di berkata, "Ini adalah hujjah dari Allah SWT yang membuktikan Dia berkuasa untuk mengembalikan manusia setelah kematian itu dengan lebih mengena. Bahwa Dia adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan segala kebesaran, kesempurnaan, dan kekuatannya tanpa merasa letih sedikit pun, lalu bagaimana mungkin Dia tidak mampu menghidupkan lagi setelah mati?"

Wahbah al-Zuhaili juga berkata, "Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT dalam menghidupkan kembali. Sebab, Dia telah menciptakan langit dan bumi, dan tidak diragukan lagi bahwa penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada menghidupkan kembali seseorang setelah dia mati. Barangsiapa yang mampu melakukan yang lebih besar dan lebih sempurna, niscaya dia pun mampu melakukan yang lebih kecil dan lebih sederhana."

Argumentasi serupa dengan ayat ini juga disebutkan dalam beberapa ayat lain, seperti firman-Nya: *Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu*

IKHTISAR:

1. Tiadanya alasan bagi orang-orang yang mengingkari Hari Kebangkitan.
2. Hujjah tentang kebenaran Hari Kiamat didasarkan kepada kekuasaan Allah SWT. Bagi-Nya, tidak ada yang sulit. Jangankan menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, langit dan bumi pun Dia ciptakan.

saja (tanpa pertanggungjawaban)? (36); Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim) 37; Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya (38); Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan (39); Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?(40) (TQS al-Qiyamah [75]: 36-40).

Dalam ayat lain juga ditegaskan bahwa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati itu amat mudah bagi Allah SWT. Dia berfirman: *Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: "Memang, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (TQS al-Taghabun [64]: 7).*

Juga firman-Nya: *Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikannya (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya-lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (TQS al-Rum [30]: 27).*

Demikianlah. Ayat ini memberikan bantahan telak terhadap orang-orang yang mengingkari terjadinya kebangkitan dan menganggap mustahil peristiwa itu. Argumentasinya sangat sederhana. Mereka ditunjukkan tentang betapa besarnya langit dan bumi yang jauh melebihi dirinya. Semua itu diciptakan Allah SWT. Tatkala Dia berkuasa untuk menciptakan semua itu, maka menghidupkan kembali manusia sesudah kematiannya jauh lebih mudah bagi-Nya. *Wal-lâh al-'alim al-shawâb.*

ka yang tidak mau beriman padahal jin mengimani Alquran.

Setelah semua itu diterangkan, dalam bagian akhir surat ini kemudian dipaparkan hujjah kepastian Hari Kebangkitan.

Bukti Kekuasaan Allah SWT

Allah SWT berfirman: *Awalam yaraw* (dan apakah mereka tidak memperhatikan). Diterangkan al-Jazairi, konteks ayat ini masih membicarakan tentang seruan petunjuk kepada Quraisy yang mengingkari tauhid dan mendustakan kebangkitan dan kenabian. Oleh karena itu, seruan ayat ini ditujukan kepada mereka. Juga kepada orang-orang yang memiliki sikap yang sama, terutama mereka yang mengingkari tentang dihidupkannya kembali manusia setelah kematiannya.

Ibnu Katsir berkata, "Mereka adalah orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan dan menganggap mustahil tubuh-tu-

gaimana dikemukakan al-Zuhaili, frasa ini bermakna: *Awala, ya'lamû* (apakah mereka tidak mengetahui?).

Kemudian disebutkan: *An-naL-lâh al-ladzî khalaqa al-samâ-wâti wa al-ardh* (bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi). Objek yang diperhatikan adalah kekuasaan Allah SWT dalam penciptaan langit dan bumi. Bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi itu. Siapa pun yang memandang keduanya, maka akan dapat mengetahui dan merasakan betapa besar ciptaan-Nya. Bumi saja sudah demikian besar. Apalagi dibandingkan dengan langit beserta semua bintang dan planet-planet yang beredar di sana. Realitas menunjukkan secara pasti tentang kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.

Lalu dilanjutkan: *Walam ya'ya bi khalqihinna* (dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya). Kata *al-'iyy* (bentuk

firman Allah SWT dalam ayat lain: *Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (TQS al-Mu'min [40]: 57).*

Kemudian disebutkan: *Bi qâdir[in] 'alâ an yuhyiya al-mawtâ* (kuasa menghidupkan orang-orang mati?). Ketika Allah SWT berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi dengan mudah, tanpa merasa lelah dan letih, maka Dia pun berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Al-Jazairi berkata, "Bahwa Dia berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati dan mengeluarkan mereka di kubur untuk dikumpulkan."

Tak hanya menghidupkan kembali sesudah mati, namun juga memberikan balasan atas semua amal yang mereka kerjakan selama di dunia. Al-Jazairi berkata, "Untuk mengembalikan mereka kepada-Nya, menghisab mereka, dan memberikan balasan kepada



Rezim Ketakutan, Gus Nur Dihadang

Chandra menduga pencekalannya Gus Nur ke luar negeri bukan hanya perkara hukum, melainkan politik.



Lagi, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur mendapat perlakuan tak semestinya. Paspornya ditarik oleh pihak Imigrasi atas surat Kapolri. Akibatnya Gus Nur tak dapat memenuhi undangan dakwah di luar negeri.

Padahal Gus Nur berencana mengadakan safari dakwah di Australia yaitu di Sidney, Perth, Melbourne, dan Brisbane. Acara itu dijadwalkan dari 27 Januari sampai 27 Februari 2019.

Tiba-tiba pada Selasa, 8 Januari 2019, Gus Nur mendapat informasi berupa kiriman foto surat yang berasal dari Direktorat

Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tentang penarikan sementara paspor RI atas nama Sugi Nur Raharja.

Kuasa Hukum Gus Nur, Chandra Purnava menyatakan protes keras atas tindakan penarikan sementara paspor kliennya itu. "Saya protes keras sekaligus menyangkal tindakan Kepala Kepolisian RI," ujarnya kepada *Media Umat*, Ahad (13/1), di Jakarta.

Menurutnya, tindakan Kapolri yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP/1956/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, sehingga Ditjen Imigrasi Kemenkum-

ham RI melakukan penarikan paspor sementara a/n Sugi Nur Raharja pada tanggal 18 Desember 2018, tidak tepat.

Jika berdasarkan pasal 25 Permenkumham No 8/2014, salah satu syarat penarikan adalah status tersangka. Tetapi proses penarikan paspor sementara bukanlah syarat tindakan yang wajib dilakukan oleh penyidik, sebagaimana proses penahanan tersangka yang tidak wajib dilakukan.

"Karena itu, tindakan penarikan paspor sementara terhadap Gus Nur ini tergolong tindakan berlebihan, *over phobia*, unjuk *power* sebagai aparat penegak

hukum. Ini berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia. Kemudian Gus Nur bukanlah tersangka seperti korupsi atau kejahatan yang terkategori luar biasa, ini hanyalah UU ITE karena dakwahnya," terangnya.

Chandra menduga pencekalannya Gus Nur ke luar negeri bukan hanya perkara hukum, melainkan politik. Karena keberadaan dakwahnya di sana berpotensi menggerus suara rezim dalam lah banyak.

Akibat pencekalannya itu, aktivitas dakwah Gus Nur ke luar negeri yang sudah direncanakan terpaksa dibatalkan. Bahkan dalam waktu tak lama lagi Gus Nur juga berencana melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Terakhir Chandra mengimbau kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk meninjau kembali keputusan penarikan paspor sementara tersebut dan memberikan lampu hijau kepada kliennya untuk melaksanakan tugas dakwah.

"Insyaallah kami akan mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait untuk menghentikan dan mengembalikan seperti sediakala. Jika tidak, jangan salahkan muncul praduga di tengah masyarakat bahwa rezim ini rezim represif dan anti Islam," pungkasnya. **ghifari**

Artis Jadi Pelacur Gaya Hidup dan Hidup Gaya

Ini penyebabnya karena mereka penganut gaya hidup liberalisme-hedonisme. *Pleasure seeker*. Pemburu kesenangan.

Lagi-lagi publik digemparkan oleh pengungkapan pelacuran online yang melibatkan artis-artis Indonesia. Padahal, beberapa waktu sebelumnya, jaringan pelacuran online yang melibatkan para selebritas itu pernah diungkap. Artis tak jera dengan tindakan hina tersebut.

Pengamat politik dan sosial Iwan Januar menilai bahwa prostitusi era milenial sudah bergeser dari prostitusi zaman dulu. Dulu perempuan juga lelaki menjadi pelacur karena motif kemiskinan, karena tak ada *skill* usaha, terjunlah mereka ke dunia prostitusi.

"Tapi hari ini pelacuran masih karena motif ekonomi tapi lebih dominan ke arah *pleasure* yang menuntut gaya hidup dan hidup gaya," ujarnya Ahad (13/01), di Jakarta.

Iwan menuturkan para pelakunya bukan lagi orang miskin apalagi gembel. Justru mereka kalangan ekonomi mapan. Bahkan punya status sosial yang bagus -- seperti artis. Artinya mereka terjun ke dunia prostitusi karena butuh uang untuk mengongkosi gaya hidup dan hidup gaya mereka.

Ongkos perawatan kecantikan, mulai dari rambut sampai kuku kaki itu kan mahal.

Belum baju, ngopi-ngopi, mobil dan liburan ke luar negeri. Mereka merasa pendapatan mereka yang riil itu tidak cukup, carilah jalan lain, melacur.

"Jadi ini penyebabnya karena mereka penganut gaya hidup liberalisme-hedonisme. *Pleasure seeker*. Pemburu kesenangan. Bahkan kalau pelanggan mereka itu lelaki yang mereka suka, mereka kasih gratisan," jelasnya.

Para pemakai jasa mereka juga setali tiga uang. Sama-sama *pleasure seeker*. Kaum hedonis. Mereka mungkin punya istri cantik, bahkan kawin lagi juga bisa. "Lha untuk bayar pelacur puluhan juta juga bisa," celetuknya.

Tapi mereka tidak mau hubungan seks konvensional seperti dalam pernikahan. Mereka pengen sensasi yang lain, yang bisa mereka umbar pada komunitas mereka. Juga bisa pakai jasa pelacur sekelas *public figure*. Puluhan juta mereka bayar juga.

"Jadi ini persoalan kerusakan budaya dan moral yang akut," ucapnya.

Selain itu, hukum pidana yang berlaku juga percuma dan diskriminatif. Menurutnya, hukum yang ada tidak bisa dipakai menjerat para pelaku zina. Mereka tetap bebas keliaran.

"Diskriminatif itu karena yang disasar



adalah para pelacurnya, perempuan, sementara lelaki pelanggannya jarang tersentuh hukum. Ya wajarlah, namanya juga hukum buatan Belanda yang sekuler. Mana kenal mereka halal-haram," jelasnya.

Sebenarnya pemberitaan macam begitu hanya menguatkan fakta kalau pelacuran papan atas itu ada. Bahwa ada kelompok masyarakat papan atas yang bisa disewa jasanya itu benar. "Ini jadi semacam promosi gratis."

Menurutnya, ini kan bukan kejadian pertama, tapi sudah berulang kali. Bagi pelaku, ini jadi *warning* untuk hati-hati. Bagi yang lain, mereka jadi tahu kalau profesi pelacur itu menjanjikan, akhirnya jadi inspi-

rasi bagi yang belum.

Iwan mengimbau agar pemerintah memberikan efek jera sehingga menyikat habis semua kasus prostitusi online maupun offline. Bila perlu ada sanksi jilid bagi yang belum menikah, dan ada rajam untuk yang sudah menikah.

Akan tetapi hukum ini baru bisa diberlakukan bila masyarakat sudah mengalami perombakan falsafah hidup. Bukan lagi memeluk sekularisme, tapi akidah Islam. "Kalau sudah berakidah Islam mana sudi orang jadi pelacur, dan mana sudi orang pakai jasa pelacur. Yang jelas halal saja yang akan mereka cari, lainnya tidak," pungkasnya. **ghifari**

Yaqut Bahayakan Persatuan

"Seharusnya, Yaqut sebut saja siapa orangnya, gerakan apa dan laporkan ke polisi. Jangan membuat manuver dengan membawa isu yang tidak jelas kepada Presiden."

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut mengklaim mempunyai data yang menyimpulkan bahwa kelompok radikal menginduk kepada salah satu pasangan calon presiden, meski tak tegas Yaqut menyiratkan bahwa banyak fakta kelompok radikal banyak mendukung Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum dan politik Ahmad Khozinuddin mengatakan bahwa apa yang dilakukan GP Ansor seperti maling teriak maling, karena mereka menuduh tanpa melihat para pendukung Jokowi juga, yang notabene para penista agama dengan kasus kepolisian yang belum pernah selesai.

"Mereka yang mendukung Jokowi banyak yang dilaporkan karena menista agama, tapi tidak diproses. Ini fakta, bukan tuduhan. Sementara Yaqut tidak membawa tuduhannya ke proses hukum, tapi membawa ke Presiden yang notabene juga berstatus capres, ini apa maksudnya?" jelasnya kepada *Media Umat*.

Apa yang dituduhkan oleh Yaqut juga bersifat tendensius, provokatif dan cenderung politis. Jika memang ada gerakan radikal, bawa saja ke penegak hukum, sidik, di proses dan diadili, selesai. Bukan dibawa ke Presiden yang statusnya juga capres.

"Ya memang ini pernyataan tendensius yang belum bisa dipersoalkan secara hukum karena tidak menyebutkan secara definitif siapa dan gerakan apa yang dimaksud radikal itu. Tetapi pernyataan ini cenderung memecah belah dan menimbulkan syak wasangka di tengah-tengah umat," ungkap Ahmad.

Ia menambahkan bahwa Yaqut seharusnya menyebut saja siapa yang dituduh, kelompok mana dituduh, agar tidak membuat isu yang bisa memicu persatuan kita.

"Seharusnya, Yaqut sebut saja siapa orangnya, gerakan apa dan laporkan ke polisi. Jangan membuat manuver dengan membawa isu yang tidak jelas kepada Presiden. Pernyataan ini cenderung menuding banyak pihak, dan ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita," ungkapnya.

Sebelumnya Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menyatakan kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia mulai terkonsolidasi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. GP Ansor menyebut telah memetakan wilayah yang menjadi lokasi mereka membangun konsolidasi.

Hal tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1). Pria yang akrab



disapa Gus Yaqut menyebut kelompok radikal ini di antaranya berada di Jawa Barat dan Riau.

"Banyak kita temukan, banyak wilayah kalau mau disebut di luar Jawa banyak, di Jawa Barat ada. Jadi banyak yang kita temukan, di Riau misalnya, terkonsolidir mereka, di Jawa Barat apalagi," kata dia.

Yaqut mengatakan konsolidasi yang mereka lakukan bukan untuk mengacaukan jalannya pemilihan umum 2019. Justru, kata Gus Yaqut mereka membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu pa-

sangan calon presiden dan wakil presiden.

"Mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka," ujarnya.

Saat disinggung pasangan calon yang didukung kelompok ini adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yaqut tak menjawab tegas. Menurutnya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa kelompok ini mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019.

"Saya tidak mau sebut itu, tapi faktanya ada. Saya kira rekan-rekan wartawan tahu," kata dia. **fs**

Mereka sangat terharu dan ingin mengucapkan terima kasih atas serangkaian aksi bela Muslim Uighur yang dilakukan oleh umat Islam di negeri ini.

Muslim Uighur Terima Kasih ke Muslim di Indonesia



Indonesia mendapat kunjungan sejumlah tokoh Muslim Uighur (Turkistan Timur) pekan lalu. Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur di Istanbul, Turki, Seyit Tumturk, menjelaskan kedatangannya ke Indonesia dalam acara 'Kesaksian Muslim Uighur' di AQL Islamic Center, Kamis (12/1) Tebet, Jakarta.

Seyit merupakan diaspora Muslim Uighur yang selama ini tinggal di Turki. Muslim Uighur adalah komunitas minoritas Muslim yang bermukim di Xinjiang, Cina. Belakangan ini pemerintah Cina mendapatkan banyak kritik internasional karena dianggap melakukan pelanggaran HAM ke-

pada etnis tersebut, antara lain dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus.

Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat tanpa proses pengadilan. Di sana mereka menjalani program 'redukasi', atau 'pendidikan ulang'. Sebuah program indoktrinasi kepada masyarakat Uighur yang dianggap ekstremis.

Seyit tidak sendiri. Ia datang bersama Gulbakhar Cililova, ibu berusia 54 tahun, yang pernah menjadi saksi kekejaman serta mengalami siksaan dalam tahanan kamp

konsentrasi rezim komunis Cina selama kurang lebih setahun 4 bulan. Seyit mengungkapkan pentingnya kunjungan pihaknya ke Indonesia karena sangat terharu dan ingin mengucapkan terima kasih atas serangkaian aksi bela Muslim Uighur yang dilakukan oleh umat Islam di negeri ini.

"Kami sangat bersyukur, Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia begitu antusiasnya sebagai sesama saudara Muslim untuk memprotes kezaliman dan penindasan yang kami alami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih," ucapnya dalam bahasa Turki yang diterjemahkan ke Indonesia di hadapan tamu, jurnalis dan jamaah AQL Islamic Center pimpinan Ustadz Bachtiar Nasir.

Selain itu, kedatangan mereka juga untuk menyampaikan amanah dari 35 juta warga Muslim Uighur yang saat ini menyebar di berbagai negara seperti Turki, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Jerman, Prancis, Finlandia, Australia, dan lainnya. Amanah itu berupa bantuan untuk korban tsunami Selat Sunda sebesar USD50.000.

"Saya atas nama 35 juta warga Muslim Uighur menyampaikan bantuan 50 ribu dolar (AS) untuk korban tsunami di Indonesia," ungkap Seyit.

Ketua Majelis Intelktual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bachtiar Nasir

mengatakan, pembelaan Muslim Uighur di Indonesia pasti akan mengkhawatirkan hegemoni Cina di Indonesia.

Bachtiar berpesan untuk mewaspadai bahaya komunisme di Indonesia. Komunis berusaha untuk melucuti ideologi Islam. Dan itu bisa dijaga dengan kebersamaan.

Di tempat yang sama hadir juga Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S Labib. Menurutnya, mereka tidak akan bisa menyelesaikan problem mereka sendiri tanpa bantuan dari umat Islam di luar negaranya sebab sekarang mereka dalam posisi tertindas oleh sebuah negara.

Yang dibutuhkan sekarang adalah tekanan kuat kepada pemerintah Cina agar mereka menghentikan penindasan kepada Muslim Uighur. "Kalau mereka tidak mau menghentikan maka dilakukan dengan cara yang lebih keras misalnya ancaman memutuskan hubungan diplomatik atau bahkan mengembargo produk mereka. Bagaimana pun Cina membutuhkan pasar bagi produknya," jelasnya.

Terakhir, pentingnya atau urgensi khilafah. Dengan khilafah maka seluruh umat Islam bisa disatukan menjadi sebuah kekuatan, "Satu kekuasaan, satu kepemimpinan. Ketika itu terjadi masya Allah luar biasa umat Islam akan menjadi adidaya yang akan bisa mengalahkan mereka," pungkasnya. **ghifari**

Pembangunan LRT Mahal, JK Marah

Faktanya memang banyak proyek yang asal dibuat dilihat dari banyaknya kejadian konstruksi yang rusak sebelum atau sesudah digunakan.



Wakil Presiden Jusuf Kalla marah melihat pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang mahal dan tidak efisien. Menurutnya, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi. Ia heran bagaimana mungkin untuk membangun LRT setiap kilometer menghabiskan dana Rp 500 miliar.

"Jangan asal bangun saja," ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1).

Ia mengaku heran kenapa LRT diba-

ngun melayang dan berada di sisi jalan tol. Padahal, masih banyak lahan lain dan biasanya LRT itu dibangun di tempat yang berbeda dengan jalan tol.

Padaahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.

JK mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek. "Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?" ujar JK.

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan

mengakui, harga itu memang mahal. "Memang itu betul (mahal), tapi memang *elevated* dan *non elevated* beda harganya tinggi, karena di atas biayanya lebih tinggi. Lanjutnya dari Cibubur-Bogor itu semua biayanya di bawah Rp 500 miliar/km," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (14/1). Namun ia tak tahu rinciannya.

Pengamat ekonomi Arim Nasim pun kaget dengan biaya pembangunan LRT itu. Ia menduga adanya permainan di sana. Sebab, beberapa kalangan menyebut harga normal dalam proyek itu adalah 40 sampai 50 miliar.

"Berarti *mark up*-nya antara 1.000 persen sampai 1.200 persen. Ini rezim gila-gilaan. Mereka menuduh Soeharto bapak koruptor, padahal zaman Soeharto kebororan anggaran katanya sekitar 30 persen. Coba apa sebutan yang pantas untuk rezim ini?" ungkapnyanya kepada *Media Umat*.

Menurut Arim ada dua permasalahan mendasar dalam kasus tersebut, yaitu sistem yang bobrok dalam demokrasi dan mental korup para pelaksana pemerintahan atau yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Masalahnya mental rezim ini sudah terbiasa bohong, kedua, rezim ini jadi presiden karena modal dari konglomerat, maka sekarang mereka menuntut modal-

nya kembali," jelasnya.

Arim juga membenarkan kritik Jusuf Kalla mengenai pembangunan yang tidak boleh asal-asalan, faktanya memang banyak proyek yang asal dibuat dilihat dari banyaknya kejadian konstruksi yang rusak sebelum atau sesudah digunakan.

"Kasus di Bandara Soetta dan lain-lain. Menjadi bukti memang pekerjaannya dilaksanakan asal-asalan, apalagi menjelang pemilu, ini dijadikan alat untuk kampanye sehingga proyek dipaksa selesai sebelum waktunya," katanya.

Sementara itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyatakan pembangunan LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sudah melalui proses pertimbangan yang masak oleh perusahaan. Itu salah satunya seperti pertimbangan biaya operasional (*operational cost*).

"Jadi, bahwa pemilihan konstruksi *elevated* atau *underground* harus meninjau kondisi yang ada. Dalam desain pembangunan infrastruktur ada tiga pertimbangan, pertama *at grade* di atas tanah biasa, kedua *elevated* dan ketiga *underground*. Kami sudah lakukan kajian, ini yang paling optimal yang bisa kita berikan," ucap Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta, Senin (14/1). **fs**

Seruan Ulama: Selamatkan Uighur!

Massa menuntut agar pemerintah Cina memberikan kebebasan beribadah kepada Muslim Uighur, di Xianjiang yang saat ini menerima perlakuan kekerasan.

Umat Islam diibaratkan satu tubuh, jika ada bagian tubuh yang sakit maka yang lain akan ikut sakit. Seperti itulah yang dirasakan oleh para ulama di berbagai tempat menyaksikan peniksaan Muslim Uighur di Cina. Tak tinggal diam para ulama pun menyerukan untuk membebaskan Muslim di sana dari penjajahan.

Di Serang, bertempat di kediaman Kesultanan Banten lama diselenggarakan Liqo Ulama Banten dengan tema Refleksi Akhir Tahun 2018, Selasa (25/12). Acara yang dihadiri oleh para ulama serta para santri dari berbagai daerah di Banten ini diselenggarakan oleh Forum Ulama Aswaja (FUA) wilayah Banten.

Rokhmat S Labib, selaku pembicara, memaparkan fakta satu tahun Indonesia tiada hentinya ditimpa berbagai permasalahan dan musibah. Mulai aspek politik, pendidikan, krisis moral, LGBT, korupsi bahkan kriminalisasi ulama dan ajaran Islam terus terjadi menimpa negeri ini.

Lebih lanjut, Rokhmat mengatakan, diskriminasi serta ketidakadilan penguasa terhadap kaum Muslim di luar Indonesia pun terus terjadi, di Uighur salah satunya. Semua fakta ini jelas menunjukkan ketidakmampuan penguasa dalam memimpin ne-

geri ini dan abainya penguasa dalam melakukan pembelaan terhadap penindasan dan ketidakadilan yang dirasakan kaum Muslim di luar sana.

Salah satu pernyataan para ulama yang berkumpul saat itu adalah kaum Muslim Uighur di Xinjiang Cina adalah saudara seiman, maka kesedihannya adalah kesedihan bersama.

"Dengan tegas kami menuntut kepada rezim komunis Cina untuk menghentikan kebiadaban Anda," ungkap Rokhmat.

Di Surabaya, solidaritas umat Islam se-Surabaya pada Jumat (28/12/2018) ramai-ramai mendatangi Konjen Cina.

Berdasarkan pantauan *Media Umat*, peserta datang dari berbagai kota. Hal ini betul-betul menjadikan aksi kali ini memiliki nilai lebih dan ghirah yang sama yaitu ukhuwah.

Ibnu Ali (Forum Umat Islam Bersatu Surabaya) menegaskan bahwa peristiwa di Uighur adalah bentuk kezaliman. Umat Islam dizalimi maka wajib dibela. Hanya saja tidak ada pemimpin yang memerintahkan ke sana.

"Usir konjen RRC sekarang juga. Usir konjen RRC. Usir Konjen RRC sekarang juga. Mari kita baca shalawat asyghil!" serunya kepada peserta.

Seketika shalawat *asyghil* menggema



diikuti kibaran al liwa' dan ar rayah. Ia berharap, dengan shalawat itu segala bentuk kezaliman di mana pun dihilangkan oleh Allah SWT.

Massa menuntut agar pemerintah Cina memberikan kebebasan beribadah kepada Muslim Uighur, di Xianjiang yang saat ini menerima perlakuan kekerasan.

Di Bekasi para ulama menyerukan untuk persatuan umat dan menghilangkan sekat-sekat nasionalisme yang bisa melanggengkan peniksaan umat Islam seperti di Cina.

Majelis Mudzakah Ulama dan Asatidz Kota Bekasi menggelar agenda Multaqa Ulama bertemakan "Peran Ulama Dalam Persatuan dan Kesatuan Umat" yang dilaksanakan, Ahad (6/1), sejak pukul 08.30 WIB hingga menjelang Dzuhur.

Mudzakah ini dihadiri oleh ulama dan kyai. Materi disampaikan oleh Al-Us-tadz Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy (Gus Syam), Pembina Majelis Mudzakah Ulama dan Asatidz Kota Bekasi.

Ia mengemukakan poin-poin penting terkait langkah-langkah praktis persatuan dan kesatuan dalam rangka terwujudnya persatuan hakiki di tengah-tengah umat.

Ia mengatakan, Reuni Akbar 212 sebagai momentum persatuan umat Islam lintas Ormas yang tidak lepas dari peran praktis para ulama dan tokoh dalam menyukseskan agenda akbar tersebut.

Menurutnya, sebuah keharusan agar kaum Muslim bersatu. Inilah urgensi ukhuwah islamiyah yang relasinya tidak terbatas oleh sekat-sekat keormasan ataupun sekat negara kebangsaan (*nation state*).

"Dengan sekat-sekat negara bangsa inilah umat Islam tidak bisa memberikan pertolongan secara riil, berupa bantuan militer terhadap saudara-saudara seiman kita yang dalam kondisi terjajah secara fisik sebagaimana di daerah Uighur dan negeri-negeri Muslim yang mengalami hal perlakuan sama," ungkap Syamsuddin. **fs**

Rapor Merah Jokowi Neraca Perdagangan Terburuk dalam Sejarah

Penyebab utama defisit neraca perdagangan adalah kebijakan pemerintah yang sangat liberal dan kapitalis serta mindset sebagian besar pejabat yang mengurus rakyat dengan paradigma bisnis.

Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sepanjang sejarah. Pada periode Januari-November 2018, defisit perdagangan tercatat sebesar USD 7,51 miliar. Bahkan menurut ekonom senior Faisal Basri, kinerja neraca perdagangan 2018 sebagai yang terburuk sejak Indonesia merdeka.

Defisit neraca perdagangan ini diakui oleh pemerintah walaupun mereka melakukan pembelaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tak seharusnya hal tersebut dibesar-besarkan. Masyarakat juga perlu melihat dari sisi defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) di tahun lalu yang diprediksi masih lebih baik dibandingkan 2014.

Sementara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut defisit perdagangan di 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya impor barang modal. Enggar menilai impor barang modal seperti mesin dan per-

alatan listrik tak perlu dikhawatirkan karena hal tersebut digunakan untuk hal produktif.

"Kita sebenarnya defisit atau meningkatnya impor akibat barang modal. Itu positif, harus disikapi positif jangan hanya melihat ekspor dikurangi impornya saja, tetapi juga dilihat investasi yang kemudian baru dinikmati dalam beberapa tahun ke depan. Ini yang kita sikapi," ungkap Enggar.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, buruknya kinerja neraca perdagangan Indonesia karena beberapa faktor. *Pertama*, impor BBM naik signifikan karena harga minyak dunia sempat menyentuh level tertingginya di USD 70-80 per barel dari bulan April hingga pertengahan November 2018. Harga tersebut dinilai tertinggi sejak harga minyak dunia mulai terpukul pada tahun 2014. Harga minyak dunia seperti Brent di 2018 mulai turun hingga berada di kisaran USD 50-55 per barel. Impor migas tercatat



naik 28,87 persen *year-on-year* (yoy).

"Seiring harga minyak tahun 2018 sempat sentuh USD 75 per barel tertinggi sejak 2014. Defisit migas juga disebabkan produksi minyak dalam negeri selalu meleset dari target lifting," kata Bhima.

Kedua, pemerintah dan BUMN juga berkontribusi besar atas naiknya laju impor bahan baku dan barang modal pada proyek infrastruktur. Laju impor juga didorong oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 ten-

tang Ketentuan Impor Besi dan Baja. Akibat Permendag 22, impor besi dan baja melonjak tajam sebesar 27,81 persen pada periode Januari-November 2018.

Menurut Arim Nasim, pengamat ekonomi Islam dari Universitas Pendidikan Indonesia, penyebab utama defisit neraca perdagangan adalah kebijakan pemerintah yang sangat liberal dan kapitalis serta *mindset* sebagian besar pejabat yang mengurus rakyat dengan paradigma bisnis yaitu untung rugi.

Sebagai contoh kebijakan

Permendag 22 tahun 2018 yang memudahkan impor baja sehingga industri baja tanah air dihadapkan pada masalah daya saing rendah, karena praktik 'nakal' para eksportir baja asing dalam memasukkan baja ke Indonesia. Begitu juga kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah bukan yang dibutuhkan oleh rakyat terutama usaha kecil dan menengah (UMKM) tapi infrastruktur untuk kepentingan para kapitalis. **man/lm**

MUAMALAH

Haram Menyewakan Lahan Pertanian



Pemilik tanah pertanian tidak dibolehkan menyewakan tanah pertaniannya untuk bercocok tanam maupun ditanami pohon. Karena kedua-duanya termasuk dalam pengertian *muzara'ah*. Hukumnya dinyatakan haram dengan tegas oleh syara'.

Dalilnya adalah sejumlah hadits yang menyatakan larangan menyewakan tanah. Antara lain, hadits yang dinyatakan dalam *Sunan an-Nasa'i*, "Rasulullah saw telah melarang untuk menyewakan tanah. Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, jika kami menyewakannya dengan imbalan biji-bijian?' Baginda SAW menjawab, 'Tidak boleh.' Ada yang bertanya lagi, 'Jika kami menyewakannya dengan imbalan jerami?' Baginda SAW menjawab, 'Tidak boleh.' Ada yang bertanya lagi, 'Jika kami menyewakannya dengan imbalan hasil tanaman yang ditanam di sungai kecil.'

Baginda SAW menjawab, 'Tidak boleh. Tanamilah, atau serahkan kepada saudaramu.' [HR An-Nasa'i]

Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah ra, berkata, Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah [pertanian], maka hendaklah menanaminya, atau memberikannya kepada saudaramu. Jika dia tidak mau [seperti itu], maka hendaklah dia menahan tanahnya." Dalam riwayat lain, dari Jabir, "Rasulullah saw. melarang *Muhaqalah*, *Muzabanah*, dan *Mukhabarah*." [HR Muslim]

Makna, "Maka hendaklah, dia menahan tanahnya." adalah untuk ditanami sendiri. Itulah yang dimaksud oleh konteks kalimat ini. Karena itu, keharaman menyewakan lahan ini jelas dinyatakan dengan tegas dalam sejumlah hadits.

Mengenai dalil-dalil yang menyatakan kebolehan-nya, antara lain, yang digunakan oleh mazhab Syafii, "Kami menggunakan penduduk Khaibar untuk mengerjakan tanah perkebunan Khaibar, dengan upah tanaman maupun buah-buahan." Yang memberi peluang kedua-duanya bisa dilakukan, yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqat*, maka membawa hadits tersebut pada konotasi *Musaqat* jelas lebih kuat, karena adanya riwayat lain yang dinyatakan oleh 'Aisyah ra, bahwa Nabi SAW memberikan hasil panen dari tanah Khaibar kepada para istrinya berupa buah-buahan.

Karena itu, makna *musaqat*, lebih kuat dibanding makna *muzara'ah*. Dengan kata lain, menggunakan makna *musaqat* adalah bentuk penggunaan dalil [*istidlal*] dengan dalil, bukan *istidlal* dengan *syubhat dalil*. Sedangkan menggunakan konotasi *muzara'ah*, dalam konteks ini,

adalah bentuk *istidlal* dengan *syubhat dalil*. Perlu dicatat, *syubhat dalil* itu kadang berupa dalil Alquran dan as-Sunnah, tetapi *dalalah* yang digunakan adalah *dalalah* yang *marjuhah* [lemah], bukan *dalalah* yang *rajihah* [kuat].

Adapun larangan menyewakan lahan untuk pertanian tersebut meliputi dua konteks. *Pertama*, lahan tersebut digunakan untuk bertani [*muzara'ah*], yang ditanami tanaman yang tidak mempunyai pohon. *Kedua*, lahan tersebut digunakan untuk perkebunan [*tasyjir*], juga tidak boleh.

Mengenai kebolehan *musaqat*, dijelaskan oleh al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin, dalam nasyrah [21/12/1969], bahwa *musaqat* adalah melakukan akad ijarah terhadap pohon dengan upah berupa buahnya, atau menyewakan pohon berikut tanah yang digunakan untuk tumbuh, dengan upah sebagian dari buahnya, atau tanaman [*zuru*], dengan syarat, jumlah pohonnya lebih banyak. Adapun menyewakan tanah untuk ditanami pohon, maka ini termasuk *muzara'ah*, bukan *musaqat*. Karena itu, tetap tidak dibolehkan.

Karena itu, tidak diperbolehkan memberikan tanah pertanian untuk disewa orang lain, agar dia tanami dengan pohon. Yang boleh adalah, seorang pemilik tanah menanam sendiri tanahnya dengan pepohonan dan tanaman yang lainnya, kemudian diijarahkan dengan orang lain yang mengurusnya, dengan upah berupa buah yang dihasilkannya. Inilah yang disebut *musaqat*. Wallahu a'lam. **har**

Hasil yang paling dibanggakan rezim Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur. Bahkan para pendukungnya pun dengan percaya diri mengatakan bahwa semua infrastruktur yang ada ini hasil pemerintahan Jokowi. Rezim lainnya tak dianggap. Namun, laporan Bank Dunia mengubah segalanya. Apa itu? Simak kupasan kami berikut ini.

RUNTUHNYA INFRASTRUKTUR JOKOWI

Untuk membayar jumlah itu, Inalum mendapatkan utang dari sindikasi 11 bank asing dengan bunga berkisar 6 persen per tahun.

Publikasi Bank Dunia "Infrastructure Sector Assessment Program, telah mengungkap beberapa kelemahan pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi. Meskipun laporan setebal 344 halaman itu sempat ditarik Bank Dunia, setelah diprotes pemerintah, namun Bank Dunia dan pemerintah akhirnya mengakui kebenaran laporan itu. Laporan itu tentu saja menjadi tamparan bagi Presiden Jokowi, mengingat infrastruktur menjadi satu-satunya andalan rezimnya untuk menarik hati rakyat agar kembali memilihnya pada Pilpres mendatang.

Menurut laporan itu, salah satu kelemahan mendasar pemerintah dalam pembangunan

infrastruktur adalah perencanaan yang tidak melalui proses persiapan yang matang. Sebagai contoh, pemerintah tidak memiliki kriteria mana proyek yang harus ditender secara kompetitif dan mana yang harus dikerjakan oleh BUMN. BUMN ditunjuk semata-mata karena dianggap mampu melakukan lebih cepat dan memiliki posisi kuat di sektor itu.

Pemerintah yang terlibat dalam penyiapan proyek infrastruktur juga dipandang memiliki kapasitas yang tidak mumpuni baik dari sisi pendanaan dan sumber daya manusia. Sementara Bappenas sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, tidak memiliki ketegasan untuk menolak proposal pemerintah yang tidak

jasas, kurang informasi, dan kurang persiapan.

Dalam kondisi demikian, BUMN akhirnya menjadi korban. Meskipun BUMN memiliki kemampuan untuk mendapat dana yang lebih murah dan jaminan dari pemerintah tapi beban yang harus mereka tanggung nyaris di luar kemampuan mereka. Apalagi setelah pemerintah meminta mereka untuk tidak lagi bergantung pada anggaran pemerintah, tapi harus mencari pinjaman sendiri.

Akhirnya, banyak keuangan BUMN yang mengalami tekanan overdosis. Rasio utang terhadap modal meningkat tajam. Bahkan sejumlah BUMN memiliki utang lebih dari dua kali lipat dari modalnya. Sementara, penerimaan dan keuntungan stagnan bahkan cenderung turun. Bahkan banyak BUMN tidak lagi memiliki kemampuan untuk meningkatkan modal pembiayaan selain berharap subsidi dari pemerintah.

Bank Dunia juga mempertanyakan kualitas infrastruktur yang dibangun pemerintah sejalan dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi infrastruktur yang sedang dan telah dibangun pemerintah. Persiapan yang kurang matang, pengawasan lemah, dan anggaran yang terbatas diduga menjadi penyebab dari hal tersebut.

Pembangunan infrastruktur, menurut laporan itu, juga tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Sebagai contoh, pemanfaatan jalan arteri atau jalan utama dan jalan-jalan pedesaan tumbuh tinggi namun kualitasnya tidak ikut membaik. Akan tetapi, pemerintah tidak memberikan perhatian besar untuk hal tersebut. Pemerintah justru sibuk untuk membangun jalan tol secara masif sebagai alternatif jalan-jalan yang memiliki kemacetan tinggi atau jalan-jalan strategis nasional.

Proses kontraknya juga

bermasalah. Pembangunan tol yang dikemas dengan model *built, operate, and transfer* (BOT) juga mengandung beberapa kelemahan. Membengkaknya biaya pembangunan seperti lambatnya pembebasan lahan akhirnya dibebankan kepada pemerintah, yang kemudian dikompensasi dengan peningkatan tarif dan perpanjangan masa konsesi menjadi lebih dari 35 tahun. Hal yang sama berlaku pada transportasi massal yang juga tidak dipersiapkan dengan baik sehingga biayanya sangat tidak ekonomis.

Dampak dari perencanaan yang kurang matang juga dialami PLN. Melesetnya proyeksi pertumbuhan konsumsi listrik nasional, baik akibat kenaikan tarif ataupun kondisi ekonomi yang melemah, membuat PLN terbebani dengan utang yang cukup besar.

Akibat kesalahan proyeksi itu, cadangan listrik nasional yang normalnya 25-35 persen, kini membengkak menjadi 70 persen atau terjadi kelebihan investasi sebanyak 35 persen. Memang, PLN telah mengurangi target pencapaian 35 GW, namun belanja modal BUMN itu, termasuk untuk membayar utangnya, telah naik tiga kali lipat dibandingkan periode 2015. Suku bunga yang harus dibayar juga lebih tinggi mengingat lembaga keuangan telah menolak untuk memberi pinjaman dengan suku bunga normal pada perusahaan yang tidak sehat itu.

Selain mengomentari beberapa kelemahan pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan, Bank Dunia juga merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk meluruskan arah pemerintah. Salah satunya mendorong agar pihak swasta lebih banyak dilibatkan pada proyek-proyek pemerintah.

Oleh karena itu, beberapa kendala yang menghambat ma-

suknya investor swasta perlu diperbaiki. Sebagai contoh, penentuan tarif penggunaan jasa infrastruktur yang kurang kompetitif dapat ditingkatkan sebagai sumber pemasukan. Selain itu, pemerintah dan BUMN perlu menciptakan sumber-sumber pembiayaan alternatif terutama dari pasar modal.

Perubahan

Ambisi pemerintah untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran, tanpa didukung oleh perencanaan yang baik dan sumber pembiayaan yang memadai justru menjadi petaka. Bukannya menjadikan Indonesia lebih maju, namun justru mengguncang sendi-sendi keuangan pemerintah dan BUMN.

Beban utang dan pembayaran bunga dan cicilannya yang semakin tinggi. Akibatnya, pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan menjadi terabaikan. Belum lagi, hak publik untuk menikmati infrastruktur dasar yang dapat dijangkau secara gratis dan berkualitas tinggi terkendala oleh model pembangunan infrastruktur yang mengadopsi model kapitalisme. Rakyat dipaksa untuk membayar mahal apa yang semestinya menjadi hak yang dapat mereka nikmati secara gratis.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seharusnya meninggalkan model kapitalisme dan mengadopsi pengelolaan infrastruktur yang diatur dalam Islam. Infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan, misalnya, harus dipandang sebagai hak dasar rakyat yang harus disediakan secara cuma-cuma oleh negara. Selain itu, sumber pembiayaannya tidak boleh berasal dari utang ribawi atau pinjaman dengan syarat-syarat yang merugikan rakyat dan pemerintah. []

muis

KWIK KIAN GIE: PEMBANGUNAN NGAWUR

Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie menilai, pembangunan selama rezim Jokowi terlalu dipaksakan. Ia mengatakan itu dalam acara *Indonesia Business Forum TV One*, Jumat (28/12/2018).

"Infrastruktur dipaksakan harus tanpa melihat daerah mana yang harus, daerah mana yang belum perlu, oleh karena dipaksakan lalu dibiayai dengan utang," katanya.

Negara akhirnya harus membayar bunga, sementara proyek infrastruktur belum bisa dipakai. "Jadi teori yang dikatakan utang itu mempunyai *self liquidating character* karena utang produktivitas naik itu tidak betul," jelasnya.

Ketika ditanyakan soal posisi kebijakan pemerintah berada di posisi yang terlampaui pagi atau yang terlambat dibangun, Kwik dengan cepat menjawab saat ini pembangunan tersebut ngawur.

"Kita dalam posisi ngawur," ujar Kwik yang disambut tepuk tangan dari para hadirin.

Istilah ngawur tersebut tercermin pada pembangunan jalan tol yang tidak semestinya. "Trans Jawa mesti jadi, Papua mesti jadi, jadi tidak ada penelitian mana, daerah mana yang dibutuhkan, mana yang tidak butuh, tidak ada, dipaksakan mana keuangannya, tidak peduli, utang masih kurang tidak peduli, ini hanya satu saja," kata pakar ekonomi ini. []

PROYEK MERCUSUAR YANG ABAIKAN RAKYAT



Pembangunan infrastruktur saat ini mirip dengan zaman penjajahan Belanda.

Banyak penguasa di pusat maupun di daerah yang ingin dikenang rakyatnya. Salah satunya adalah dengan membangun proyek fisik yang 'wah'. Harapannya, setelah mereka tak menjabat, masyarakat tetap memujinya karena telah meninggalkan warisan proyek fisik tersebut.

Mengapa? Sebab, proyek fisik ini kelihatan oleh mata. Ada bentuknya. Sementara, pembangunan non fisik tak tampak hasilnya.

Jangan heran, di masa pemerintahan yang hanya lima tahun, kebijakan pembangunan fisik mercusuar banyak dilakukan. Ada bupati yang membangun monumen. Ada walikota yang membangun gapura raksasa. Ada juga yang membangun patung raksasa di tengah kota, jembatan, hingga taman di pinggir laut.

Ini pula yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Rezim ini menggeber pembangunan infrastruktur mercusuar. Seperti yang dikatakan oleh Kwik Kian Gie, pembangunannya ngawur karena tidak dengan pertimbangan dan perencanaan yang matang. Asal bangun. Sudahlah begitu, hampir semuanya dibangun dari utang.

Tak heran banyak pihak mengkritisi kebijakan ini. Termasuk Bank Dunia sendiri. Bahkan ada yang berpendapat, pembangunan infrastruktur saat ini mirip dengan zaman penjajahan Belanda. Pembangunan infrastruktur pada zaman Belanda, bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan penjajah Belanda.

Pengamat ekonomi Arim Nasim berpendapat, pembangunan infrastruktur sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan para kapitalis. Ia mencontohkan, pembangunan jalan kereta api cepat Bandung Jakarta. Proyek tersebut jelas tidak penting karena sudah ada jalan tol, sudah tersedia jalan kereta api. Bahkan Ignatius Johan, Menteri Perhu-

bungan saat itu, menolak proyek tersebut dan memberikan solusi dengan membangun *double track* dengan biaya yang sangat murah dan bisa memperlancar arus transportasi Jakarta Bandung.

"Namun, usulan itu ditolak oleh Jokowi karena sebenarnya yang diincar oleh para kapitalis adalah puluhan ribu hektar tanah PT Perkebunan (PTPN) yang akan dijadikan area bisnis dan kompleks perumahan atau kota baru untuk kepentingan para kapitalis," katanya.

Begitu juga proyek pembangunan pelabuhan dan bandara serta bendungan seperti Bendungan Jati Gede yang baru diresmikan tahun lalu di Jawa Barat. Semuanya tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat. Bahkan rakyat menjadi korban pembangunan infrastruktur tersebut.

Mereka harus kehilangan tempat tinggal dan tanah leluhur mereka. Mereka terpaksa mencari penghidupan yang baru, yang belum tentu nyaman sebagaimana tempat tinggal mereka semua.

Ekonom dari Indef M Rizal Taufiqurrahman mengkritisi pembangunan infrastruktur Jokowi dampaknya terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai representasi ekonomi kerakyatan di Indonesia. Menurutnya, jika dilihat *record* selama 4 tahun sebelum 2019 ini, realisasi kebijakan yang pro terhadap ekonomi kerakyatan sepertinya masih jauh dari harapan.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan UKM. Ia mencontohkan infrastruktur pembangunan jalan tol di Jawa. Apakah memberikan angin segar bagi para UKM yang ada di sekitar jalan itu?

"Itu menjadi pertanyaan besar. Kalau kita amati lebih dalam lagi, pembangunan trans Jawa dari Cipali sampai ke Pasuruan, nampaknya belum mendongkrak UKM yang ada. Bahkan contoh kasus di Brebes UKM

telor asin yang selama ini terkenal justru komplain dengan adanya tol trans Jawa," jelasnya.

Belum lagi kalau lebih dalam, terkait beberapa sentra UKM yang sudah ada sekarang

dengan *case* di atas. Rizal melanjutkan, seharusnya ketika dibangun infrastruktur jalan tol tersebut sudah disiapkan pula langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi dampak buruk

dari jalan tol trans Jawa, trans Sumatera ataupun nanti di trans Kalimantan, dengan kebijakan *support selling* untuk sektor UKM di sepanjang jalur tol. Tapi itu semua tak ada. [] **man/lm**

INFRASTRUKTUR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Infrastruktur merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, seharusnya keberadaan infrastruktur akan sangat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

Syeikh Abdul Qadim Zallum dalam buku *Sistem Keuangan Negara Khilafah* yang dikeluarkan Hizbut Tahrir Indonesia, membagi infrastruktur dari sisi kepemilikan menjadi tiga jenis. *Pertama*: Infrastruktur milik umum. Jenis ini terbagi menjadi dua yaitu: (i) Jalan-jalan umum dan sejenisnya seperti laut, sungai, danau, kanal atau terusan, lapangan umum dan masjid. (ii) Pabrik/industri yang berhubungan dengan benda-benda milik umum seperti pabrik/industri eksplorasi pertambangan, pemurnian dan peleburannya; juga pabrik/industri minyak bumi dan penyulingannya.

Kedua: Infrastruktur milik negara yang disebut dengan *marâfiq*. *Marâfiq* adalah bentuk jamak dari kata *mirfaq*, yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan; meliputi sarana yang ada di perdesaan, provinsi maupun yang dibuat oleh negara selama sarana tersebut bermanfaat dan dapat membantu. *Marâfiq 'ammah* ialah seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat seperti: Sarana pelayanan pos, surat menyurat, telepon, kiriman kilat, teleks, sarana televisi, perantara satelit, dan lain-lain.

Ketiga: Infrastruktur yang bisa dimiliki individu seperti industri berat dan senjata, landasan pesawat terbang, sarana transportasi seperti bus dan pesawat terbang serta yang lainnya.

Pembiayaan dan Pengelolaan

Dalam sistem ekonomi kapitalis, termasuk yang diterapkan di Indonesia, biaya pembangunan dan pemeliharaan berbagai macam infrastruktur diperoleh dari sektor pajak dan utang serta kerja sama dengan swasta.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum harus dikelola

oleh negara dan dibiaya dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain. Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka. Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.

Dari sisi jangka waktu pengadaannya infrastruktur dalam Islam dibagi menjadi dua jenis: (i) Infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan menundanya akan menimbulkan bahaya bagi umat. Misal, satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, saluran air minum. (ii) Infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya misalnya jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan, perluasan masjid dll.

Infrastruktur kategori yang kedua tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana sehingga tidak dibolehkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan jalan utang dan pajak.

Adapun infrastruktur kategori yang pertama, tanpa memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN atau Baitul Mal, harus tetap dibangun. Jika ada dana APBN atau Baitul Mal maka wajib dibiayai dari dana tersebut. Tapi, jika tidak mencukupi maka negara wajib membiayai dengan memungut pajak (*dharibah*) dari rakyat. Jika waktu pemungutan *dharibah* memerlukan waktu yang lama, sementara infrastruktur harus segera dibangun, maka boleh negara meminjam kepada pihak lain. Pinjaman tersebut akan dibayar dari dana *dharibah* yang dikumpulkan dari masyarakat. Pinjaman tidak boleh ada bunga. [] **man/lm**

Upaya Menghancurkan Negara Islam

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Setelah Negara Islam berdiri di Madinah, Nabi SAW dan kaum Muslim menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana caranya mempertahankan negara yang baru seumur jagung ini. Pada saat yang sama, pihak-pihak yang kepentingannya terganggu terus berusaha merancang makar jahat untuk menghancurkan negara ini.

Ketika itu, kaum kafir Quraisy menulis surat kepada 'Abdullah bin Ubay bin Salul, "Kalian telah memberikan kepada teman kami [Muhammad SAW]. Kami bersumpah demi Allah, kalian harus memerangnya, atau mengusirnya, atau kami akan menyerang kalian semua, sehingga kami akan membunuh kalian, dan merampas perempuan-perempuan kalian." [Abu Dawud, Sunan Abu Dawud]

Begitu surat ini sampai kepada 'Abdullah bin Ubay, dia segera melakukan tindakan untuk melaksanakan apa yang diminta oleh kawannya, musyrik Makkah, pada saat yang sama, dia sendiri mempunyai dendam pribadi kepada Nabi SAW, karena telah merebut kekuasaan dari tangannya. 'Abdurrahman bin Ka'ab menuturkan, "Ketika surat itu sampai kepada 'Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya, yang menjadi penyembah berhala itu, mereka pun berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, baginda SAW langsung menemui mereka, seraya bersabda, "Telah sampai ancaman kaum Quraisy terhadap kalian. Mereka tidak akan bisa merancang rancangan jahat melebihi apa yang kalian ingin rancang terhadap diri kalian sendiri. Kalian ingin memerangi anak-anak dan saudara-saudara kalian, bukan?" Ketika mereka mendengarkan itu dari Nabi SAW, mereka pun bubar [al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II/655].

'Abdullah bin 'Ubay bin Salul ketika itu tidak ingin berperang, tetapi tampaknya dia sepakat dengan kaum Quraisy. Begitu mendapatkan peluang, dia selalu berusaha untuk menimpakan keburukan kepada kaum Muslim. Dia pun bersekongkol dengan orang Yahudi, agar mereka membantunya untuk mengalahkan Nabi SAW. Tetapi, Nabi SAW mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga perlahan tapi pasti mampu memadamkan api keburukan mereka [al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II/655].

Kaum Quraisy pun mengirimkan surat kepada kaum Muslim, yang berisi ancaman. "Jangan kalian merasa, bahwa kalian telah aman dari kami, dengan lari ke Yatsrib. Kami akan mendatangi kalian. Kami akan menghabisi kalian, dan kami akan membumihanguskan tanaman kalian di negeri kalian." [Rahmatan lial-'Alamin, Juz I/116]

Ancaman kaum kafir Quraisy ini ternyata bukan ancaman kosong. Rencana jahat dan keinginan buruk mereka untuk menghabisi Rasulullah benar-benar terbukti, sampai Nabi SAW harus berjaga

sepanjang malam, atau dalam penjagaan para sahabat. 'Aisyah ra menuturkan, "Rasulullah telah berjaga [tidak tidur] sepanjang malam, saat awal-awal sampai di Madinah. Sampai baginda SAW bersabda, "Andai saja ada seorang pria shalih dari sahabatku yang menjagaku malam ini?" Ketika kami sedang dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba kami men-

[Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I/404]

Ronda dan patroli ini tidak hanya dilakukan pada beberapa malam saja, tetapi dilakukan terus-menerus. 'Aisyah ra menuturkan, "Rasulullah SAW pernah berjaga pada suatu malam, sampai turun firman Allah SWT, "Wa-Llahu ya'shimuka min an-nas" [Allah selalu menjagamu dari [ancam-

negara, tetapi juga ditujukan kepada seluruh kaum Muslim. Ubay bin Ka'ab menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah, dan mereka mendapatkan tempat dari kaum Anshar, maka semua bangsa Arab mengarahkan busurnya kepada mereka. Mereka pun tidak tidur di malam hari, kecuali dengan membawa senjata, dan tidak pula mereka bangun di pagi hari, kecuali dengan membawa senjata."

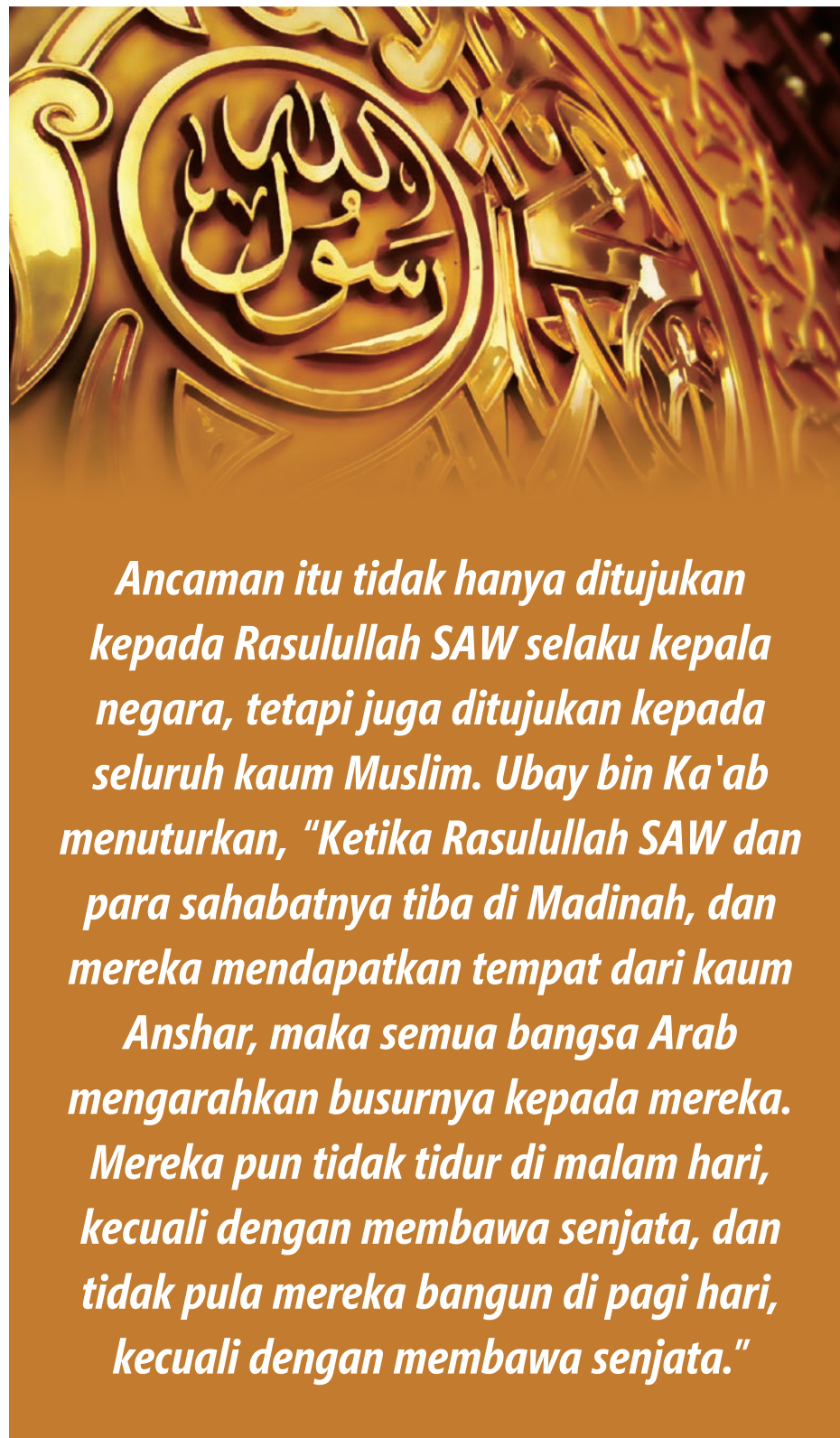
Begitulah kondisi Rasulullah SAW dan para sahabat di awal-awal kedatangan mereka ke Madinah, setelah negara Islam berdiri di sana. Mereka menyadari betul, bahwa ancaman kaum kafir Quraisy, musyrik Madinah, dan Yahudi terhadap eksistensi negara mereka jelas riil, bukan hanya ancaman kosong. Potensi ancaman itu datang dari dalam Madinah, melalui kelompok 'Abdullah bin Ubay bin Salul, juga kaum Yahudi, meski telah diikat oleh Nabi SAW dengan perjanjian, juga dari luar Madinah, kaum kafir Quraisy di Makkah.

Dalam kondisi yang begitu mengancam, yang mengancam entitas [negara] kaum Muslim di Madinah, yang jelas telah memberikan sinyal, bahwa kaum Quraisy tidak pernah siuman dari kebencian mereka, maka Allah SWT pun memberikan izin berperang kepada kaum Muslim, yang sebelumnya belum diwajibkan kepada mereka. Allah SWT, "Telah diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, [untuk berperang], karena mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka." [QS 22:39]

Allah SWT menurunkan ayat ini, yang memberikan penjelasan kepada mereka, bahwa izin berperang ini tujuannya tak lain adalah untuk menghilangkan kebatilan, serta menegakkan syiar Allah. Allah SWT juga berfirman, "Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, maka mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta memerintah pada kemakrufan dan mencegah dari kemunkaran." [QS 22:41]

Jadi, izin berperang ini diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW dan para sahabat setelah mereka hijrah ke Madinah. Bukan ketika masih di Makkah. Meski, kapan pastinya, apakah dalam perjalanan menuju hijrah ke Madinah, atau saat setelah sampai di Madinah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi, yang pasti, izin ini diberikan setelah mereka mempunyai negara Islam di Madinah.

Izin berperang ini, selain untuk menghilangkan kebatilan, sebagaimana visi jihad ofensif, juga untuk mempertahankan eksistensi entitas [negara] mereka di Madinah, dan entitas [umat] Islam dari ancaman penghancuran dan pemusnahan yang dilakukan oleh kaum kafir. Karena itu, jihad dalam Islam mempunyai dua sisi, yang saling melengkapi, yaitu ofensif dan defensif. Bukan, saling menegasikan, satu sama lain. Wallahu a'lam.[]



Ancaman itu tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah SAW selaku kepala negara, tetapi juga ditujukan kepada seluruh kaum Muslim. Ubay bin Ka'ab menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah, dan mereka mendapatkan tempat dari kaum Anshar, maka semua bangsa Arab mengarahkan busurnya kepada mereka. Mereka pun tidak tidur di malam hari, kecuali dengan membawa senjata, dan tidak pula mereka bangun di pagi hari, kecuali dengan membawa senjata."

dengarkan desingan senjata. Nabi SAW bertanya, "Siapa ini?" Ada yang menjawab, "Sa'ad bin Abi Waqqash." Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu ke sini?" Dia menjawab, "Saya mengkhawatirkan diri Rasulullah SAW, maka saya datang untuk menjaganya." Rasulullah SAW pun mendoakannya, lalu baginda SAW tidur."

an] orang-orang itu." Maka, Rasulullah SAW pun mengeluarkan kepalanya dari pelindung kepala [helm], seraya bersabda, "Wahai para manusia, pergilah dariku, karena aku telah dijaga oleh Allah 'Azza wa Jalla." [at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, Juz II/130]

Ancaman itu tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah SAW selaku kepala

**TAUBAT MERUBAH MUSIBAH MENUJU BERKAH**

Yogyakarta. Dalam *Muhasabah Awal Tahun 2019: Dari Musibah Menuju Berkah*, Mudzakah Ulama Yogyakarta tegaskan taubat merubah musibah menuju berkah, Sabtu (12/1) di Gedung PDHI "Sasonoworo" Yogyakarta.[]

**DARI RECHSTAAT MENJADI MACHSTAAT**

Bandar Lampung. LBH Pelita Umat Korwil Lampung dalam diskusi *Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi 2019* menyimpulkan rezim Jokowi telah mengalihkan Indonesia dari rechstaat (negara hukum) menjadi machstaat (negara kekuasaan), Ahad (13/1) di Kampoeng Bambu, Way Halim, Bandar Lampung.[]

**TAATI HUKUM ALLAH, PERIODE KHILAFAH SEGERA TERBIT**

Malang. Dalam kajian bakda shalat Subuh, Gerakan Shalat Subuh Berjamaah Malang menyeru jamaah untuk menaati hukum Allah untuk memantaskan diri menyambut periode khilafah yang akan segera terbit, Ahad (6/1) di Masjid Nurul Iman Kota Malang.[]

**ISLAM KAFFAH HARUS TERTANAM DALAM DIRI PEMUDA MILENIAL**

Kabupaten Bandung. Islam kaffah dan semangat hijrah harus tertanam dalam diri pemuda milenial, begitulah kesimpulan kegiatan *Training My Movement: Your Life is Your Choice* yang digelar Komunitas Insan Cemerlang, Ahad (6/1) di Masjid Nurul Amal, Arjasari, Kabupaten Bandung.[]

**TCM ADAKAN RIHLAH IDEOLOGIS II**

Jember. Tsaqafah Center Al-Mumtaz (TCM) menggelar *Brother Camp II* selama dua hari pada Sabtu-Ahad (5-6/01). Agenda rihlah ideologis yang diselenggarakan di daerah kaki Gunung Argopuro itu diikuti lebih dari tiga puluh pemuda dan mahasiswa.[]

**KHILAFAH SOLUSI BERBAGAI PERMASALAHAN UMAT**

Banjar. Dalam *Jalajah Ammah: Menatap Masa Depan Islam di 2019*, Majelis Riyadhus Sholihin Kota Banjar menyimpulkan khilafah merupakan solusi atas berbagai permasalahan umat, Sabtu (12/1) di Masjid Multazam Pusdai Kota Banjar, Jawa Barat.[]

**IUS: OPTIMIS INDONESIA LAYAK MENERAPKAN HUKUM ALLAH**

Sidoarjo. Para ulama yang mengikuti *Ijtima Ulama Sidoarjo* (IUS) sangat optimis bahwa Indonesia layak menerapkan hukum Allah SWT, Ahad (13/1) di Ponpes Mambaul Hafidzin, Sidoarjo, Jawa Timur.[]

**RIBUAN ORANG HADIRI TABLIGH AKBAR PA 212 DI SOLO**

Solo. Ribuan orang menghadiri acara *Tabligh Akbar: Putihkan Solo, Kibarkan Bendera Tauhid* yang digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212 Solo Raya, Ahad (13/1) di Gladag, Solo.[]

Sultan Sulaiman Benar-Benar Hanya Terikat dengan Solusi *Syar'i*



Ketika keinginan untuk membangun Masjid Sulaimaniyah di atas dataran tinggi yang mempunyai pemandangan indah itu menghadapi jalan buntu, karena pemilik tanah itu tidak bersedia menjual tanahnya kepada Sultan Sulaiman, namun Sultan tetap berusaha mencari solusi yang *syar'i* untuk mewujudkan keinginannya itu.

Akhirnya, Sultan Sulaiman al-Qanuni memutuskan untuk meminta pandangan Syeikh al-Islam dalam masalah ini. Syeikh al-Islam pun memberikan jawaban, *"Hukum Islam dalam masalah ini sudah jelas sekali, wahai Paduka Sultan.. Kami tidak mampu memaksakan imbalan apapun, maupun sanksi apapun terhadap orang Yahudi itu, karena dia tidak bersedia untuk menjual tanahnya. Karena gubuk reot itu adalah miliknya, dan tidak boleh diambil dengan paksa. Jika dia meninggal dunia, maka anak-anaknya lah yang bisa menolak menjual gubuk reot itu. Karena syara' mengakui perpindahan hak milik dari orang tua ke anak... Pendek kata, tak ada pilihan di depan Paduka, kecuali satu saja, yaitu Paduka Sultan harus mendapatkan keridhaan orang Yahudi itu.."*

Sultan pun berpikir serius memikirkan masalah ini. Setelah itu, beliau menoleh ke arah para pejabatnya, sembari memberikan titah kepada mereka, *"Saya akan pergi sendiri menemuinya. Saya berharap dari dia agar dia bersedia menjual gubuk reot itu."* Begitulah, akhirnya Sultan Sulaiman al-Qanuni berangkat sendiri ke gubuk reot Yahudi itu, dan berharap mendapat kemurahan hatinya. Dia kemudian mengetuk pintu orang Yahudi itu.

Orang Yahudi itu keluar, dan melihat, ternyata di depannya adalah Sultan kaum Muslim, yang dikawal oleh sebagian pejabatnya. Sambil membungkuk, dia mendengarkan titah Sang Sultan. Sultan berharap darinya, agar dia bersedia menjual gubuk reotnya.. Kali ini, orang Yahudi itu tak kuasa untuk menolaknya. Terutama, ketika

sang Sultan menawarkan kepadanya nilai uang yang berkali-kali lipat, ketimbang apa yang sebelumnya ditawarkan oleh pejabat sang Sultan.

Begitulah, akhirnya pembelian gubuk reot milik Yahudi itu berhasil dilakukan oleh Sultan. Begitulah, akhirnya Masjid Jamik Sulaimaniyah yang megah dan agung itu, yang mewakili ciri khas seni bangunan Islam yang luar biasa itu akhirnya berhasil dibangun. Tindakan Sultan dalam menyelesaikan masalah ini membuktikan keadilan Islam yang luar biasa. Keadilan dan kasih sayang yang berlaku untuk seluruh umat manusia, tanpa melihat latar belakang agamanya.

Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya, *"Kami tidak mengutus kamu [Muhammad dengan membawa Islam], kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta."* [QS al-Anbiya': 107]

Sultan Sulaiman al-Qanuni pun mendapatkan gelar, *"al-Qanuni"* bukan karena dialah yang pertama kali mengadopsi perundang-undangan dalam Khilafah Islam, tetapi karena konsistensi beliau dalam menerapkan perundang-undangan itu dalam wilayah negaranya. Namanya terpatir dalam sejarah agung Khilafah 'Utsmani. Bahkan, tak hanya Khilafah 'Utsmani, tetapi sejarah Khilafah Islam. Karena di eranya lah, wilayah negeri kaum Muslim mencapai puncaknya, seluas 22.000.000 km². Dua kali lipat wilayah Amerika Serikat saat ini. Meliputi 3 benua, Asia, Afrika dan Eropa, hingga mencakup 2/3 dunia. **har**

KRISTOLOGI



Oleh: **Abu Deedat Syihab, MH**, Ketua KDK-MUI Pusat

Mengungkap Program Libarim Yahudi

Baru-baru ini kaum gay, lesbi yang tergabung dalam komunitas LGBT dan para pendukungnya mempromosikan/mempromogandakan kawin sesama jenis, lewat berbagai media. Mereka bergerak secara sistematis untuk memperjuangkan pengesahan perkawinan sejenis di Indonesia. Salah satu gerakannya, mengusung jargon: *"Indonesia tanpa diskriminasi"*. Masalah perkawinan di Indonesia sudah final menolak Perkawinan sejenis berdasarkan (UU Perkawinan No. 1/1974).

Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974), terus menerus digugat baik oleh kaum liberal maupun oleh orang-orang yang anti terhadap Islam.

Tentang perkawinan dalam pasal 1 berbunyi: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Selanjutnya dalam pasal 2 dinyatakan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu"*.

LGBT dapat berkembang dan legal di negara yang menganut sistem demo-

krasi liberal, sesuai dengan program Yahudi untuk menghancurkan agama dibuat aliran-aliran sesat, agama-agama tandingan, agama baru dan dikembangkan paham liberal; antara lain legalisasi perkawinan sejenis dan perkawinan lintas agama.

Mari kita cermati Program Freemasonry Yahudi yang dinamakan Libarim;

Ada 6 program sebagai berikut

- Mengorganisir kaum gay, lutherian, dan lesbian serta pengakuan hak mereka dalam hukum (pen. menghalalkan perkawinan sesama jenis). Sejak tahun 2004 di Indonesia sudah muncul buku *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, yang menulis adalah anak-anak dari Fakultas Syariah IAIN. (Buku: *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama/eLSA, 2005). Buku ini adalah kumpulan artikel di Jurnal *Justisia* Fakultas Syariah IAIN Semarang edisi 25/2004. Salah satu isi buku tersebut sbb; 1) mengorganisir kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara.

Harian *The Jakarta Post*, edisi Jumat (28/3/2008) pada halaman

mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul Islam 'Recognizes Homosexuality' (Islam mengakui homoseksualitas). Mengutip pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta, koran berbahasa Inggris itu menulis bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu diharamkan dalam Islam. (*Homosexuals and homosexuality are natural and created by God, thus permissible within Islam*). Menurut Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual.

- Melenyapkan etika klasik yang mengekang pergaulan muda-mudi, termasuk melalui penyebaran kebebasan seksual.
- Menghapus hukum yang melarang kawin lintas agama, untuk melahirkan generasi bebas agama.
- Persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dan pakaian. (dulu dikenal istilah emansipasi sekarang istilah yang dipakai "kesetaraan jender").
- Mengembalikan pemuda-pemudi goyim (pemuda-pemudi bukan Yahudi - pen) ke alam khayali, dunia musik, dan narkoba.
- Memperbanyak bet satan (rumah setan)

di setiap tempat untuk menampung pemuda-pemudi dalam alamnya. (sekarang sudah banyak kafe-kafe untuk pemuda-pemudi untuk bermaksiat ria).

Itu semuanya sudah terjadi di negeri ini. Kita dapat menyaksikan cara-cara Yahudi untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslim.

Padahal, al Kitab sendiri melarang perilaku LGBT itu sendiri. Itu terkategori perbuatan dosa.

Imamat 18 :22 : *Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.*

Imamat 20 :13 : *Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.*

I Korintus 6 :9-10 : *Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.* []



Oleh: **Prof Dr Ing Fahmi Amhar**

Provinsi Xinjiang di Republik Rakyat Tiongkok (Cina) dengan penduduknya yang beretnis Uighur dan beragama Islam sedang disorot dunia. PBB

aturan di ruang publik.

Apa yang terjadi hari ini di Xinjiang sering dibantah oleh pejabat resmi Tiongkok. Bahkan beberapa tokoh ormas di negeri ini ikut membela sikap

seorang sahabat nabi, Saad bin Abi Waqqas ra. (wafat 674 M) berdakwah ke Cina, dan kuburannya ada di Guangzhou. Sejumlah sahabat juga mempelajari teknologi yang berkembang lebih dulu di Cina, seperti kertas atau mesiu. Dan sejarah mencatat, meski awalnya, peradaban Cina jauh di atas peradaban Islam, namun kesungguhan umat Islam dalam menuntut ilmu lambat laun berhasil menyusul bahkan melampaui Cina.

Isa Ziling Ma dalam tulisannya "*Islamic Astronomy in China: Spread and Development*" menuturkan, astronomi Islam menyebar ke Cina pada era Dinasti Song. Sayangnya, bukti resmi yang mencatat peristiwa penyebaran sains Islam baru di masa Dinasti Yuan.

Prof Luo menemukan nama Ma Yize sebagai astronom Islam di Cina. Buku "*The Huai Ning Ma Family Tree*" itu menjelaskan silsilah Ma Yize. Ma Yize terlahir tahun 920 M di Rumi (kawasan Turki), dan nenek moyangnya berasal dari perbatasan Yaman dan Oman sekarang. Nama aslinya dalam bahasa Arab atau Turki tidak tercatat. Ia datang ke Cina di usia 40 tahun. Kaisar Taizu (berkuasa 950-976 M) begitu mengagumi astronomi di dunia Islam. Pada 961 M, Kaisar Taizu menunjuk Ma Yize untuk mengembangkan astronomi di Cina.

Karier pertamanya di bidang astronomi dimulai dengan membantu Wang Chuna mengumpulkan beberapa karya kalender. Ia mengembangkan



■ Halal Shop di Masjid Huxi, Shanghai

melaporkan ada indikasi pelanggaran HAM dan bahkan genosida yang dilakukan pemerintah komunis atas rakyat Muslim yang mayoritas di Xinjiang. Xinjiang adalah provinsi terbarat dan terluas di Tiongkok yang kaya sumber daya alam. Provinsi ini juga pintu ke barat untuk proyek jalan sutra modern atau dikenal dengan "One Belt One Road" (OBOR). Xinjiang berbatasan dengan Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan dan India.

Sepanjang sejarah, terjadi pasang surut pengaruh berbagai peradaban di Xinjiang. Sebelum Cina modern, Xinjiang lebih dikenal dengan nama Turkistan Timur, pernah menjadi salah satu provinsi Daulah Khilafah yang berbatasan dengan Kekaisaran Cina.

Namun kini, Xinjiang dituduh oleh pemerintah komunis Tiongkok sebagai ladang radikalisme. Ada elemen-elemen di Xinjiang yang berjuang memerdekakan diri dari Beijing, dan menjauhkan rakyat dari komunisme. Tentu wajar mereka menyerukan untuk kembali kepada jati diri mereka, yaitu Islam. Beijing memandang, gerakan ini sangat berbahaya, karena secara etnis, Uighur memang lebih Kaukasian, daripada Cina. Apalagi bahasa mereka lebih condong kepada Arab dan Turki, dan agama mereka Islam. Maka ratusan ribu penduduk Xinjiang dipaksa menjalani kamp-kamp re-edukasi, agar mereka merasa "lebih Cina" daripada Muslim. Pada saat yang sama, warisan sejarah dan budaya mereka dipersempit. Ribuan masjid telah ditutup. Dan ketika kaum Muslim Uighur ingin shalat Jumat, keterbatasan masjid membuat mereka meluber di jalanan, itu dipersalahkan pemerintah, karena dianggap melanggar

pemerintah Tiongkok sebagai hak yang wajar dari sebuah pemerintahan negara yang berdaulat. Intinya menurut mereka, Islam di Cina ditolerir bila hanya diterapkan seputar hak-hak pribadi, namun mustahil ditolerir bila itu menyangkut kedaulatan negara atau ideologi komunisme. Namun pembelaan ini oleh kelompok lain dilihat lebih karena kepentingan atau ketakutan akan terhentinya bantuan yang selama ini rutin diterima oleh ormas pembela pemerintah Tiongkok itu.

Ketika Dinasti Song berkuasa (960-1127 M), peradaban Islamlah mempengaruhi perkembangan teknologi



■ Masjid Besar di Xian, Cina, berusia 13 abad.

Fakta itu terkuak setelah seorang ilmuwan Taiwan bernama Pof Luo Xianglin pada tahun 1968 menemukan sebuah

astronomi dan mengamati alam semesta dengan metode Islam (semisal seminggu tujuh hari). Berbagai temuan Ma Yize dalam astronomi dan astrologi kemudian dikumpulkan Wang Chuna dalam kitab "*Yingtianli*" (artinya "Kalender Surga Sejalan").

Ma Yize menerjemahkan banyak karya astronomi dan matematika Islam ke dalam bahasa Cina, termasuk:

- Kitab al-Zij oleh Abu 'Abdallah al-Battani (858-929 M) [Latin: Albatinius - "Opus astronomicum"].
- al-Zij al-sabi [Tabel Sabian]
- Kitab Matali 'al-Buruj ["Kenaikan Tanda Zodiak"]
- Kitab Aqdar al-Ittisal ["Aplikasi Astronomi"]

Di karya-karyanya sendiri, Ma Yize terlihat dipengaruhi oleh astronom Al-Battani dan geografer Al-Hamdani.

Karena kontribusi Ma dalam penyusunan 'Yingtianli', Ma dijadikan bangsawan turun temurun dan anak-anaknya menggantikan posisinya di Observatorium Kaisar. Ini menunjukkan posisi terhormat ilmuwan muslim di Cina saat itu.[]



■ Ma Yize

di Cina.

Sebenarnya, hubungan baik Islam dan Cina sudah sangat lama. Salah

buku berjudul "*The Huai Ning Ma Family Tree*" di Perpustakaan Studi Asia Timur, Columbia University, AS.

Onbaşı Hasan İğdirli

(Komandan Resimen Senapan Mesin Khilafah Utsmani, wafat 1982)

Prajurit Sejati, Setia Menjaga Tempat Suci Sampai Mati

"Saya kembali ke rombongan, seolah semua sejarah dihidupkan kembali dari buku dan didirikan di depanku."

Ilhan Bardakci, jurnalis asal Turki, berjalan-jalan di kompleks Al-Quds Asy Syarif bersama beberapa politisi dan pebisnis Turki yang tengah melakukan kunjungan kehormatan ke Israel. Pemandu pun membawa Ilhan dan rombongan berkeliling hingga sampailah mereka ke depan salah satu sisi Masjid Al-Aqsha, yang sering disebut sebagai Halaman 12 Ribu Obor, pada 21 Mei 1972.

Halaman tersebut dibangun oleh Sultan Selim I, Khalifah Khilafah Utsmani (1512-1520). Salah satu keberhasilan Sultan Selim I adalah menyatukan negeri-negeri Islam yang sempat terlepas yakni Syam (termasuk di dalamnya adalah Palestina tempat Masjid Al-Aqsha berada), Hijaz, Tihamah dan Mesir.

Ketika menggabungkan kembali Al-Quds kekesatuan Khilafah Islam pada 30 Desember 1517, Sultan Selim I hadir di Masjid Al-Aqsha dan mendapati shalat Isya' dalam keadaan gelap. Sejak saat itu dia perintahkan agar setiap pasukan yang berjumlah 12 ribu personel itu menyalakan obor. Mereka semua shalat Isya' di area tersebut di bawah penerangan obor. Sejak saat itu halaman tersebut sering disebut Halaman 12 Ribu Obor.

Ilhan memperhatikan setiap sudut Halaman 12 Ribu Obor, tak tampak satu pun obor yang tersisa. Pandangan matanya terhenti pada sosok seorang kakek sekira umur 90 tahunan dengan pakaian seragam militer yang sangat lusuh berdiri tegap. Sekilas Ilhan menatap wajahnya, sempat muncul rasa takut begitu melihat wajah kakek tersebut banyak bekas luka.

Ilhan pun penasaran dan mempertanyakan kepada pemandu. Dengan enteng pemandu mengatakan tidak tahu dan mungkin saja kakek itu orang gila karena sudah ada di sini selama bertahun-tahun dan berdiri seperti patung. Tidak pernah bicara apapun dengan siapa pun. Dia hanya melihat ke arah Masjid Al-Aqsha menunggu hingga matahari terbenam.

Prajurit Utsmani

Tapi jawaban tersebut tak membuat puas Ilhan. Insting jurnalistiknya tertantang untuk diamalkan. Maka ia pun mendekatinya dan mengucapkan salam dengan bahasa Turki.

"Selamu Aleykum Baba (ayah)," ujar Ilhan seperti dipublikasikan Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki (IHH) dalam artikel yang berjudul *The Last Guardian of Quds: Corporal Hasan of Igdir*, 7 Desember 2017 di situs www.ihh.org.tr.

Disapa demikian, kedua bola mata sang kakek berbinar-binar. Sejurus kemudian dengan fasih menjawab dengan bahasa Turki juga, "Aleykum Selam Oğul (wahai anakku)!"

Sang wartawan kaget dengan jawabannya menggunakan bahasa tersebut, lantas bertanya tentang identitasnya.

"Saya adalah Kopral Hasan dari Korps ke-20, Brigade ke-36, Batalyon ke-8, Komandan Resimen Senapan Mesin ke-11," ujar kakek tua yang mengaku bernama Hasan itu.

Hasan bercerita, dirinya berasal dari İğdir, Anatolia. Kala itu, pasukannya menggempur Inggris di Terusan Suez



■ Pasukan Khilafah Utsmani yang Ditempatkan di Masjid Al-Aqsha Foto Ilmfeed

dalam sebuah perang besar. Namun tentaranya kalah hingga pasukan ditarik keluar dari Al-Quds pada 9 Desember 1917. Tapi tidak semua, disisakan satu skuadron (sekitar 53 personel) untuk menjaga Masjid Al-Aqsha.

"Ketika Negara Utsmani jatuh, dan agar tidak terjadi penjarahan dan perampokan di kota – Al-Quds – pasukan Turki meninggalkan satu skuadron tentara sampai pasukan Inggris memasuki Al-Quds, (sudah menjadi konvensi, tentara yang ditugaskan untuk serah terima ini tidak akan ditawan oleh pemenang). Saya bersikeras agar saya menjadi salah satu anggota skuadron ini dan menolak untuk kembali ke negara saya," ungkap Kopral Hasan.

Kopral Hasan pun menceritakan pesan Letnan Mustafa Efendi, kapten yang menugaskannya untuk menjaga Al-Quds. "Al-Quds adalah Pusaka Sultan Selim Han (Sultan Utsmani ke-9 dan Khalifah Utsmani pertama). Tetap bertugas jaga di sini. Jangan biarkan orang-orang khawatir tentang 'Utsmani telah mundur; apa yang akan kita lakukan sekarang'. Orang-orang Barat akan bersukacita jika Utsmani meninggalkan kiblat pertama umat Islam dari nabi kita tercinta. Jangan biarkan kehormatan Islam dan kemuliaan Utsmani diinjak-injak," ujar Kopral Hasan menirukan ucapan Kapten Mustafa.

Ia pun menjelaskan lebih lanjut. "Kami tinggal di Al-Quds karena kami takut saudara-saudara kami di Palestina akan mengatakan bahwa Utsmani meninggalkan mereka. Kami ingin Masjid Al-Aqsha tidak menangis setelah 4 abad. Kami ingin sultannya para nabi, Nabi Muhammad SAW, tidak bersedih. Kami tidak ingin dunia Islam berduka dan berkabung," ujar Kopral Hasan.

Kopral Hasan menambahkan, "Kemudian setelah itu tahun-tahun yang panjang berlalu seperti kejapan mata. Semua teman-temanku sudah berpulang ke rahmat Allah satu demi satu (jumlah mereka ada lima puluh tiga orang), dan musuh-musuh tidak bisa menghabiskan kami, tetapi takdir dan kematian (yang mengakhiri kami)."

Setia Sampai Mati

Kopral Hasan menyampaikan permintaan terakhir kepada Ilhan dan berkata, "Anakku, ketika kamu pulang ke

Turki, pergilah ke Desa Tokat Sanjak (daerah ini sekarang bernama Pontus). Di sana ada komandan saya, Kapten Mustafa. Beliau yang menempatkan saya di sini sebagai penjaga di tempat suci ini, Masjid Al-Aqsha dan meletakkan amanah di pundak saya. Cium tangannya untukku, katakan kepadanya bahwa Kopral Hasan, Komandan Resimen Senapan Mesin ke-11, masih tegap berdiri menjaga Masjid Al-Aqsha. Masih berdiri berjaga di tempat yang Anda tinggalkan sejak waktu itu. Dia belum pernah meninggalkan tugasnya untuk selamanya. Dia menginginkan doa-doa keberkahan Anda, Komandan!"

Ilhan menyanggupi permintaannya sembari menyembunyikan air matanya yang telah meleleh. Wartawan tersebut meraih kepala Kopral Hasan dan berkali-kali menciumi keningnya.

"Saya kembali ke rombongan, seolah semua sejarah dihidupkan kembali dari buku dan didirikan di depanku. Saya mengatakan situasi itu kepada pemandu wisata dan dia tidak bisa percaya. Saya memberinya alamat rumah dan mengatakan: 'Tolong kabari saya jika terjadi sesuatu,' ujar Ilhan.

Saat kembali ke Turki, Ilhan segera menuju wilayah Tokat untuk menunaikan amanah Kopral Hasan. "Saya menelusuri nama Letnan Mustafa Efendi dari catatan militer. Rupanya dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saya tidak bisa memenuhi janji yang telah saya berikan. Dan tahun-tahun berlalu, sampai pada tahun 1982, mereka memberi tahu ada telegraf di tempat saya bekerja. Ada satu baris tertulis: 'Wali Utsmani terakhir yang menjaga dan menunggu Masjid Al-Aqsa telah meninggal hari ini'."

Untuk mengenang kesetiannya dalam mengemban tugas, pada 2017 dibangunlah sebuah masjid yang megah yang diberi nama Masjid Onbaşı Hasan (Masjid Kopral Hasan) di lingkungan Tel al-Hawa di Jalur Gaza yang diresmikan oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki (IHH). □ **joko prasetyo** dari berbagai sumber. Sumber utama www.ihh.org.tr.



Ketika Negara Tidak Mampu Menyejahterakan

Oleh: Dr M Kusman Sadik

Memasuki tahun 2019 ini perlu melihat secara objektif kondisi kesejahteraan rakyat negeri ini. Intinya secara faktual tidak ada kabar mengembirakan terkait kesejahteraan tersebut. Sebab hingga kini tidak ada indikasi yang menunjukkan terjadinya perbaikan ekonomi masyarakat secara signifikan. Bahkan yang ada justru indikasi sebaliknya.

Indikatornya dapat dilihat secara kuantitatif. *Pertama*, hingga akhir 2018 Indonesia terbelit utang dengan beban yang sangat berat. Sebagaimana yang dicatat Bank Indonesia (BI), total utang luar negeri Indonesia hingga akhir September 2018 mencapai US\$359,8 miliar atau sekitar Rp5.371 triliun (kurs JISDOR akhir September 2018 adalah Rp14.929 per dolar AS). Total utang tersebut tumbuh sebesar 4,2 persen secara tahunan dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, utang luar negeri swasta hingga Kuartal III

2018 tercatat mencapai US\$ 180,63 miliar, meningkat 6,7 persen secara tahunan. Utang luar negeri swasta tersebut terutama dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.

Kondisi utang luar negeri yang menembus angka Rp5.371 triliun itu menggambarkan sangat buruknya kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pembangunan yang berbasis utang sebenarnya mirip bom waktu yang setiap saat bisa meledak.

Kedua, di samping jeratan utang kondisi buruk perekonomian tersebut juga diperparah oleh defisitnya neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2018 mengalami defisit sebesar US\$1,82 miliar atau sekitar Rp27,17 triliun secara bulanan (*month-to-month/mtm*). Sementara secara kumulatif Januari-Oktober 2018, defisit perdagangan

an mencapai US\$5,51 miliar atau sekitar Rp82,26 triliun.

Defisit perdagangan pada Oktober 2018 terjadi karena nilai ekspor hanya meningkat 5,87 persen dari US\$15,25 miliar pada September 2018 menjadi US\$ 15,8 miliar pada Oktober 2018. Sedangkan nilai impor meningkat tajam hingga 20,6 persen dari US\$14,25 miliar menjadi US\$ 17,62 miliar pada periode yang sama.

Ketiga, defisit tersebut juga menggambarkan rendahnya aktivitas produksi di dalam negeri sehingga didominasi oleh impor. Itu artinya negara belum mampu meningkatkan aktivitas produksi dalam negeri. Akibatnya perekonomian masyarakat khususnya di bidang industri dikuasai oleh negara lain melalui impor.

Hingga Juni 2018 Indonesia telah mengimpor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Tidak hanya beras, garam pun juga diimpor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada Januari 2018 garam impor yang masuk ke Indo-

nesia sebesar 131.957 ton dengan nilai USD3,88 juta. Sementara pada Februari 2018 saja, Indonesia mengimpor garam sebanyak 167.261 ton dengan nilai USD5,61 juta.

Menurut Kementerian Perindustrian, total impor garam hingga akhir tahun 2018 mencapai 3,7 juta ton. Bahkan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 yang menjadi payung legalitas untuk mengimpor garam tersebut. Sangat tragis, negeri yang dikelilingi lautan super luas ini justru menjadi pengimpor garam.

Keempat, utang Indonesia di tahun 2019 justru diprediksi masih akan terus meningkat. Itu dikarenakan berlanjutnya era suku bunga tinggi yang akan berdampak pada bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pada sisi lain ada Rp345 triliun utang jatuh tempo di 2019 yang harus dilunasi dengan menerbitkan utang baru. Melalui skenario seperti itu maka utang tentu akan meningkat signifikan.

Jika kebijakan berutang se-

perti sekarang ini terus dilakukan maka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia akan semakin melemah. Rasio utang terhadap PDB bisa mencapai 31-33 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.

Pada satu sisi utang terus menumpuk untuk infrastruktur yang tidak bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat. Sementara sektor fundamental ekonomi rakyat seperti pertanian dan kelautan justru diabaikan. Impor beras dan impor garam tersebut tidak berpihak terhadap kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan petani dan petambak garam.

Kebijakan itu justru lebih berpihak pada keuntungan segelintir elit pengusaha besar yang bergerak di sektor perdagangan dan impor. Karenanya, tidak ada yang bisa diharapkan dari kebijakan neo-liberal semacam itu kecuali kesengsaraan. *Wallaahua'lami ash-shawaab.*[]

MEDIA GAUL



Jangan Sukses Sendirian

Oleh: Dhika Widayat (Penulis Buku Pemuda Dahsyat)

Siapa sih yang tidak mau sukses? Betul, setiap manusia yang normal pasti menginginkan hidup dalam keadaan sukses. Manusia itu siapapun dan dimanapun dengan syarat dia normal. Kalau ada manusia yang tidak mau sukses dalam hidup, bisa jadi dia orang yang abnormal alias gila.

Sukses menjadi sebuah impian setiap manusia. Walaupun ukuran sukses bagi setiap orang mempunyai standar yang berbeda-beda. Hanya saja bisa dipastikan bahwa sukses yang dimaksud adalah keadaan diri yang lebih baik. Entah lebih baik secara finansial, pribadi, keilmuan, dan sebagainya.

Ada satu hal yang patut untuk kita renungkan bersama tentang sebuah kesuksesan yang ingin kita raih. Pertama, apakah kesuksesan yang kita raih akan benar-benar membuat kita bahagia? Kedua, apakah kesuksesan kita memberikan kontribusi untuk masyarakat?

Mengapa hal tersebut penting? Banyak orang yang terlihat sukses, bergelimang harta, menjadi orang terkenal namun hidupnya merasa tidak bahagia. Jika kita bicara tentang Jepang misalnya, apa yang ada dalam benak kita? Jepang adalah negara yang maju, teknologinya mumpuni, masyarakat yang disiplin. Dengan kata lain kita menyebut Jepang dengan negara yang sukses. Tahukah kita bahwa ternyata

angka bunuh diri di Jepang begitu besar?

Ada istilah racun kesuksesan. Dimana apa yang dianggap sukses ternyata tidak menumbuhkan kebahagiaan. Dibalik dulangan kesuksesan yang didapat ternyata tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Lantas apa makna kebahagiaan yang sebenarnya? Bagi seorang Muslim sudah jelas, bahwa kebahagiaan adalah ketika

bertukar masyarakat yang juga sukses.

Jangan sampai suksesnya kita membuat diri ini justru menjadi abai terhadap permasalahan umat. Merasa sudah dalam zona nyaman sehingga enggan untuk mengurus urusan umat. Seperti halnya enggan untuk ikut dalam mengkritisi kezaliman penguasa atas terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017.

Namun apakah harus menunggu sukses dulu baru mau mengurus urusan umat? Tentu tidak. Justru sebenarnya orang sukses adalah orang yang tidak hanya berjuang untuk kesuksesan pribadi, tetapi membangun kebersamaan dengan umat untuk sukses. Membangun tatanan masyarakat yang baik dan tentu juga diridhai oleh Allah.

So, kalau kita masih sibuk dengan urusan diri sendiri, jangan harap kesuksesan akan diraih. Karena sukses yang sebenarnya adalah dengan peduli terhadap urusan umat. Sebagaimana Rasulullah saw membangun sebuah sistem kemasyarakatan yang agung dan luhur. Sehingga masyarakat yang berada dalam koridor

tersebut tetap dalam kesuksesan selama 13 Abad. Tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat.

Jadi sudahkah kamu siap untuk berkontribusi untuk umat? Meraih kesuksesan bersama dalam masyarakat dan mengajak umat untuk peduli terhadap permasalahan negeri. Ayo dimulai dari sekarang![]



mendapatkan ridha dari Allah. Sehingga kesuksesan yang didapat adalah kesuksesan yang sebenarnya. Tentu dengan jalan dan sesuatu yang diridhai oleh Allah juga.

Selain itu perlu kita pertanyaan pula. Apakah kesuksesan yang kita raih juga berefek kepada kesuksesan masyarakat juga? Sebagaimana Rasulullah saw. yang tidak sekedar sukses secara pribadi, namun juga dapat mem-



Value Pelacur

Kini, ketika dunia hiburan kian hedonis, pelacuran artis kian eksis. Tuntutan gaya hidup glamour bak sosialita menggiring artis.

Sebanyak 45 artis dan 100 model terdaftar dalam jaringan prostitusi yang digawangi mucikari Endang alias Siska dan Tantri. Penelusuran polisi, transaksi di rekening Siska saja mencapai Rp 2,8 miliar setahun. Ini karena tarif sekali kencan ada yang Rp 25 juta, Rp 50 juta, Rp 80 juta, dan bahkan Rp100 juta.

Sementara, masih ada dua rekan Siska yang sampai tulisan ini dibuat, sedang dicari polisi. Artinya masih mungkin jumlah artis yang masuk daftar hitam bertambah.

Menurut pengakuan sang mucikari, para artis itu sendiri yang minta dicarikan pelanggan. "Saya tidak mengajak mereka, tapi mereka sendiri yang menawarkan diri ke saya," kata Tantri (*cnnindonesia*).

Budak Nafsu

Prostitusi adalah kemaksiatan tua yang ada sejak zaman jahiliah. Sebelum Islam datang, pelacur hanya dilakukan wanita dari kalangan budak. Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam tafsir Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîli al-Qur'ân menyebutkan pelacur yang terkenal di zaman jahiliah: Ummi Mahzul, Ummi 'Ulith, Hannah al-Qibthiyah, Mariya, Halalah, Ummu Suwaid, Sarifah, Farasah, dan Qaribah.

Para pelacur ini mengibarkan bendera merah di depan kemah atau rumahnya, pertanda lelaki mana saja boleh menggaulinya. Kalau sampai hamil, anak itu akan dinisbatkan pada lelaki yang wajahnya mirip sang anak. Itulah 'value' pelacur. Sudahlah budak, diperbudak lelaki pula. Buruk sekali. Beda dengan wanita merdeka, umumnya tidak melacurkan diri.

Dilegalkan Kapitalis

Di era jahiliah modern, prostitusi dilegalkan oleh ideologi kapitalis yang liberal. Di beberapa negara, resmi diatur

undang-undang. Seperti Selandia Baru, Austria, Brasil, Belgia, Denmark, dll. Mengapa? Karena menghasilkan uang. Uang adalah 'value' tertinggi dalam kapitalisme. Karena mendulang uang ini, prostitusi seolah bergengsi. Apalagi di kalangan artis bertarif tinggi.

Pelacurnya bukan lagi budak, melainkan wanita cantik molek yang terawat. Bukan digauli gratis, tapi tarifnya selangit. Seolah *value* naik drastis. Padahal faktanya tetap sama. Budak nafsu.

Illegal

Di Indonesia, kendati prostitusi tidak legal, namun faktanya tumbuh subur. Sebab, pelacur dan pelanggannya tidak

Jika ideologi kapitalisme mengizinkan pelacuran, sebaliknya dengan ideologi Islam. Begitu Nabi diutus, zina dibasmi. Buktinya, Nabi membaiait para wanita pasca Fath Makkah, di antara butir isinya adalah, "dan jangan berzina!"

dihukum. Hanya mucikari yang dijerat sanksi. Itupun tidak berat. Dipenjara hitungan tahun lantas bebas. Tak membuat efek jera.

Prostitusi artis sendiri, diduga kuat muncul di Indonesia sejak 70-an di Jakarta. Baik terselubung maupun terang benderang. Wartawati *Sinar Harapan*, Yuyu AN Krisna waktu itu membuat liputan khusus tentang pelacuran. Selain dibukukan dengan judul *Remang-remang Jakarta pada 79*, juga difilmkan.

Kini, ketika dunia hiburan kian hedonis, pelacuran artis kian eksis.

Tuntutan gaya hidup glamour bak sosialita menggiring artis, khususnya pendatang baru mencari jalan pintas. Persaingan ketat membuat mereka merendahkan diri. Seperti bersedia buka-bukaan. Menjadi model majalah pria dengan mengumbar aurat. Kerja tak begitu berkeringat, tapi bayaran tinggi untuk bergaya hidup.

Azab Pezina

Jika ideologi kapitalisme mengizinkan pelacuran, sebaliknya dengan ideologi Islam. Begitu Nabi diutus, zina dibasmi. Buktinya, Nabi membaiait para wanita pasca Fath Makkah, di antara butir isinya adalah, "dan jangan berzina!" Mendengar bunyi baiat itu, Hindun binti

ibu rumah tangga yang tak menghasilkan uang. Semua itu adalah menyesatkan. Melecehkan syariat Islam yang mengharamkan zina. Sekaligus, melecehkan perempuan, karena menempatkan pelacur lebih mulia daripada ibu rumah tangga.

Allah SWT tegas melarang zina, apalagi dijadikan profesi (QS. Al-Isra [17]: 32 dan An-Nur [24]: 2). Perbuatan ini dalam Islam disebut keji dan munkar yang tidak boleh dibiarkan. Adakah hari ini masyarakat yang belum pernah mendengar bahwa zina itu haram? Tidak ada. Opini umum memahami zina itu haram. Jika masih nekat melakukan dan melanggengkannya, itu adalah bentuk pembangkangan. Laknat Allah atasnya. Uang tak akan mampu menyelamatkan jiwanya. Bahkan matinya pun merana.

Syeikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahtani, seorang alim, penulis produktif dan dosen dari Arab Saudi pun dalam ceramahnya pernah bercerita: "Di antara mayat itu ada yang meletakkan tangan kanannya di kemaluannya sendiri, dan ada juga mayat yang kemaluannya menimbulkan bau busuk seperti bau hangus. Kemudian terdengar bunyi sesuatu seperti bunyi tusukan benda tajam dan membara yang keluar masuk kemaluannya." (*dream.co.id*)

Demikian pula di akhirat, neraka jahannam ancamannya. Jahannam memiliki tujuh pintu' (Al-Hijr: 44). "Pintu yang paling hebat panas dan sengatannya dan yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pezina yang berzina setelah mereka tahu keharamannya." Na'udzubillahiminzalik.

Hanya ideologi Islam yang menghancurkan pelacuran dengan larangan zinanya. Perempuan dan laki-laki akan terhormat. Tercega dari kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat.[] **kholda**

'Utbah bertanya, "Apakah dari kalangan merdeka ada yang berzina?" Ia heran, karena zina hanya dilakukan para budak. Kenapa Muslimah terhormat diwanti-wanti tidak berzina? Ya, karena zina itu hina. Tak ada *value*-nya di mata Allah SWT.

Demikianlah rendahnya pelacur. Tak sedikitpun berharga. Semahal apapun tarifnya, biarpun mencapai ratusan juta, tetap murahan. Opini kaum feminis yang selalu menempatkan pelacur sebagai korban. Membela mereka sebagai sosok berharga dengan label "pekerja" yang menghasilkan uang. Bahkan merendahkan

Kunci Surga Seorang Ibu

Seorang pegiat feminis liberal, yang juga dikenal sebagai seorang plagiat muda, Afi Nihayah, membuat pernyataan tendensius menyikapi fenomena prostitusi artis. Secara tersirat, ia merendahkan posisi ibu. Menurutnya, seorang ibu adalah murahan dibanding pelacur.

Ibu yang “hanya” menerima uang belanja Rp10 juta, namun tugasnya tak hanya melayani suami, juga merangkap sebagai *baby sitter*, tukang cuci, dll. Sementara seorang pelacur, hanya sekali melayani lelaki sekali dibayar Rp80 juta, sehingga *value*-nya dianggap lebih tinggi dari seorang ibu.

Pernyataan ini jelas-jelas melecehkan institusi pernikahan dan merendahkan kemuliaan ibu. Sebuah jalan halal yang disyariatkan Allah SWT. Tugas ibu tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun. Bayaran seorang ibu hanyalah surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini, bos perusahaan mana pun, yang akan mampu membayar jasa seorang ibu.

Demikianlah Islam memuliakan derajat ibu. Predikat istri dan ibu adalah kunci surga. Berikut di antaranya:

1. Bersuami adalah Kunci Surga

Menikah adalah menjaga kesucian. Posisi istri pendamping suami adalah kunci surga. “Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad 1:191 dan Ibnu Hibban 9: 471)

2. Hamil adalah Pahala Besar

Ibu hamil mendapatkan banyak pahala selama ia ridha dan taat pada Allah SWT. Dua rakaat shalat wanita yang hamil lebih baik dari 80 rakaat shalat wanita yang tidak hamil. Pada siang hari, seorang ibu hamil mendapat pahala puasa, sedangkan di malam harinya ia mendapat pahala shalat. Masya Allah.

3. Melahirkan Berpahala Seperti Jihad

Melahirkan adalah tugas suci seorang ibu yang juga menjadi kunci surga. Pada saat persalinan, seorang ibu mendapat pahala 70 tahun shalat dan puasa. Sedangkan untuk kesakitan yang dialami, Allah mengganjar kesakitan satu urat dengan satu pahala haji. Jika seorang ibu meninggal dalam masa 40 hari setelah melahirkan, maka ia mati syahid.

“Syuhada’ (orang-orang mati syahid) yang selain terbunuh di jalan Allah itu ada tujuh: Korban wabah tha’un adalah syahid, mati tenggelam adalah syahid, penderita penyakit lambung (semacam liver) adalah syahid, mati karena penyakit perut adalah syahid, korban kebakaran adalah syahid, yang mati tertimpa reruntuhan adalah syahid, dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid.” (HR. Malik, Ahmad, Abu Dawud, dan al-nasai, juga Ibnu Majah. Berkata Syu’aib Al Arnauth: hadits shahih).

4. Menyusui Imbalannya Surga

Seorang ibu yang menyusui anaknya mendapat satu pahala dari setiap tetes yang ia berikan pada anaknya. Jika seorang ibu memberi susu pada anaknya yang menangis, maka Allah mengganjarnya dengan pahala satu tahun shalat dan puasa. Jika seorang ibu menunaikan

kewajibannya menyusui selama dua setengah tahun, maka malaikat di langit langsung menyebarkan berita bahwa surga wajib baginya.

5. Begadangnya Ibu Setara Membebaskan 20 Budak

Semua itu pahala baginya, setara dengan membebaskan 20 budak. Bahkan tak hanya itu, ia akan diampunkan seluruh dosanya. Jika ia menghibur anaknya yang sakit, Allah beri padanya pahala 12 tahun ibadah.

6. Mendidik Anak adalah Investasi Akhirat

Ibulah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Pendidikan usia dini ada di tangannya. Hampir setiap saat dan setiap waktu ibu memberi pembelajaran kehidupan. Melalui sentuhan kasih sayangnya. Belaannya. Ucapannya. Nasihatnya. Contoh perilakunya. Kedekatan ibu terhadap anak adalah pengajaran seumur hidup bagi anak.

7. Ibu Sumber Kasih Sayang Keluarga

Ibu adalah poros kasih sayang keluarga. Dialah sumber cahaya kebahagiaan dalam rumah tangga. Mengasuh dan memberi tanpa batas. Selalu berjaga dan terjaga. Menemani ketidakberdayaan anak dan bahkan suaminya. Dia yang selalu mendahulukan anaknya dari pada dirinya sendiri. Mencintai tanpa menuntut balas.

Demikianlah kemuliaan posisi ibu, yang jelas tidak akan dimiliki oleh seorang pelacur. Kemuliaan yang tak akan didapatkan oleh seorang feminis yang memusuhi agama Islam. Memusuhi syariat Allah SWT. Semoga kaum ibu terjauh dari opini menyesatkan kaum feminis liberal.[] **kholda**



Saat “Lelah” Menjadi Ibu dan Istri

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga yang saya hormati, mohon nasihat tentang bagaimana cara kita mengatasi kelelahan-kelelahan dalam menjalankan tugas sebagai istri dan ibu. Baik kelelahan fisik maupun psikis. Jazakillah

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

YW - Bumi Allah

Wa'alaikumsalam Wr Wb.

Ibu YW yang baik,

Repot, capek, lelah adalah keluhan yang sering terucap dari para ibu ketika sudah merasa jenuh dengan masalah anak-anak dan pekerjaan rumah. Apalagi bila anak sudah cenderung bertindak semaunya. Tidak mau diatur, susah tidur, rewel, tidak mau makan, bertengkar dengan kakak adiknya, mengacak-acak apa saja yang ada di rumah, atau segala macam perilaku “menjengkelkan” anak-anak. Rumah yang sudah ditata rapi akan kembali bagaikan kapal pecah. Kelelahan fisik dan psikis dalam mengasuh anak dan mengatur rumah tangga jika tidak diatasi dengan baik akan bisa berakibat buruk.

Ibu YW yang baik,

Anak itu amanah, anugerah sekaligus ujian. Cara pandang terhadap keberadaan anak seperti ini menjadi sangat penting, agar

yang muncul dalam sikap saat membimbing dan mendampingi penuh dengan rasa syukur, ikhlas, sabar dan kasih sayang. Tidak menjadikan anak sebagai beban. Amanah akan memunculkan rasa tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Anugerah akan memunculkan rasa syukur atas setiap kelebihan yang dimiliki oleh anak. Dan kesabaran akan memunculkan rasa kenikmatan dalam menjalani proses dengan segala ujiannya. Jika tidak dengan kesabaran, bagaimana mungkin akan sanggup menghadapi setiap masalah anak-anak dengan baik dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Sabar disertai dengan niatan ikhlas hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT akan menjadi energi yang luar biasa dalam menjalani peran Anda sebagai ibu dan istri

Ibu YW yang baik,

Yang paling berperan penting dalam mengasuh dan mendidik anak memang ibu. Meski begitu, untuk meringankan tugasnya diperlukan kerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Sekali waktu suami membantu atau *menghendel* pekerjaan rumah dan anak-anak dengan mengajak orang-orang terdekat yang bisa diminta bantuannya. Mempekerjakan pembantu rumah tangga juga akan sangat membantu meringankan pekerjaan rutin. Sehingga Anda bisa punya lebih banyak waktu untuk memperhatikan anak-anak. Jika

tidak memiliki pembantu rumah tangga, cobalah untuk bekerja efektif dan efisien dengan manajemen waktu yang baik. Banyak ibu yang merasa sangat capai dengan pekerjaan rumah tangga hanya karena sebenarnya tidak pandai mengatur waktu. Jika ada anak yang relatif lebih besar, dapat ditanamkan pengertian pada mereka untuk ikut membantu mengelola tugas rumah tangga sehari-hari. Ajarkan prinsip kerja sama dan tanggung jawab sejak dini pada anak, agar ia terbiasa bersikap mandiri, berinisiatif dan dapat diandalkan.

Ibu YW yang baik,

Teman merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Bayangkan jika banyak sekali masalah yang dihadapi, tetapi tidak ada teman curhat yang dapat dipercaya. Ibarat gelas jika diisi air terus menerus, maka akan tumpah luber ke mana-mana. Pastikan bahwa teman yang Anda pilih benar-benar yang bisa membantu bukan teman yang justru akan menambah masalah baru. Mengunjungi atau berbagi pengalaman dengan para ibu yang sukses dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anak akan sangat membantu. Suami tentu saja diharapkan dapat menjadi teman (sahabat) terbaik buat Anda untuk menumpahkan segala masalahnya termasuk urusan anak-anak. Insya Allah curhat dengan suami rahasia akan lebih terjaga.

Ibu YW yang baik,

Seorang ibu juga perlu rileks, istirahat menenangkan pikiran dan tubuh. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan selama proses relaksasi, misalnya membaca buku-buku ringan yang berkaitan dengan penanganan masalah anak, menyalurkan hobi, pijat dan sebagainya. Pijat merupakan salah satu rileksasi untuk melepaskan diri dari kelelahan fisik dan psikis. Pijatan lembut dari suami tercinta misalnya, akan membuat lebih rileks, tidur lebih pulas, dan bangun kembali dengan badan yang lebih segar. Olahraga ringan juga sangat efektif untuk rileksasi. Olahraga akan memperlancar peredaran darah dan membuka jantung untuk menerima lebih banyak oksigen.

Ibu YW yang baik

Yang tak kalah penting dari itu semua adalah tawakal dan doa. Bertawakallah kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar yang kadang di luar perkiraan. Saat sudah merasa lelah dengan persoalan anak-anak, pekerjaan sehari-hari yang kadang mungkin menjemukan dan menyulitkan. Jangan lupa berdoa selalu minta bantuan Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas Anda sebagai ibu dan istri.[]

KONSULTASI

Diasuh oleh:

Dra (Psi) Zulia Ilmawati

Hukum Jual Beli Kurma Secara Online

Diasuh Oleh: **Ust M Shiddiq Al Jawi**



Tanya:

Ustadz, bolehkah jual beli kurma secara online? (Mabsus, Tangerang).

Jawab:

Hukum asalnya haram menjual belikan kurma secara online. Karena jual beli online tidak memungkinkan terjadinya serah terima dengan segera (*at taqaabudh al fauri*) di majelis akad yang dipersyaratkan untuk jual beli barang-barang ribawi (emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam).

Dalilnya hadits Nabi SAW yang mensyaratkan jual beli

secara *yadan biyadin* (kontan/ada serah terima di majelis akad) untuk barang-barang ribawi. Nabi SAW telah bersabda, "Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (*al burru bil burri*), jewawut dengan jewawut (*al sya'ir bi al sya'ir*), kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (*mitslan bi mitslin sawaa'an bi sawaa'in*) dan harus dilakukan dengan kontan (*yadan bi yadin*). Jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan (*yadan biyadin*). (HR Muslim no 1587).

Imam Syaukani memberikan syarah hadits ini dengan berkata, "Jelaslah bahwa tidak boleh hukumnya menjual-belian satu jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya, kecuali dengan adanya serah terima (*al qabdh*). (Arab: *Zhaahiru haadza annahu laa yajuuzu ba'u jinsin ribawiyin bi-jinsin aakhara illaa ma'a al qabdh*). (Imam Syaukani, *Nailul Authar*, hlm. 1061).

Hanya saja, sebagai perkecualian dibolehkan jual beli kurma tidak secara *yadan biyadin*, yaitu dibolehkan tidak tunai atau dibolehkan tidak terjadi serah terima di majelis akad, dalam 3 (tiga) keadaan sbb;

Pertama, jika jual beli kurma itu dilakukan dengan akad jual beli pesan (*bai' as salam*), yaitu akad jual beli pada saat akad penjualnya belum memiliki kurmanya, dan pembelinya wajib membayar lunas di muka pada saat akad. Dalilnya hadits Ibnu 'Abbas RA bahwa Nabi SAW telah datang ke kota Madinah sedangkan mereka (penduduknya) melakukan jual beli salam (pesan) untuk kurma dengan jangka waktu dua tahun atau tiga tahun. (HR

Bukhari no 2126, bab "*As Salam fi Wazn Ma'luum*").

Kedua, jika jual beli kurma itu dilakukan secara tidak tunai, namun disertai adanya barang jaminan (*rahn*) dari pihak pembeli (yang berutang). Dalilnya adalah hadits dari Anas RA bahwa Nabi SAW telah menyerahkan baju besinya sebagai jaminan (*rahn*) kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi SAW mengambil darinya jewawut (*syaiir*) untuk keluarganya." (HR Nasa'i, VII/288; Ibnu Majah no 2437). (Imam Syaukani, *Nailul Authar*, no. 2299, hlm. 1090).

Ketiga, jika jual beli kurma dilakukan atas dasar saling percaya, maka dibolehkan jual beli kurma secara tidak tunai tanpa ada barang jaminan (*rahn*). Dalilnya adalah firman Allah SWT (yang artinya), "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)." (QS Al Baqarah (2):283).

Dalam kitab *At Tahriir wa At Tanwiir*, Syekh Muhammad Ath Thahir bin 'Aasyuur menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Jika sebagian kamu mempercayai amanah pada sebagian lainnya, maka dia tidak menuntut pihak lainnya untuk adanya *isyhaad* (persaksian pada jual beli non tunai) atau pun *rahn* (barang jaminan)." (Muhammad Ath Thahir bin 'Aasyuur, *At Tahriir wa At Tanwiir*, Juz III).

Kesimpulannya, jual beli kurma secara online hukum asalnya haram. Kecuali jika dilakukan dengan akad jual beli pesan (*bai' as salam*), atau disertai adanya barang jaminan (*rahn*) dari pihak pembeli (yang berutang), atau dilakukan atas dasar saling percaya. *Wallahu a'lam.* []

Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan Islam.

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, peduli dengan problematika dan membela kepentingan umat.

Kini **Media Umat** terus hadir untuk teguh dan konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan **Media Umat** sudah pasti membutuhkan dukungan umat.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang lain agar memiliki dan membaca **Media Umat**, jangan sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda.

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan orang lain silakan isi formulir di samping.

Kirim ke Agen daerah kami atau SMS berlangganan ke:

0857 1104 4000

FORMULIR BERLANGGANAN

Bismillah...

Saya ingin berlangganan

Media tabloid
mediaumat.news Memperjuangkan Kehidupan Islam

**TERBIT
1 BULAN
2 KALI**

Nama Pelanggan :
Alamat Pengiriman 1 :
Alamat Pengiriman 2 :
Telpon/ No. Hp-WA :
Jumlah Langganan : eksemplar
Dikirim Mulai edisi :
Sistem Pembayaran :



Harga : Jawa Rp 8.000/eks
Luar Jawa Rp 11.000/eks

Oleh: **Abu Inas**, Pembina Tabayyun Center

Toleransi dan Kekerasan dalam Islam

Toleransi telah dicontohkan Rasulullah SAW saat empat pemuka kafir Quraisy yakni Al-Walid bin Mughirah, Al-Ash bin Wail, Al-Aswad ibnul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian (Muslim) juga beribadah kepada Tuhan kami, kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik (menurut kami) dari tuntunan agama kami, kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, jika ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya" (Tafsir Al-Qurtubi/14:425).

Sebagai jawaban atas perkataan mereka, kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang menegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam hal yang menyangkut akidah. Allah SWT berfirman: "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku" (TQS Al-Kafirun: 6).

Sikap toleransi pun dijelaskan oleh Allah dalam Alquran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim" (TQS Al-Mumtahanah: 8-9).

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, "Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non Muslim yang tidak

memerangi kalian seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah kalian berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil." (Tafsir Alqur'anul 'Azhim, surat ke 7 ayat 247).

Ini adalah toleransi yang diajarkan di dalam Islam. Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bertoleransi pada orang-orang di luar Islam. Namun demikian, sikap toleransi tidak boleh dipraktikkan dalam hal yang menyangkut akidah. Adapun dalam kaitannya dengan tindak kekerasan, Islam telah menggariskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama, tindakan kekerasan di dalam Islam bukanlah sesuatu yang tercela atau harus dihindari, asalkan sebab dan syaratnya telah dipenuhi. Tindakan kekerasan seperti jihad, pemukulan edukatif, *qishash*, dan lain sebagainya, dilakukan secara selektif, tidak sembarangan dan asal-asalan. Misalnya, ketika negeri Islam diinvasi tentara kafir, kaum Muslim diperintahkan mengangkat senjata mengusir mereka. Begitu pula tatkala penguasa (Khalifah) telah menampakkan kekufuran nyata, seperti mengubah sendi-sendi Islam, menerapkan hukum kufur, dan lain sebagainya, maka kaum Muslim diperintahkan menggulingkan khalifah dan mengangkat senjata melawan mereka jika mampu dan tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ketika seorang istri melakukan pembangkangan, seorang suami dibenarkan untuk memukul dia dengan pukulan yang bersifat edukatif, bukan untuk menyakiti atau menganiaya. Dalam keadaan seperti ini, seorang Muslim dibenarkan melakukan tindakan kekerasan.

Kedua, dalam konteks penyebaran dakwah Islam, Islam mengedepankan dialog argumentatif, dan menjauhi sejauh-jauhnya tindakan kekerasan. Jihad adalah instrumen yang digunakan untuk melenyapkan halangan dak-

wah Islam, tetapi bukan metode untuk "mengislamkan seseorang". Islam tidak memaksa penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang diminta dari penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan adalah ketundukan pada kekuasaan Islam. Adapun untuk mengislamkan seseorang, Islam menggunakan cara *maw'izhah hasanah*, hikmah dan dialog argumentatif. Selain itu, penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat yang mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan dan rasa aman merupakan *da'wah bil hal* yang menjadikan orang-orang kafir tertawan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam.

Ketiga, Islam menentang semua bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada alasan *syar'i*. Bahkan Islam telah menetapkan sanksi yang sangat keras bagi siapa saja yang berusaha menciderai jiwa dan harta seseorang, baik Muslim maupun non-Muslim.

Keempat, khalifah atau wakilnya saja yang secara *syar'i* berhak dan absah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, seperti hukuman mati bagi orang yang murtad (hudud), jinayat, dan ta'zir. Selain khalifah dan wakilnya dilarang menjatuhkan sanksi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran.

Dengan pemaparan di atas, terbukti bahwa umat Islam adalah umat yang sangat menjunjung tinggi sikap toleransi. Penerapan hukum-hukum Islam dalam Daulah Islam di tengah-tengah masyarakat, tidak terbukti bahwa umat Islam adalah umat yang intoleran. Malah sebaliknya, kepemimpinan yang berlandaskan aturan-aturan Islam akan mewujudkan kehidupan antar umat beragama yang harmonis penuh dengan keadilan.[]

Oleh: **M. Arifin**, analis Ar Roya Center

Berdaulat Atas Kekayaan Alam Sendiri Pak Presiden? Masih Jauh...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya. "Kini, Alhamdulillah, kita menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri," kata Jokowi melalui akun Instagram resminya, Senin (31/12) seperti diberitakan *republika.co.id*.

Tidak terlambat untuk mengomentari pernyataan Presiden, mengingat pernyataan tersebut penulis anggap masih jauh dari fakta. Mengingat, negeri kita telah menjadi ajang pertarungan kolonial selama lebih dari satu abad. Itu tak lain, karena dunia Islam tidak pernah kekurangan sumber daya energi yang sangat dibutuhkan bagi industrialisasi.

Sayangnya, negeri-negeri Muslim itu memperlihatkan potret yang penuh paradoks, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Indonesia. Negeri yang kaya akan energi ini, ternyata tidak bisa menjamin kelangsungan kebutuhannya akan energi. Pabrik pupuk di Aceh terpaksa gulung tikar karena kekurangan pasokan gas. Listrik *byar pet* karena PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk pembangkitnya. Rakyat pun harus membayar mahal BBM.

Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada pemilik kendaraan tetapi juga kepada rakyat jelata. Ongkos-ongkos akan naik karena kenaikan komponen biaya transportasi. Padahal, energi ini adalah milik mereka, tetapi ironisnya mereka tidak bisa menikmatinya.

Swastanisasi SDA? Rakyat sebagai pemilik sah, dipaksa memberikan hak miliknya. Tragisnya lagi, mereka masih harus membayar pajak untuk membiayai apa yang disebut sebagai pembangunan, yang dinilai kurang mereka rasakan.

Ini adalah potret yang penuh paradoks. Potret ini sesungguhnya terjadi karena kebijakan yang dipilih terkait dengan pengelolaan energi itu salah. Kesalahan ini terjadi karena penguasa kaum Muslim tidak pernah memikirkan rakyat, kecuali diri, kroni, partai dan kekuasaan mereka sendiri.

Meski dunia Islam, khususnya Indonesia mempunyai cadangan minyak yang besar, pada dasarnya hal itu tidak ada gunanya karena tidak mampu memproduksi dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan. Menjadi pahit bagi rakyat jika diserahkan oleh penguasa untuk dikelola swasta. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya *political will* dari para penguasanya untuk mengurus urusan rakyatnya, serta intervensi asing dalam kebijakan pengelolaan energi.

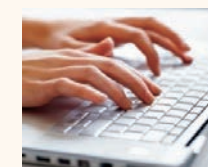
Semua krisis migas berpangkal pada liberalisasi migas yang sudah direncanakan sejak lama. Liberalisasi migas itu sepenuhnya perintah asing yang dipaksakan IMF, dituangkan di dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies* (LoI IMF, Januari 2000). Juga diperintahkan oleh Bank Dunia dengan menjadikannya syarat pemberian utang seperti tercantum di dalam dokumen *Indonesia Country Assistance Strategy* (World Bank, 2001).

Langkah strategisnya adalah dengan dibuat UU Migas yang mengamanatkan liberalisasi. Untuk memas-

titkannya, mereka kawal sejak penyusunan rumusan UU. Dokumen program USAID, TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013 menyebutkan: "Tujuan strategis ini akan menguatkan pengaturan sektor energi untuk membantu membuat sektor energi lebih efisien dan transparan, dengan jalan meminimalkan peran pemerintah sebagai regulator, mengurangi subsidi, mempromosikan keterlibatan sektor swasta..."

Juga disebutkan, "ADB dan USAID bekerja sama dalam menyusun UU Migas baru pada tahun 2000. Melengkapi upaya USAID itu, Bank Dunia telah melakukan studi komprehensif sektor migas, kebijakan penentuan harga..."

Hasilnya, UU Migas Nomor 22 tahun 2001 disahkan, liberalisasi migas menjadi amanatnya baik di sektor hulu maupun hilir. Di sektor hulu hal itu ditegaskan pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 dan lainnya. Hasilnya, asing makin menguasai sektor hulu migas, hingga 80 persen. Pertamina sebagai milik negara dengan UU tersebut dibiarkan berebut bahkan bergelut dengan asing untuk bisa mengelola migas di negerinya sendiri. Ibaratnya, negara sebagai bapak justru mengharuskan Pertamina sebagai anaknya untuk bergelut dengan anak orang asing yang lebih besar, untuk bisa mengelola kekayaan keluarga di pekarangan sendiri.[]



Kirimkan opini Anda terkait isu aktual dengan perspektif Islam ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.

Suaka Kanada untuk Rahaf al Qunun Propaganda Baru Serang Islam

Kisah Rahaf ini, jelas akan benar-benar dimanfaatkan negara-negara Barat maupun kelompok-kelompok HAM internasional yang selama ini memang alergi terhadap Islam.



Akhirnya, Rahaf al Qunun mendapatkan suaka dari Kanada. Remaja Saudi yang berusia 18 tahun ini menjadi warga negara baru Kanada dan diterima langsung Menlu Kanada di Bandara Toronto.

"Ini Rahaf al Qunun, seorang warga Kanada baru yang sangat pemberani," Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland memperkenalkannya sambil menggandeng tangan remaja Arab Saudi itu di bandara Toronto.

Menteri Freeland mengatakan, Rahaf al Qunun memilih untuk tidak menjawab pertanyaan media pada hari Sabtu (12/1).

"Sungguh menyenangkan bagi saya pagi ini untuk menyambutnya ke rumah barunya," kata Freeland.

Rahaf al Qunun mendapat perhatian

internasional melalui kampanye di media sosial, setelah mengaku murtad dari Islam dan takut dibunuh oleh keluarganya. Ketibaannya di Kanada mengakhiri pekan dramatis yang membuatnya melarikan diri dari keluarganya saat mengunjungi Kuwait dan kemudian terbang ke Bangkok.

Al Qunun dihentikan pada 5 Januari di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, oleh polisi imigrasi yang menolak masuk dan menyita paspornya. Dari sana, ia membarikade diri di sebuah hotel bandara untuk menghindari deportasi dan berkicau tentang situasinya. Pada Jumat (11/1), Perdana Menteri Justin Trudeau mengumumkan bahwa Kanada akan menerima al Qunun sebagai pengungsi.

Seperti yang dilaporkan *BBC online* (8/1) Rahaf Mohammed al Qunun, 18, sebelumnya berada di bawah pengawasan Ba-

dan Pengungsi PBB (UNHCR) dan pihak berwenang Thailand. Dia mengatakan kepada BBC bahwa dia telah keluar dari Islam, dan merasa takut akan dibunuh oleh keluarganya setelah dipaksa kembali ke Arab Saudi. Wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head mengatakan, Rahaf Mohammed al Qunun ketakutan dan kebingungan.

"Nyawa saya terancam bahaya. Keluarga saya mengancam akan membunuh saya karena hal-hal yang sangat sepele," ujar Rahaf.

Dia berkata: "Saya berbagi cerita dan foto saya di media sosial dan ayah saya sangat marah karena saya melakukan ini ... Saya tidak bisa belajar dan bekerja di negara saya, jadi saya ingin bebas dan belajar dan bekerja seperti yang saya inginkan."

Propaganda Serang Islam

Selama ini, nasib wanita Saudi, kerap menjadi isu hangat. Meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan syaria Islam, beberapa aturan di Saudi dan tradisinya, tidak bisa dilepaskan dari Islam. Inilah yang menurut pengamat politik internasional dari Bandung, Budi Mulyana, kenapa kisah wanita Saudi sering menjadi materi propaganda untuk menyerang Islam.

"Kisah Rahaf ini, jelas akan benar-benar dimanfaatkan negara-negara Barat maupun kelompok-kelompok HAM internasional yang selama ini memang alergi terhadap Islam, untuk kembali menyerang ajaran Islam dengan tuduhan melanggar HAM," paparnya.

Lebih jauh Budi Mulyana menjelaskan, kalau benar Rahaf al Qunun keluar dari Islam, memang dalam Islam, hukuman untuk orang murtad (keluar dari Islam) adalah hukuman mati. Budi Mulyana mengutip hadits Rasulullah SAW dalam HR Bukhari: "Siapa yang mengganti agamanya (murtad), bunuhlah dia."

Namun, ia menambahkan tuduhan murtad ini harus didasarkan pada proses pengadilan yang adil. Harus ada bukti yang nyata secara hukum, tidak boleh samar-samar. Kalaupun berupa pengakuan, harus dilihat apakah dalam keadaan normal atau tertekan atau dipaksa.

"Karena itu, sebelum dihukum, Muslim yang murtad, akan diberikan kesempatan, semacam direhabilitasi selama tiga hari, untuk dibina kembali agar kembali ke jalan Islam, melalui diskusi terbuka, termasuk ditanya apa alasannya, adakah yang memaksanya, kalau karena kemiskinan atau kelaparan, negara harus menanggungnya," tegasnya.

Dalam Islam, tambahnya, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam, tapi kalau sudah memeluk agama Islam tentu dia harus tunduk pada syaria Islam. Memang, menurut Budi Mulyana, persoalan akidah dalam Islam bukanlah perkara yang remeh, karena akidah Islam merupakan pondasi.

"Akidah adalah perkara pokok, jadi tidak diterima dalam Islam dengan sekenanya orang murtad, karena ini berarti bentuk penyimpangan dan menganggap remah akidah Islam, ini bisa merusak masyarakat bahkan negara," ujarnya.

Selama ini, di samping masalah murtad, persoalan kebebasan juga menjadi isu yang sering diangkat. Perempuan Saudi dianggap terlampaui dibelenggu. Salah satu yang dipersoalkan adalah aturan perwalian laki-laki, yang dituding membuat perempuan Saudi tidak bisa menghirup kebebasan.

Tentang kebebasan, menurut Budi Mulyana memang tidak semua tradisi Saudi itu sejalan dengan Islam. Menurutnya, meskipun Islam bertentangan dengan prinsip 'liberalisme' ala Barat, namun bukan berarti Islam menindas wanita. Dalam Islam, paparnya, wanita itu dimuliakan, bahkan pesan penting Rasulullah dalam haji *wada'* (perpisahan) adalah berbuat baik kepada wanita.

"Syaria Islam menjamin hak wanita untuk mendapatkan pendidikan sama seperti laki-laki, wanita juga boleh menyampaikan pendapatnya secara terbuka, termasuk kepada penguasa, wanita boleh berbisnis, wanita bahkan boleh ikut perang bersama laki-laki, namun semua itu tentu harus dalam koridor syaria Islam," ujarnya. **af**

Sikap Hipokrit Barat

Reaksi cepat Kanada untuk memberikan suaka kepada Rahaf al Qunun dengan alasan HAM, merupakan cermin sikap hipokrit Barat. Sebab di sisi lain, Barat justru melakukan banyak pelanggaran HAM. Barat bicara tentang kebebasan beragama, tapi melarang wanita Muslimah di beberapa negara Barat untuk menggunakan hijab berdasarkan keyakinan agama mereka.

Menguatnya *Islamophobia* di Barat, membuat Muslimah di Barat kerap mengalami pelecehan karena keyakinan mereka. Barat bicara HAM, namun membiarkan pembantaian terhadap umat Islam Palestina, bahkan mendukung penuh kebijakan Israel. Mendukung diktator bengis Mesir as Sisi dan Bashar Assad di Suriah untuk menindas rakyatnya sendiri.

Berapa banyak yang terbunuh karena serangan Amerika dengan pesawat *drone*-nya di Afghanistan dan perbatasan Pakistan? Amerika Serikat juga mendukung penuh koalisi Saudi dalam perang Yaman, yang telah membunuh banyak rakyat sipil dan menyebabkan kelaparan yang meluas. Dan banyak yang menjadi korbannya adalah para wanita dan anak-anak yang tak bersalah.

Negara-negara Barat juga tidak serius menghentikan kejahatan rezim Budha Myanmar yang menindas Muslim Rohingya. Termasuk, tidak bertindak tegas terhadap Cina, yang ingin mengubah paksa keyakinan Muslim Uighur di Turkistan Timur yang dijajah oleh Cina. Lebih dari 1 juta umat Islam dimasukkan dalam kamp-kamp politik dengan alasan re-educasi. Mereka didoktrin dengan ideologi komunis. Dilarang untuk beribadah, shalat, membaca Alquran, dan shaum di bulan Ramadhan. Umat Islam dipaksa untuk minum khamer yang dilarang dalam Islam, makan babi. Wanita Muslimahnya dipaksa untuk menikah dengan laki-laki komunis Cina. Namun Barat tidak melakukan tindakan yang nyata untuk menghentikan itu! **af**

Sumbangan Kekhilafahan Utsmani dalam Studi Geografi



■ Peta pertama Piri Reis disajikan kepada Sultan Selim I

Kewajiban negara dalam Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, menjadi faktor penting perkembangan sains dan teknologi di masa keemasan peradaban Islam. Bagaimana bisa mungkin menyebarkan Islam kalau tidak menguasai sains dan teknologi? Apalagi dalam dakwahnya, umat Islam harus berhadapan dengan negara-negara besar yang menghalangi dakwah Islam. Perang pun tak bisa dihindarkan. Dan salah satu kunci menang dalam perang adalah keunggulan dalam sains dan teknologi.

Di masa Kekhilafahan Utsmani, salah satu studi yang berkembang pesat, maju, dan memberikan sumbangan besar untuk dunia adalah geografi. Seperti di bidang astronomi, Kekhilafahan Utsmani mengembangkan tradisi klasik di bidang geografi. Khilafah Islam saat itu membutuhkan pengetahuan geografis untuk menentukan perbatasan wilayah mereka yang terus berkembang dan untuk membangun kontrol atas kegiatan militer dan komersial.

Ilmuwan Utsmani saat itu, memanfaatkan karya-karya geografis Muslim sebelumnya dan karya-karya asal Eropa. Dengan menambahkan pengamatan mereka sendiri, yang menghasilkan penemuan-penemuan baru. Sekolah geografi dan astronomi Samarkand merupakan sumber utama untuk perkembangan pengetahuan tentang geografi, pembuatan peta, dan bidang terkait. Sejak abad ke-16 dan seterusnya, para ilmuwan terkemuka seperti Piri Reis, Matrakci Nasuh, Saydi Ali Celebi dan para cendekiawan lainnya menghasilkan karya-karya geografis yang patut diperhatikan.

Ahli geografi Utsmani yang paling terkemuka adalah Muhiddin Piri Reis (w. 962 A.H./1554 C.E.) yang menghasilkan karya orisinal di bidang geografi laut dan navigasi di Istana Selim I dan Suleyman the Magnificent. Dia tertarik pada ilmu kartografi dan menyelesaikan peta dunia pada 1513 C. Timur. Peta ini adalah bagian dari peta dunia berskala besar yang disiapkan dalam dua bagian di kulit rusa. Gambar itu diambil berdasarkan rancangannya yang kaya dan terperinci dan peta Eropa, termasuk peta Amerika di Columbus. Ini adalah peta Utsmani pertama yang termasuk informasi awal tentang Dunia Baru yang menggambarkan Eropa barat daya, Afrika barat laut, tenggara dan Amerika Tengah.

Geografer yang bernama lengkap Hadji Muhiddin Piri Ibnu Hadji Mehmed terlahir di kota Gallipoli yang terletak di dekat Pantai Aegea pada 1465. Selain dikenal sebagai seorang geografer dan kartografer, Piri juga sempat menduduki



■ Peta Dunia dalam Ali Macar Reis' Atlas

jabatan Laksamana di Kekhalifahan Turki Utsmani. Peta dunia yang diciptakan Piri pada tahun 1513 ditemukan di Istana Topkapi Istanbul pada 1929. Yang paling menakjubkan, peta buatan Piri itu mampu menampilkan peta Amerika zaman kuno. Tak heran, jika peta yang diciptakannya ditabalkan sebagai "petunjuk dunia baru".

Peta karya Piri begitu fenomenal. Betapa tidak, dalam peta dunia pertamanya, Piri berhasil menampilkan peta dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam menggambarkan jarak dan posisi antarbenua yang ada di dunia. Posisi benua Afrika dan Amerika dibuat demikian detail dan teliti, termasuk memasukkan gambar Amerika Selatan. Pada 1528, Piri membuat peta dunianya yang kedua dengan menggambarkan Greenland dan Amerika Utara dari Labrador, Newfoundland, hingga ke arah utara menuju Florida, Kuba, dan bagian dari Amerika Tengah.

Sebelum berkiprah dalam bidang geografi dan kartografi, Piri mulai mengabdikan diri di Angkatan Laut Kekhalifahan Turki Utsmani pada 1481. Ia mengikuti jejak pamannya yang bernama Kemal Reis, pelaut ulung pada masa itu. Berbagai ekspedisi diikuti Piri dalam kariernya sebagai seorang marinir. Pada saat berekspedisi bersama Angkatan Laut Turki Utsmani, Piri ikut bertarung melawan pasukan angkatan laut Spanyol, Genoa, juga Venezia. Dia juga ikut bertempur dalam Pertempuran Lepanto I pada 1499. Pada 1500, ia terlibat dalam Pertempuran Lepanto II, yang juga dikenal sebagai Pertempuran Modon.

Piri kemudian menyelesaikan karyanya Kitab-i Bahriye pada 1521. Lalu dia ikut bertempur melawan Ksatria St John dengan pasukan Kekaisaran Turki Utsmani. Dalam pertempuran tersebut Ksatria St John kalah dan menyerahkan Pulau Rhodes kepada Turki Utsmani pada 25 Desember 1522. Hingga kini, kiprah dan dedikasi Piri terus dikenang masyarakat Turki. Guna mengenang jasanya yang tak ternilai, sejumlah kapal perang dan kapal laut milik Angkatan Laut Turki diberi nama Piri Reis. [af dari berbagai sumber]

KRONIK MANCANEGARA

Muslimah Uighur Alami Perlakuan Buruk di Kamp Pendidikan Ulang

Gulbahar Jelilova, seorang perempuan Uighur mengaku telah menghabiskan waktu selama 15 bulan di dalam salah satu kamp re-educasi menuturkan catatan langka tentang kondisi tersebut.

"Kami ditahan di kamar gelap dengan tikus dan tikus," katanya kepada program PM ABC seperti dilansir *abc.net.au* dan dikutip *mediaumat.news*, Kamis (10/1/2019).

"Kadang-kadang mereka mengikat logam seberat 5 kilogram di kaki kami sebagai cara hukuman.

"Jika mereka ingin menghukum lebih berat, mereka akan memborgol [kami] dan kami akan dipaksa untuk melihat tembok di seberang selama sekitar 17 jam."

Gulbahar Jelilova, yang berasal dari Kazakhstan, telah menghabiskan dua dekade terakhir melakukan bisnis di perbatasan Cina-Kazakhstan.

Dia mengatakan pada Mei 2017 dirinya ditangkap di Kota Urumqi di Cina. Ia dituduh mentransfer dana secara ilegal sebesar 17 ribu yuan (3.500 dolar AS) dari Cina dan Turki.

"Ketika saya berada di kamp, mereka biasa memberi kami suntikan, mengambil sampel darah, memberi obat yang tidak kami ketahui," katanya.

"Jika kami bertanya obat apa itu, mereka akan dihukum karena mengajukan pertanyaan."

"Dan tidak ada orang perempuan yang mengalami menstruasi bulanan karena mereka memberi kita obat khusus yang menghentikan menstruasi."

Dia mengaku selama berada di dalam kamp dirinya kerap dipukuli dan ketika pertama kali masuk dia memiliki berat 76 kilogram tetapi dalam sebulan ia kehilangan berat badan lebih dari 20 kilogram.

"Tujuan akhir dari kamp-kamp konsentrasi itu adalah untuk menghilangkan orang-orang Uighur, kaum Muslim," katanya.

Jelilova mengatakan dia dikeluarkan dari kamp setelah upaya lobi yang berkelanjutan oleh keluarganya. []

Sisi Akui Mesir Kerja Sama Militer dengan Israel



Stasiun televisi AS, CBS, telah menayangkan hasil wawancaranya dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dalam program *60 Minutes*, pada Ahad (6/1) yang esoknya diberitakan pula oleh *republika.co.id*. Penayangan tetap dilakukan meskipun ada permintaan

dari Pemerintah Mesir untuk tidak menyiarkan wawancara tersebut.

Dalam wawancara itu, Sisi mengatakan kepada pembawa acara program, Scott Pelly, bahwa negaranya telah terlibat dalam kerja sama militer dengan Israel di Sinai.

Sebelum wawancara tersebut ditayangkan, CBS mengatakan informasi yang diberikan oleh Sisi bukan jenis berita yang ingin disiarkan oleh pemerintah. "Tim 60 Minutes dihubungi oleh duta besar Mesir tak lama setelah itu dan mengatakan bahwa wawancara tidak dapat ditayangkan," kata CBS, tanpa menyebutkan bagian mana dari komentar Sisi yang tak ingin diungkap.

Pengakuan Sisi terkait kerja sama militer dengan Israel dianggap sebagai topik sensitif dan dapat merusak Mesir. Militer Mesir tahun lalu membantah laporan media bahwa mereka telah bekerja sama dengan Israel dalam melawan militan di Sinai utara.

"Itu benar. Angkatan Udara kadang-kadang perlu menyeberang ke wilayah Israel. Dan itulah mengapa kami melakukan berbagai koordinasi dengan Israel," ujar Sisi. []

India Akan Akui Kewarganegaraan Imigran Tertindas Kecuali Muslim

Departemen Dalam Negeri India, Selasa lalu (08/01), mengatakan bahwa negaranya ingin memberikan kewarganegaraan kepada imigran dari agama minoritas yang telah dianiaya di negara-negara Muslim tetangga termasuk Pakistan, seperti diberitakan *France24* yang dikutip *kiblat.net*, Sabtu (12/1).

Para pengamat mengkritik Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut, yang termasuk bagian dari amandemen UU kewarganegaraan tahun 2019. RUU tersebut menggambarkannya sebagai anti-Muslim dan upaya Partai Bharatiya Janata, partai Perdana Menteri Narendra Modi, untuk memperkuat konstituen Hindu menjelang pemilihan umum Mei.

RUU itu akan memberikan kewarganegaraan kepada pengikut Hindu, Sikh, Jain, Budha, Kristen, dan Persia dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh, yang bermigrasi ke India sebelum 31 Desember 2014, mengecualikan Muslim. []

joko prasetyo

Pemimpin Penipu Rakyat Diharamkan Masuk Surga

"Mâ min 'abdin yastar'ihillâhu ra'iyatan yamûtu yawma yamûtu wa huwa ghâsyin li ra'iyatihi illâ harramallâhu 'alayhi al-jannah (Tidaklah seorang hamba yang Allah minta dia mengurus rakyat, dia mati pada hari ketika dia menipu (mengkhianati) rakyatnya kecuali Allah haramkan baginya surga)"
(HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits ini, Rasul SAW mengungkapkan dengan redaksi penafian (kata *mâ*) dilanjutkan dengan pengecualian (kata *illâ*) untuk menetapkan. Ini memberi pengertian, tak seorang pun yang memenuhi deskripsi hadits ini kecuali pasti menghadapi akibat yang dijelaskan dalam hadits ini.

Makna *yastar'ihillâhu ra'iyatan*, yakni kepadanya Allah delegasikan pengaturan urusan rakyat, dengan menobatkannya untuk menegakkan berbagai kemaslahatan rakyat dan memberinya kendali urusan mereka. *Ar-râ'iy* adalah penjaga yang diberi amanah atas pengaturan urusan rakyat.

Kata *ghâsyin* maknanya *khâ'in* (khianat) atau *khâdi'* (penipu). Artinya mengelabui rakyat atau mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus urusan rakyat, memelihara berbagai kemaslahatan rakyat dan semua kewajiban dan tanggung jawab *ri'ayah*.

Kata *yawma yamûtu wa huwa ghâsyin* maknanya saat ajal menghampirinya dan sebelum itu taubat sudah tidak lagi bisa diterima, sementara pada waktu itu dia seorang *ghâsyin*.

Adapun sabda Rasul SAW, *illâ harramallâhu 'alayhi al-jannata*, maksudnya dijelaskan dalam riwayat lain *lam yadkhul ma'ahum al-jannata* (tidak masuk surga bersama mereka). Artinya dia tidak masuk surga bersama rakyat-

nya yang masuk surga, sebab dia harus mendapat hukuman karena mengkhianati amanah *ri'ayah* itu. Jadi maknanya bukan dia kekal di neraka.

Jadi hadits ini seperti dijelaskan oleh Ibn Bathal di dalam *Syarh Ibn Bathal*, merupakan penjelasan dan ancaman keras terhadap para pemimpin keji (*aimmah al-jûr*). Jadi siapa yang menelantarkan orang-orang yang urusan mereka Allah percayakan kepadanya atau dia mengkhianati mereka atau menzalimi mereka, maka kepadanya diarahkan tuntutan atas kezaliman-kezaliman terhadap hamba pada Hari Kiamat kelak.

Qadhi 'Iyadh mengatakan seperti dikutip oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Shahih Muslim li an-Nawawi*, "maknanya jelas dalam hal peringatan dari menipu (mengkhianati) kaum Muslimin, peringatan untuk orang yang kepadanya didelegasikan sesuatu dari urusan mereka, dia diminta mengurus mereka dan dia diangkat untuk mengurus kemaslahatan mereka dalam hal agama dan dunia mereka. Jika dia berkhianat dalam apa yang dipercayakan (diamanahkan) kepadanya dan dia tidak menasehati dalam apa yang didelegasikan kepadanya yang kadang itu dengan tidak memberitahu mereka apa yang harus mereka pegang teguh dan mereka ambil dari agama mereka, dan kadang dengan tidak melakukan apa yang telah ditentukan untuknya berupa menjaga syariah mereka dan membela/mempertahankan syariah dari setiap penentang yang akan memasukkan sesuatu di dalamnya atau memalingkan makna-maknanya, atau mengabaikan hudud mereka, atau menelantarkan hak-hak mereka atau tidak melindungi/menjaga apa yang mereka peroleh dan tidak menghadapi musuh-musuh mereka, atau meninggalkan langkah keadilan di tengah mereka, maka sungguh dia telah menipu mereka." Qadhi 'Iyadh mengatakan, "sungguh Allah SWT telah memperingatkan bahwa hal demikian termasuk dosa besar yang berakibat menjauhkan dari surga, wallah a'lam."

Al-Amir ash-Shan'ani di dalam *Subul as-Salâm* menjelaskan, "Sabda Rasul SAW *yawma yamûtu* -hari ketika dia mati-" maksudnya bahwa dia dihampiri kematian sementara dia menipu rakyatnya, tanpa bertaubat dari hal itu. Dan *al-ghisyyu* adalah lawan dari *an-nushû* (nasehat). *Ghisyyu* itu terjadi dengan kezaliman dia terhadap rakyat dengan mengambil harta mereka, menumpahkan darah mereka, melanggar kehormatan mereka, menghalangi diri dari keperluan dan kebutuhan mereka, menahan dari mereka harta Allah SWT yang Allah tetapkan menjadi milik mereka yang ditentukan untuk pengeluaran-pengeluaran, tidak memberitahu mereka apa yang wajib atas mereka baik perkara agama dan dunia mereka, mengabaikan hudud, tidak menghalangi orang-orang yang membuat kerusakan, menelantarkan jihad dan lainnya yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hamba. Termasuk dalam hal itu mengangkat orang yang tidak melingkupi mereka dan tidak memperhatikan perintah Allah tentang mereka dan mengangkat orang yang mana Allah lebih meridhai orang lainnya padahal orang lain yang lebih diridhai oleh Allah itu ada. Dan hadits-hadits menunjukkan haramnya *al-ghisyyu* (penipuan/khianat) dan bahwa itu termasuk dosa besar karena adanya ancaman terhadap *al-ghisyyu* itu sendiri."

Terhadap pemimpin yang menipu itu maka sikap terhadapnya jelas. Dalam riwayat lain dinyatakan secara gamblang haramnya membenarkan kebohongan penguasa. Haram pula mendukung dan membantunya. Begitu pula terhadap pemimpin yang penipu. Jika telah tampak menipu rakyat, apalagi berkali-kali, maka tentu saja tidak boleh mendukungnya. Tentu juga tidak boleh mengangkatnya kembali menjadi penguasa. *Wallâh a'lam bi ash-shawâb*. ■ ya

LIVE ON AIR

DaktaFM

Secretan Dunia Islam

ACARA INI DAPAT DINIKMATI SECARA LIVE
MELALUI AUDIO STREAMING DI WWW.DAKTA.COM

SETIAP SENIN
JAM 07.30-08.00 WIB



BERSAMA:

UST MUJIYANTO

(REDAKTUR MEDIA UMAT)

ACARA INI TERSELenggara ATAS KERJASAMA:



dengan beriklan
di Media Umat, Insya Allah
produk Anda
akan dikenal oleh
lebih dari **150.000**

pembaca **Tabloid**
Media Umat
yang tersebar di seluruh
penjuru nusantara

Dapatkan Discount Special

TARIF IKLAN

URAIAN	UKURAN	HARGA
1 Halaman Back Cover	255 X 370 mm	Rp 20,000,000
1 Halaman Dalam	255 X 360 mm	Rp 16,000,000
½ Halaman Dalam	255 X 180 mm	Rp 8,000,000
1/4 Halaman Dalam	125 X 180 mm	Rp 4,000,000
1/8 Halaman Dalam	125 X 90 mm	Rp 2,000,000
1/16 Halaman Dalam	125 X 45 mm	Rp 1,000,000
Advetorial 1 Halaman	255 X 360 mm	Rp 11,000,000
Center Spread (2 Halaman)	520 X 360 mm	Rp 36,000,000

Iklan, hubungi:
0857 1713 5759 (Telp/ WA)
email: iklan.tabloidmu@gmail.com,
www.mediaumat.com



KETENTUAN IKLAN

- Materi diserahkan selambat-lambatnya 1 minggu (7 hari) sebelum terbit.
- Materi iklan dalam bentuk softcopy dengan format CDR, JPG, TIF resolusi 300 dpi, CMYK.
- Desain iklan menjadi tanggung jawab pihak pemasang iklan.
- Materi iklan tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, serta tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan, atau merugikan nama baik pihak lain.
- Pihak pemasang bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi materi iklan tersebut.
- Pembayaran dilakukan maksimal 1 minggu sebelum terbit.
- Pembayaran di transfer ke Rekening:
- BNI Syariah: 0245 8009 73 atau BSM: 7000 5898 47
An. Budi Darmawan.



Ikuti channel resmi media sosial Mediaumat di :

mediaumat.news
Media Umat
@MediaUmat
@mediaumat.news
t.me/MediaUmatNews

DAPATKAN UPDATE TERBARU SEPUTAR BERITA ISLAM DARI MEDIA UMAT

Media Umat Online atau MU Online hadir di tengah-tengah hiruk pikuk keterbukaan informasi yang luar biasa. Begitu derasnya informasi terkadang tidak tahu lagi mana informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. MU Online hadir dengan berita-berita yang aktual, tajam, akurat, dapat dipercaya, dan mencerdaskan umat. Sesuai dengan motto kami "Melanjutkan Kehidupan Islam" tampil dengan warna berita yang berbeda dan melihat berbagai peristiwa dengan kaca mata khas Islam serta memihak kepada kaum Muslim. Selamat membaca!



www.mediaumat.news

Memperjuangkan Kehidupan Islam